

Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf"

**(Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum
Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)**

Oleh: Turiman

A. Menelusuri Jejak Pemikiran Prof Tjip

Tulisan ini mencoba mengkristalkan pemikiran Prof Satjipto Rahardjo dari beberapa pemikiran beliau yang penulis lakukan melalui komtemplasi digelapan malam. Oleh karena itu paparan ini lebih mengarah paparan kepingan-kepingan pemikiran yang tersebar dari artikel dan buku-buku beliau serta mengikuti perkembangan berbagai komentar para penstudi hukum setelah menganalisa pemikiran yang terpaparkan dalam sebuah diskusi terbatas di Universitas Tanjungpura dengan para mahasiswa peserta S3 Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP KPK UNTAN 2009, bersamaan dengan mencuatnya pernyataan Ketua MK Mahfud MD pada sebuah acara stasiun televisi (TV ONE) yang menyatakan, bahwa ia sependapat dengan pandangan Prof Tjip dan hal itu disampaikan setelah satu hari Prof Tjip memberikan kuliah melalui telekomprence yang diikuti oleh seluruh Fak Hukum di Indonesia 29 Oktober 2009 dan ketika itu penulis tergugah dan bertanya apa sebenarnya Pemikiran Hukum Progresif itu sebenarnya?

Penulis menyadari, bahwa ketika memasuki situasi transisi dan perubahan yang sangat cepat saat ini, hukum Indonesia ternyata memiliki banyak catatan untuk dikaji. Salah satunya yang dapat dipaparkan pada paparan ini, yaitu pandangan seorang yang dapat disebut pakar yang selama ini senantiasa melihat hukum melalui cara pandang berbeda. Dialah Prof Satjipto Rahardjo, barang kali bukan nama yang asing bagi kalangan praktisi dan akademisi hukum di Indonesia. Buah karyanya dalam berbagai tulisan telah memberikan nuansa baru bagi perkembangan pemikiran hukum.

Ada beberapa alasan mengapa pemikiran beliau dikemukakan dalam paparan ini. *Pertama*, alasan paling logis, bahwa salah satu beberapa referensi Prof Tjip yang penulis memiliki, sehingga cukup memudahkan untuk memetakan secara garis besar pemikiran beliau tentang hukum di Indonesia.

Kedua, Sepengamatan penulis ternyata beberapa pemikir lain di bidang hukum sudah banyak dikupas dalam beberapa buku, baik untuk tingkat dasar (pengantar) sampai tingkat lanjut tentang hukum Indonesia, sebut saja beberapa tulisan dan karya Mochtar Kusumahatmadja, Soerjono Soekanto dan lain-lain.

Ketiga, orisinalitas terhadap pemikiran Satjipto Rahardjo sesungguhnya mewakili konteks berpikir kontemporer atau postmodernis, seperti sedang membumi (*boming*) saat ini, yaitu menyangkut perkembangan yang luar biasa pesat dalam ilmu dan era penegakan hukum yang "carut marut" saat ini.

Keempat, substansi pemikiran yang dikemukakan mengarah kepada penemuan teori hukum, hanya mungkin ada pertanyaan yang menghujam pada diri penulis dapatkah teori hukum Prof Tjip ini menjadi teori yang membumi (*Grounded Theory*) atau yang meng-Indonesia.

Kelima, Pemikiran Prof Tjip apabila mengkristal secara terus menerus bisa jadi menjadi sebuah alternatif pemikiran hukum yang mengeser paradigma hukum yang sangat positivisme dan menjadi sebuah paradigma baru pemikiran hukum di Indonesia, bahkan di dunia.

Hukum adalah sebuah tatanan (Hukum ada dalam sebuah tatanan yang paling tidak dapat dibagi kedalam tiga yaitu : tatanan transedental, tatanan sosial dan tatanan politik.) yang utuh (holistik) selalu bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil.

Butiran pemikiran demikian itu akan dijumpai dalam banyak gagasan tentang hukum yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. Bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih daripada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (*genuine science*), (Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai objek ilmu daripada profesi, dengan selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-hal dibelakang hukum, keinginan untuk melihat logika sosial dari hukum lebih besar daripada logika hukum atau perundang-undangan), yang seharusnya selalu dimaknai sehingga selalu *up to date*. Pemikiran konvensional yang selama ini menguasai/mendominasi karakteristik berpikir ilmuwan hukum, bagi Satjipto merupakan tragedi pemikiran, penulis sebut saja parsialisme pemikiran atau belum *out of the box*.

Satjipto Rahardjo merupakan salah satu pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif. Prof. Tjip, begitu orang-orang menyebutnya, lebih terkenal (khususnya) di dunia akademis sebagai "Begawan Sosiologi Hukum". Pemikirannya akan banyak dijumpai dalam berbagai bentuk, baik lisan maupun tulisan, buku teks atau tercerai berai di berbagai surat kabar dalam bentuk artikel dan makalah seminar/diskusi. Substansinya sangat beragam bahkan sangat luas, mulai dari hal yang bersifat filosofis, sosiologis bahkan anthropologis dan religius. Ciri pemikirannya sesuai dengan perkembangan saat ini dapat dimasukkan ke dalam pemikir kontemporer dalam ilmu hukum postmodernis sekaligus kritis.

Salah satu dari sekian banyak idenya tentang hukum adalah apa yang sering disebutnya sebagai 'Pemikiran Hukum Progresif', yaitu semacam refleksi atau sebuah kontemplasi dari perjalanan intelektualnya selama menjadi musafir Ilmu. Ulasan yang ada dalam paparan ini, hanya berupa sketsa kecil dan bisa jadi tidak dapat menggambarkan substansi, konsep dan pesan yang ada didalamnya. Karena fokusnya lebih kepada kepingan-kepingan dari pidato emeritusnya serta berbagai referensinya, juga beberapa diskusi di ruang kelas antara mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan dosen penerjemah juga diskusi terbatas berbagai diskusi publik, ketika mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang melalui KPK UNTAN Pontianak Kal-Bar.

Meskipun demikian, sebagai sebuah tulisan berbentuk sketsa hal ini cukup representative, mengingat kedalam substansi yang dikemukakan dalam pidato emeritusnya dan juga materi diskusi serta referensinya. Esensi utama pemikirannya, berangkat dari konsep bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan atau hukum tidak selesai ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus, tetapi melalui proses pemaknaan yang tidak pernah berhenti, maka hukum akan menampilkan jati dirinya yaitu sebagai sebuah "ilmu". Proses pemaknaan itu mengelaborasi sebagai sebuah proses pendewasaan sekaligus pematangan, sebagaimana sejarah melalui periodisasi ilmu memperlihatkan runtuh dan bangunannya sebuah teori, yang dalam terminologi Thomas Kuhn disebut sebagai "lompatan paradigmatika".

B. Diantara Persimpangan Profesi dan Ilmu

Bagi Satjipto Rahardjo, lahirnya program Pascasarjana dalam pendidikan hukum di Indonesia, pada tahun 1980-an merupakan sebuah pembalikan paradigmatik (revolusioner) dalam dunia pendidikan hukum, sebagaimana dijelaskan, "Dikatakan

sebagai revolusi, oleh karena sejak dibuka *rechtshogeschool* di jaman kolonial Belanda pada tahun 1922, maka Indonesia hanya mengenal program profesi saja. Maka sungguh revolusionerlah sifat atau kualitas perubahan pada pertengahan tahun 1980-an itu, mulai saat itu Indonesia tidak hanya mengenal pendidikan profesi, melainkan juga keilmuan, khususnya dalam bidang hukum ...”

Apalagi setelah dibukanya Program Doktor Ilmu Hukum, khususnya di UNDIP, maka lebih jelaslah kedudukan hukum sebagai objek ilmu, dan mengokohkan eksistensi tentang program keilmuan. Sehingga mereka yang hendak kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, tidak harus memiliki latar belakang formal SI Hukum. Konsekuensi yang muncul, bahwa para ilmuwan hukum akan diajak "thawaf" untuk menjelajah hukum secara luas yang intinya tidak lain adalah *searching for truth* (pencarian kebenaran). Inilah sebuah *master key* pemikiran beliau, bahwa setiap akademisi hukum memiliki kewajiban untuk upaya pencarian kebenaran. Pencarian kebenaran inilah sebenarnya disebutnya sebagai proses pemaknaan terhadap hukum, dan ini pula merupakan kesadaran visioner, bahwa tugas ilmuwan adalah mencerahkan masyarakat, sehingga dunia pendidikan memberikan kontribusi dan tidak melakukan pemborosan atau sering disebut oleh beliau hukum bukan untuk hukum tetapi hukum dibuat untuk manusia.

Selama ini, khususnya sebelum lahirnya S2-S3, pendidikan hukum lebih bersifat kepada apa yang disebutnya dengan Lawyers Law, atau Law for the lawyers atau Law for the professional, setiap orang dibawa dan diarahkan untuk menjadi seorang profesional, dan sisi buruknya muncul pandangan bahwa itulah satu-satunya kebenaran, bahwa hukum hanyalah ada dalam wilayah yang disebut dengan “logika hukum” tataran norma ansic. Pandangan ini kemudian berkembang lebih jauh bahkan mendominasi dan menghegemoni, sehingga setiap orang apabila berbicara hukum seolah-olah hanya wilayah “logika hukum” norma ansic itulah kebenaran, di luar wilayah itu bukanlah hukum. Namun dengan munculnya pendidikan S2 dan S3, maka wilayah kebenaran (hukum) menjadi jauh lebih luas daripada potret hukum yang sudah direduksi menjadi sekedar Lawyers Law.

Untuk melihat lebih jelas problematika diatas, Satjipto Raharjo memberikan gambaran tentang kajian dua domain pendidikan yang berbeda itu, dengan menjelaskan bahwa pendidikan hukum Profesional, dan pendidikan S2 dan S3, akan melihat hukum pada mapping sebagai berikut; ¹

Sebenarnya Ilmu	Ilmu Praktis
Science Genuine Science: What is a law? Credo: in search for the truth, the truth about law. Pencarian, Pembebasan dan pencerahan. Indefinitive; batas-batasnya kabur. Orientasi: komunitas dunia ilmu . Kesadaran: pencarian kebenaran meski pada saat yang sama kita tidak dapat menggenggam kebenaran tersebut.	Ilmu Hukum Positif; What should be considers as law? Praktis; Keterampilan/skill Hukum positif; Profesional Study; Lawyers Law-Law for the lawyers. Credo: “Rules and Logic” Concern: What to do?, How to do? Mempertahankan hukum positif Final definitive.

¹Otje Salman, "Menuju Pemikiran Hukum Progresif di Indonesia", <http://hukumtatanegaraindonesia>, diunduh, 17 Desember 2009

Pertanyaannya apakah ada "benang merah antara Profesi dan Ilmu" menurut penulis ada benang merahnya diantara keduanya, tetapi benang merah itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan atau sesuatu yang dikhotomis, penulis sependapat dengan apa dinyatakan oleh K. Kopong Medan & Mahmutarom HR dalam sebuah kata editor: yang bertitle: "Memahami "Multi Wajah" Hukum" dinyatakan: Adalah sebuah langkah yang setrategis apabila kita coba mencermati dinamika studi hukum yang terjadi di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro Semarang. Bukankah sesuatu yang tidak beralasan kalau para penggagas berdirinya PDIH Undip- seperti Satjipto Rahardjo, Muladi, Barda Nawawi Arief, dan sebagainya-menetapkan program unggulannya yang "multi entry", yang memungkinkan orang-orang dari disiplin ilmu lain untuk mengikuti studi di PDIH Undip. Strategi pendidikan hukum yang demikian itu dimaksudkan untuk bisa mendapatkan tampilan wajah hukum yang sesungguhnya. Itu berarti, baik studi-studi yang normatif maupun yang sosiologis, antropologis, psikologis, politik, ekonomi, dan sebagainya ikut dikembangkan bersama-sama sesuai minat mahasiswanya agar penggalan wajah hukum yang dikemukakan oleh masing-masing perspektif dapat disatukan menjadi satu kesatuan wajah hukum yang utuh.²

Perpaduan itu dikemas dengan satu kalimat, yaitu saling menyapa antara berbagai perspektif dalam memahami pemikiran hukum yang berkembang saat ini baik doktrinal maupun yang non doktrinal atau yang melakukan pendekatan analisis normologik, yakni wajah hukum yang beragam: (1) wajah hukum yang sarat dengan asas keadilan, (2) wajah hukum yang sarat dengan norma yang dipositifkan melalui peraturan perundang-undangan dan (3) wajah hukum yang judgemande atau yang tampil dalam putusan-putusan hakim, Tipologi wajah hukum yang demikian itu selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran, yakni ajaran tentang bagaimana hukum harus diketemukan atau diciptakan untuk menyelesaikan perkara atau problem solving baik dari dimensi kenegaraan maupun dimensi kemasyarakatan, sebaliknya dengan yang melakukan analisis nomologik, yakni logika hukum yang berlandaskan pada nomos (realitas sosial). Konsep hukum yang demikian itu jelas tidak akan menampilkan wajah hukum yang normatif (rules), melainkan sebagai regularities (pola-pola perilaku) yang terjadi dialam pengalaman dan atau sebagaimana yang tersimak di dalam kehidupan sehari-hari (sine ira et studio)³

Penulis perpaduan kedua analisis itu sama halnya kita memahami sinergisitas ayat-ayat kaulyah dengan ayat-ayat kauniyah berdasarkan Al-Qur'an, penulis menyebut dengan satu proposisi "sesungguhnya Al-Qur'an itu berthawaf dalam dirimu", karen memang manusia diperintahkan untuk memperhatikan kedua kategori ayat-ayat itu dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan tetapi terbedakan, oleh karena itu harus dipahami secara holistik bukan parsial, Jadi kedua pandangan itu bisa diketemukan jika kita tidak hanya memandang struktur hukum sistimatis hirarkis tetapi juga memandang struktur hukum itu sesungguhnya berthawaf, mengapa demikian, Satjipto Rahardjo lebih jauh menegaskan, bahwa tidak ada tatanan sosial, termasuk didalamnya tatanan hukum, yang tidak bertolak dari kearifan pandangan tentang manusia dan masyarakat. Dengan perkataan lain, tidak ada tatanan tanpa paradigma.⁴ Kesamaan sikap, perlakuan, filosofi antara bangsa dalam menghadapi pergeseran pemikiran hukum global sangat diperlukan,

² K Kopong Medan & Mahmutarom HR dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, halaman ix

³ Soetandyo Wignyosoebroto, "Materi Tutorial Mata Kuliah Penulisan Disertasi untuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, halaman 11-15.

⁴ Satjipto Rahardjo. "Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, Makalah Seminar Nasional Sosiologi Hukum dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, 1998.

oleh karena itu konsep Edward O Wilson tentang "penyatuan Ilmu Pengetahuan" yang dilontarkan dalam buku berjudul *Consilience: The Unity of Knowledge*, Idealisme Wilson ini didasarkan pada suatu keyakinan bahwa dunia ini bersifat tertata dan dapat diterangkan hanya dengan sedikit saja hukum-hukum (alam). Oleh karena itu, penyatuan ilmu pengetahuan bagi Wilson merupakan "suatu lompatan bersama dengan mempertalikan atau mempersatukan fakta-fakta dan teori-teori diseluruh disiplin ilmu untuk menciptakan suatu dasar penalaran yang sama dalam memberikan penjelasan tentang sebuah "obyek" studi"⁵

C. Ilmu Hukum mengalami pergeseran paradigmatis

Pada penjelasan lain yang berkaitan dengan problematika diatas, adalah sikap ilmuwan yang harus senantiasa menyikapi ilmu sebagai sesuatu yang terus berubah, bergerak dan mengalir, demikian pula ilmu hukum. Garis batas ilmu hukum selalu bergeser sebagaimana dijelaskan, "... Maka menjadi tidak mengherankan bahwa baris perbatasan ilmu pengetahuan selalu berubah, bergeser, lebih maju dan lebih maju"

Dengan menganalogikan pergeseran paradigmatis dalam ilmu fisika khususnya pemikiran Newton yang terkenal dan pada waktu itu menghegemoni para fisikawan kemudian digantikan oleh era baru dengan munculnya teori kuantum modern yang pada kenyataannya lebih mampu menjawab persoalan-persoalan fisika yang tidak terpecahkan sebelumnya. Harus diakui, bahwa Fisika Newton telah memberikan jasa luar biasa besar terhadap persoalan-persoalan fisika yang bersifat makro, logis, terukur dan melihat hubungan sebab akibat (mekanis), namun tidak mampu menjawab persoalan mikro, yang bersifat relative, kabur, tidak pasti, namun lebih menyeluruh. Lahirnya teori kuantum modern yang memecahkan kebuntuan dari teori fisika Newton tersebut, selanjutnya merubah cara pandang ilmuwan tentang realitas alam semesta. Perubahan itu tentu saja dimaknai secara bervariasi oleh setiap orang yang mencermatinya, namun hakekat utamanya jelas bahwa lahirnya teori kuantum adalah penjelasan paling logis bahwa ilmu senantiasa berada di tepi garis yang labil.

Satjipto Raharjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk Ilmu Hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat "dari yang sederhana menjadi rumit" dan "dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan". Inilah yang disebutnya sebagai "pandangan holistik dalam ilmu (hukum) Pandangan holistik ini memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh. Diilhami oleh gagasan Edward O. Wilson melalui tulisannya menjadi acuan para penstudi hukum yaitu *Consilience: The Unity of Knowledge*, membawa kita kepada pandangan pencerahan tentang kesatuan pengetahuan, sebagaimana dijelaskan Ian G. Barbour, "Wilson berpendapat bahwa kemajuan sains merupakan awal untuk melakukan penyatuan (unifikasi) antara sains alam, sains sosial dan sains kemanusiaan. Pencarian hubungan antar disiplin merupakan tugas yang sangat penting, dan Wilson menghimpun beberapa disiplin secara luas dan anggun".⁶

Menurutnya tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat.

⁵ Edward O Wilson, *Consilience: The Unity of Knowledge*. Alfred A. Knopf Inc, 1998.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, 2004, halaman 18.

Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang analytical-positivism atau rechtdogmatiek yaitu bahwa alam (dalam terminology Newton) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat. Dengan munculnya teori kuantum, bahkan teori keos, imbasnya terasa sekali kepada perkembangan pemikiran hukum. Maka situasi atau yang selama ini teramalkan dalam konsep yang dijelaskan diatas (Kelsen dan Austin) menjadi tatanan yang tidak dapat diprediksi, acak, simpang siur, dan dramatis.

Ternyata gagasan fisika kuantum tersebut di atas dengan relativitasnya, membantu kita untuk tidak memutlakan gagasan dan nilai yang kita pegang, tidak ada di dunia ini yang mutlak, yang paling benar dan paling baik sendiri, yang mutlak hanya Allah SWT. Pemutlakan terhadap kebenaran yang relatif di atas itu pada dasarnya akan merusak kreativitas. Bagi Satjipto Rahardjo, teori bukanlah harga mati, karena sejarah perkembangan ilmu pengetahuan telah membuktikan akan hal itu semua dapat ditelusuri sejak jaman Yunani hingga masa di era Postmodernis. Dengan demikian patut dicatat bahwa ilmu hukum selalu berada pada suatu pijakan yang sangat labil dan atau selalu berubah (*the changing frontier of science*) dan ini pula yang disebutnya dengan "*the state of the arts in science*". Oleh karena itu kalimat yang senantiasa muncul adalah hukum selalu mengalami referendum'.

Bagi Satjipto Raharjo, berpikir teoretis bagi para ilmuwan hukum adalah mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu gagasan beliau lebih kepada bagaimana para ilmuwan hendaknya mengembangkan semangat untuk tetap menjaga cara berpikir yang demikian itu, karena melalui jalur tersebut akan membawa kita semua sampai kepada apa yang disebutnya dengan "*The Formation of Theory*" (membangun teori). Teori menurutnya adalah, *Giving name-explanation, given new meaning*. Para ilmuwan hukum seharusnya mencoba berpikir kearah sana. Dan semua ilmuwan sangat terbuka/diundang untuk memasuki wilayah ini.

Teori pada dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana orang atau sebuah komunitas memandang apa yang disebut hukum itu, artinya apa yang sedang terjadi atau perubahan yang tengah terjadi dimana komunitas itu hidup sangat berpengaruh terhadap cara pandangnya tentang hukum. Misalnya saja lahirnya pemikiran positivistic dalam ilmu hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan filsafat positivistic yang saat itu tengah "*booming*". Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan tentang lahirnya sebuah teori dalam bagan sebagai berikut :

Theory ➡ The Discourse The Subject Law ➡ Komunitas Tertentu ➡ Bergantung Pada Sudut Pandangnya (paradigmatika)

Keniscayaan sebuah teori selanjutnya akan mengalami proses pengkritisan, yaitu terus menerus berada pada wilayah yang labil, selalu berada pada suatu wilayah yang keos. Artinya disini teori bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang terus berlangsung, dan kemudian selanjutnya akan lahir teori-teori baru sebagai wujud dari perubahan yang terus berlangsung tersebut. Teori baru ini menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya, akan memberikan tambahan ilmu, transformasi; bergerak, dan proses pemaknaan baru, dengan demikian struktur ilmu berubah secara total. Gambaran itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tambahan ilmu ➡ Transformasi Bergerak ➡ Pemaknaan ➡ Teori ➡ Teori Baru ➡ Struktur ilmu Berubah

D. Sebuah Kritik Terhadap konsep Hukum Modern saat ini

Satu hal yang cukup penting dari gagasan Satjipto Rahardjo, adalah kritiknya terhadap dominasi hukum modern, yang telah mengerang kecerdasan (berfikir) kebanyakan ilmuwan hukum di Indonesia. Sejak kemunculannya hukum modern, seluruh tatanan sosial yang ada mengalami perubahan luar biasa. Kemunculan hukum modern tidak terlepas dari munculnya negara modern. Negara bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat, dan pada saat yang sama kekuasaan negara menjadi sangat hegemonial, sehingga seluruh yang ada dalam lingkup kekuasaan negara harus diberi label negara, undang-undang negara, peradilan negara, polisi negara, hakim negara dan seterusnya. Bagi hukum ini merupakan sebuah puncak perkembangan yang ujungnya berakhir pada dogmatisme hukum, liberalisme, kapitalisme, formalisme dan kodifikasi.

Namun demikian Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa memasuki akhir abad 20 dan awal abad 21, nampak sebuah perubahan yang cukup penting, yaitu dimulainya perlawanan terhadap dominasi atau kekuasaan negara tersebut. Dalam ilmu, pandangan ini muncul dan diusung oleh para pemikir post-modernis, pada tataran yang dengan demikian sifat hegemonial dari negara perlahan-lahan dibatasi, dan mulai muncul pluralisme dalam masyarakat, negara tidak lagi absolute kekuasaannya. Muncullah apa yang disebut dengan kearifan-kearifan lokal, bahwa negara ternyata bukan satu-satunya kebenaran. Inilah yang digambarkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai gambaran transformasi hukum yang mengalami "*bifurcation*" (pencabangan) dari corak hukum yang bersifat formalisme, rasional dan bertumpu pada prosedur, namun di samping itu muncul pula ada pemikiran yang lebih mengedepankan *substansial justice*, sebagaimana dijelaskan, "Disinilah hukum modern berada di persimpangan sebab antara keadilan sudah diputuskan dan hukum sudah diterapkan terdapat perbedaan yang sangat besar. Wilayah keadilan tidak persis sama dengan wilayah hukum positif. Keadaan yang gawat tersebut tampil dengan menyolok pada waktu kita berbicara tentang "supremasi hukum". Apakah yang kita maksud? Supremasi keadilan atau supremasi undang-undang? Keadaan persimpangan tersebut juga memunculkan pengertian-pengertian seperti "formal justice" atau "legal justice" di satu pihak dan "*substansial justice*" di pihak lain. Gambaran berikut ini mengilustrasikan pemikiran di atas.

Natural Law- Hukum Modern ➡ Bifurcation ➡ Negara Modern ➡ Industrilisme
➡ Liberalisme Kapitalisme dll ➡ Keadilan Substantial Justic ➡ Formal- Justice

Inilah sebuah sketsa singkat pemikiran seorang yang selalu berada di jalan ilmu, upaya dan semangat yang dikembangkan dengan terus berusaha mencermati perubahan yang terjadi, khususnya di Indonesia, gagasan Satjipto Rahardjo tidak saja memperkaya khasanah pengetahuan hukum tetapi lebih dari itu memberikan sebuah keteladanan bahwa kewajiban bagi seorang ilmuwan adalah selalu bersikap rendah hati dan terbuka, serta memiliki semangat untuk senantiasa berada pada jalur pencarian, pembebasan dan pencerahan. Itulah pesan yang merupakan hakekat dari apa yang disebutnya "pemikiran hukum yang progresif, jika penulis selaraskan dengan menyitir Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 29 Oktober 2009 yang disampaikan Garuda Wiko "Penegakan Hukum, Pembaharuan Hukum dan Rancang Bangun Hukum Progresif" pada bagian penutup beliau menyatakan: "Dibagian akhir pidato pengukuhan ini, saya sampaikan bahwa rancang bangun hukum progresif yang saya sampaikan adalah upaya *teoritik* dan *tentatif* untuk menuliskan "wajah" hukum progresif yang diperkenalkan Prof Satjipto Rahardjo. Dalam beberapa artikel dan tulisan yang menanggapi gagasan hukum progresif, penulisnya seringkali bertanya dan mencari-cari definisi hukum ptogresif itu, tetapi tidak menemukannya secara "gamblang" Saya juga pada mulanya "penasaran" dengan cara pengungkapan

gagasan yang dipilih Prof Tjip (demikian biasanya beliau disapa). Akan tetapi ketika beliau mengungkapkan pada suatu pertemuan bahwa gagasannya ini adalah suatu eksemplar yang masih terbuka, mengertilah saya akan "kearifan" Prof Tjip dalam membuka dialog teoritik yang egaliter, jauh dari kesan dominasi hegemonik.⁷

Kemudian selanjutnya Garuda Wiko menyatakan: "Upaya saya untuk menelisik rancang bangun hukum progresif, seperti uraian sejak awal pidato ini, juga didorong oleh situasi dimana hukum seringkali menyajikan atraksi teoritik yang meletupkan kekecewaan rakyat. Upaya menghadirkan ideal kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan tujuan hukum nampaknya membutuhkan perubahan radikal baik pada aras paradigmatis, teoritik maupun praksis. Mudah-mudahan tawaran model hukum progresif dengan segala elemen dan kisi-kisinya penyusunnya, dapat memberikan sumbangan pada perubahan yang hendak kita susun sebagai rencana aksi kedepan."⁸

Pernyataan itu mengelitik pemikiran penulis, bahwa perlunya perubahan paradigmatis yang radikal, teoritik dan praksis, dan paparan ini menawarkan sebuah konsep paradigmatis yaitu rekonstruksi positivism yang berbasiskan spiritualisme sekaligus kritis berdasarkan konsep "thawaf" penulis sebut paradigma "thawaf" dan "gilir balik"⁹

E. Pengertian Hukum "berbanding lurus" dengan Paradigma yang dianut.

Mengacu pada paparan di atas, maka para penstudi hukum ketika membaca beberapa literatur utamanya yang terkait dengan Ilmu Hukum seharusnya memahami paradigma pemikiran hukum yang melatar belakangi pemikiran pencetusnya, mengapa. karena dari paradigma itu kita akan temukan beberapa definisi/pengertian tentang "hukum" itu. Artinya pengertian hukum itu ternyata berkaitan erat dengan paradigma yang dipakai oleh pemikir atau penstudi hukum tersebut.

Untuk melihat apa yang dimaksud dengan hukum, berikut akan diuraikan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan "hukum" dari beberapa aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang ada, sebab timbulnya perbedaan tentang sudut pandang orang tentang apa itu "hukum" salah satunya sangat dipengaruhi oleh aliran yang melatar belakanginya yang sesungguhnya berbanding lurus dengan pergeseran paradigma pemikiran yang berkembang saat pandangan itu dipaparkan.¹⁰

Aliran Sosiologis, Roscoe Pound, memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni:

1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi).
2. Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka).

Hukum bagi Roscoe Pound adalah sebagai "Realitas Sosial" dan negara didirikan demi kepentingan umum & hukum adalah sarana utamanya. Jhering: *Law is the sum of*

⁷ Garuda Wiko, "Penegakan Hukum, Pembaharuan Hukum dan Rancang Bangun Hukum Progresif", Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 29 Oktober 2009, halaman 22.

⁸ Garuda Wiko, Ibid, halaman 23

⁹ Sebuah Term dari kearifan lokal masyarakat Dayak Kal-Bar untuk menyebut kebiasaan "ladang berpindah", dengan menyebutnya "gilir balik" mengikuti ekosistem yang didapatkan dari alam atau sunatullah, dan putaran itu mengikuti se arah jarum jam berdasarkan konsep delapan penjuru angin.

¹⁰ Disarikan dari Ahmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), UNHAS, 2008

the condition of social life in the widest sense of the term, as secured by the power of the states through the means of external compulsion (Hukum adalah sejumlah kondisi kehidupan sosial dalam arti luas, yang dijamin oleh kekuasaan negara melalui cara paksaan yang bersifat eksternal). Bellefroid: *Stelling recht is een ordening van het maatschappelijk leven, die voor een bepaalde gemeenschap geldt en op haar gezag is vastgesteld* (Hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu).

Aliran Realis Holmes : *The prophecies of what the court will do... are what I mean by the law* (apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum). Llewellyn: *What officials do about disputes is the law it self* (apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu sendiri). Salmond: Hukum dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Dengan perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan.

Aliran Antropologi, Schapera: *Law is any rule of conduct likely to be enforced by the courts* (hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan). Gluckman: *Law is the whole reservoir of rules on which judges draw for their decisions* (hukum adalah keseluruhan gudang-aturan di atas mana para hakim mendasarkan putusannya). Bohannon: *Law is that body of binding obligations which has been reinstitutionalised within the legal institution* (hukum adalah merupakan himpunan kewajiban-kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum).

Aliran Historis, Karl Von Savigny : *All law is originally formed by custom and popular feeling, that is, by silently operating forces. Law is rooted in a people's history: the roots are fed by the consciousness, the faith and the customs of the people* (Keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga negara.

Aliran Hukum Alam, Aristoteles: Hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Thomas Aquinas: Hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia dirangsang untuk bertindak atau dikekang untuk tidak bertindak. Jhon Locke: Hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang. Emmanuel Kant: Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan hukum-hukum tentang kemerdekaan.

Aliran Positivis, Jhon Austin: Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi. Blackstone: Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasi, untuk ditaati. Hans Kelsen: Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah-kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana pandangan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dapat mengantarkan para penstudi hukum mewujudkan ilmu hukum

menjadi sebenarnya ilmu yang memiliki paradigma yang khas dan unik sehingga sebuah ilmu yang memiliki pijakan yang kuat dengan teori yang membumi (*grounded theory*) dan berbasiskan ke-Indonesiaan, bukan tranplansi teori yang "*copy paste*" dari luar.

F. Paradigma Positivisme dari Jhon Austin "membelenggu" Pemikiran Hukum.

Untuk memahami ini secara holistik harus digunakan pendekatan suatu disiplin ilmu, yaitu sejarah hukum, memang disadari bersama, bahwa sejarah hukum sebagai disiplin ilmu yang tergolong masih muda dibanding dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya yang terlebih dahulu muncul kepermukaan.

Bahkan dibanding dengan disiplin lain, ilmu hukum masih menjadi perdebatan dan perkembangan untuk mengukuhkan diri sebagai ilmu sebenarnya ilmu dan ada pendapat yang menyatakan bahwa induk dari segala macam ilmu pengetahuan adalah Filsafat merupakan argumen yang hampir diterima oleh semua kalangan. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan yang erat antara ilmu pengetahuan tertentu dengan filsafat tertentu, seperti filsafat hukum yang melahirkan ilmu hukum dan seterusnya. Filsafat hukum adalah refleksi teoretis (intelektual) tentang hukum yang paling tua, dan dapat dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoretis tentang hukum¹¹.

Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan (memusatkan) refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. Sebagai refleksi kefilsafatan, filsafat hukum tidak ditujukan untuk mempersoalkan hukum positif¹² tertentu, melainkan merefleksi hukum dalam keumumannya atau hukum sebagai demikian (*law as such*). Filsafat hukum berusaha mengungkapkan hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang mampu dijangkau oleh akal budi manusia¹³.

Bila merujuk pada sejarah pemikiran barat, seperti disebutkan oleh **Scheltens**¹⁴ filsafat merupakan bentuk tertua dari pemikiran rasional yang bersifat pengertian dan dapat mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Boleh dikatakan meliputi seluruh daerah pemikiran manusia, yang merupakan keseluruhan yang hampir-hampir tidak dibedakan. Pada perkembangan berbagai pengetahuan menyadari obyek dan metodenya sendiri, bahkan mengabsolutkan diri, yang lambat laun memisahkan diri dari filsafat. Lebih lanjut **Scheltens** menyebutkan bahwa para ilmuwan berputus arang dengan filsafat, menganggap filsafat sama sekali tidak diperlukan, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terpukau oleh keberhasilan metodenya sendiri dan arena kejelasan serta ketetapan lapangan telaah sendiri, orang lalu menghapus filsafat, dengan keyakinan bahwa mulai sekarang hasil-hasil berbagai ilmu pengetahuan pasti dapat menggantikan dan mengabaikan filsafat.

Kecenderungan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, mendapat dukungan dari gagasan tiga tahap **August Comte**.¹⁵ Menurutnya sejarah pemikiran manusia berevolusi dalam tiga tahap; tahap teologis (mistis) dimana manusia memecahkan berbagai

¹¹ Lili Rasjidi, dalam Bernard Arif Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan lmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia), Mandar Maju Bandung, 2000, hlm.119

¹² Hukum positif adalah ialah terjemahan dari *ius positum* dalam bahasa latin, secara harfiah berarti hukum yang ditetapkan (*gesteld recht*). Jadi, hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia, karena itu dalam ungkapan kuno disebut *stellig recht*. Lihat J.J. H. Bruggink, Alih bahasa Arif Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 142.

¹³ J.J. H. Bruggink, Ibid halaman 142

¹⁴ Scheltens, dalam Ridwan, Pengaruh Positivisme dalam Pemikiran Hukum (Studi Kritis atas Aliran Legalisme-Positivisme Hukum), Jurnal Magister Hukum, Vol.2 No.1 Februari 2000, hlm. 41

¹⁵ Ridwan, Ibid, hlm.42

persoalan dengan meminta bantuan kepada Tuhan atau dewa-dewa, yang tidak terjangkau oleh panca indera; tahap falsafati dimana pada tahap ini hakekat benda-benda merupakan keterangan terakhir dari semua; dan tahap positivis, tahap dimana dunia fakta yang dapat diamati dengan panca indera merupakan satu-satunya obyek pengetahuan manusia. Pada tahap terakhir inilah dunia Tuhan dan dunia filsafat telah ditinggalkan. Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk membahas berbagai persoalan tersebut, hanya untuk mencari jawaban bagaimana pengaruh positivisme dalam pemikiran hukum khususnya telaah terhadap positivisme analitis John Austin yang saat ini masih membelenggu pemikiran hukum di Indonesia.

Filsafat hukum mencari hakekat dari pada hukum, yang menyelidiki kaedah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai¹⁶. Dimana ilmu pengetahuan hukum berakhir, disanalisa mulai filsafat hukum; ia mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam ilmu pengetahuan¹⁷.

Bicara mengenai aliran positivisme, bahwa aliran ini sama tuanya dengan filsafat. Namun baru berkembang pesat pada abad ke 19 tatkala empirisme mendominasi pemikiran. Positivisme lahir dan berkembang di bawah naungan empirisme¹⁸. Artinya antara empirisme dan positivisme tidak dapat dipisahkan.

Positivisme adalah salah satu aliran dalam filsafat (teori) hukum yang beranggapan, bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat¹⁹.

Di dalam aliran positivisme hukum dikenal dua sub aliran yaitu : Aliran hukum yang analisis, pendasarnya adalah **John Austin** Aliran hukum positif yang murni, dipelopori oleh **Hans Kelsen**. Dalam paparan ini sebagaimana dinyatakan terdahulu, memfokuskan pada aliran hukum positif yang analitis oleh John Austin. Positivisme yang dirintis John Austin, yang diberi nama *Analytical Jurisprudence*, dekat sekali dengan mazhab hukum umum. Austin menggunakan metode analisa saja. Melalui analisa sistem-sistem hukum tertentu Austin ingin sampai pada suatu ide umum tentang hukum.

Berdasarkan metodenya yang empiris belaka, Austin sampai pada pengertian tentang Negara, yang menurutnya berlaku secara mutlak. Negara dipandang sebagai kenyataan yang diterima begitu saja oleh orang-orang dalam wilayah tertentu. Negara-negara timbul dan dipertahankan, oleh sebab kebanyakan bawahan mempunyai kebiasaan mentaati pemerintah. Bila kebiasaan itu berhenti maka sudah tidak terdapat negara lagi. Terdapat bermacam-macam alasan untuk mentaati pemerintah. Ada orang yang mentaati oleh sebab mereka berpegang teguh pada prasangka bahwa pemerintah selalu harus ditaati. Sementara alasan lain karena takut akan kekacauan, bila negara dirombak. Semuanya ini dipastikan dalam pengalaman. Nilai-nilainya tidak dipersoalkan. Dapat dipastikan juga bahwa yang berkuasa adalah satu-satunya sumber hukum.

Di atas yang berkuasa hukum tidak ditemukan. Diungkapkan oleh Austin bahwa tiap-tiap Undang-undang positif ditentukan secara langsung atau secara tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota dari suatu masyarakat politik yang berdaulat, dalam mana pembentuk hukum adalah yang tertinggi. Dengan ketentuan ini Austin tidak menyangkal adanya norma-norma hukum ilahi, norma-norma moral dan juga hukum internasional.

¹⁶ Soetikno, dalam Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.1

¹⁷ Lili Rasjidi, ibid, hlm.3

¹⁸ Muh. Bagir Shadr, dikutip oleh Ridwan, Op cit. hlm. 56

¹⁹ Achmad Roestandi, Responsi Filsafat Hukum. Armico-Bandung, 1992. hlm 80

Dipastikannya saja, bahwa semua prinsip tersebut tidak mampu untuk meneguhkan atau meniadakan hukum yang berlaku dalam suatu negara²⁰.

Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai “*a command of the Lawgiver*” (perintah dari pembentuk Undang-undang atau penguasa), yaitu : suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*close logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik buruk.

Selanjutnya **John Austin** membagi hukum itu atas :

1. Hukum ciptaan Tuhan, dan
2. Hukum yang dibuat oleh manusia, yang terdiri dari:
 - a. hukum dalam arti yang sebenarnya yaitu yang disebut juga sebagai hukum positif, terdiri dari: - hukum yang dibuat oleh penguasa, seperti Undang undang, Peraturan pemerintah dan lain-lain. - hukum yang disusun atau dibuat oleh rakyat secara individual, yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Contohnya: hak wali terhadap orang yang berada dibawah perwalian, hak kurator terhadap badan/orang dalam curatele.
 - b. hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Jenis hukum ini tidak dibuat atau ditetapkan oleh penguasa/badan berdaulat yang berwenang. Contohnya: ketentuan-ketentuan yang dibuat perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu dalam bidang keolahragaan, mahasiswa, komunitas masyarakat adat dan sebagainya.

Terdapat empat unsur penting menurut John Austin untuk dinamakan sebagai hukum, yaitu: a. Perintah, b. Sanksi, c. Kewajiban, d. kedaulatan. Adapun keempat unsur tersebut kaitannya satu dengan yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut: Unsur perintah ini berarti bahwa satu pihak menghendaki agar orang lain melakukan kehendaknya, pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan jika perintah ini tidak dijalankan atau ditaati. Perintah itu merupakan pembedaan kewajiban terhadap yang diperintah, dan yang terakhir ini hanya dapat terlaksana jika yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat. Dan yang memiliki kedaulatan itu dapat berupa seseorang atau sekelompok orang (*a sovereign person, or a sovereign body of persons*).

Buah pikir **John Austin** ini tertuang dalam kedua bukunya yang terkenal, yaitu: *The Province of Jurisprudence Determined* dan *Lecture on Jurisprudence*²¹. Aliran positivisme hukum yang analitis yang dipelopori oleh **John Austin** tersebut pada sekitar abad ke-19 dan dalam bagian pertama abad ke-20, tampaknya menguasai pemikiran hukum di Barat, yang kemudian juga di dasarkan pada filsafat Yunani. Dimana cukup jelas peranan aliran positivisme terutama yang analitis tersebut bahwa penerapan hukumnya dilakukan oleh pihak penguasa. Dengan adanya identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negarapun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara.

Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan

²⁰ Dikutip dari Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1997. hlm. 137-138

²¹ Dikutip dari: Lili Rasjid; Op cit; hlm. 42-44

segala sesuatu yang telah ditetapkan. Austin adalah tokoh pertama yang memisahkan secara tegas antara hukum positif (*Ius Contitutum*) dengan hukum yang dicita-citakan, (*Ius Contituendum*) dengan kata lain ia memisahkan secara tegas antara hukum dengan moral dan agama. Ilmu hukum hanya membahas hukum positif saja, tetapi tidak membahas hubungan antara hukum positif dengan moral dan agama. Tanpa memperdulikan baik atau buruknya hukum itu, diterima atau tidak oleh masyarakat.

Hakekat dari semua hukum adalah perintah (*command*), yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Semua hukum positif adalah perintah. Perintah dari yang berdaulat atau *command of sovereign* atau *command of law-giver*.

Pemegang kedaulatan tidak terikat baik oleh peraturan yang dibuatnya sendiri, maupun oleh asas-asas yang berasal dari atas (moral dan agama). Masalah kedaulatan yang merupakan salah satu unsur dari hukum positif adalah bersifat pra-legal (bukan urusan hukum, tetapi urusan politik atau sosiologi) dan hendaknya dianggap sebagai sesuatu yang telah ada dalam kenyataannya²²

Namun disamping kebaikan-kebaikan yang ada dan dikemukakan oleh Aliran Positivisme yang analitis tersebut, sudah barang tentu terdapat beberapa kelemahan yakni tentang ajaran-ajarannya yang kurang sesuai dan bertentangan dengan berbagai pihak terutama masyarakatnya yang hidup dan berdiam dalam masa tersebut. Apabila dilihat secara mendasar, maka kelemahan yang sangat pokok dalam Aliran Positivisme yang Analitis tersebut adalah justru dengan adanya identifikasi Hukum dan Undang-undang tersebut. Karena jika dilihat dengan nyata, bahwa betapapun buruknya peraturan dan ketentuan yang ada, asalkan peraturan dan ketentuan tersebut telah menjadi Undang-undang yang harus diterapkan dalam masyarakat dan juga secara langsung hakim akan menjadi terikat pada Undang-undang yang telah ditetapkan tersebut.

Peraturan perundang-undangan juga memiliki kelemahan/kekurangan, seperti yang dikemukakan oleh **Bagir Manan** bahwa: (1) Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikannya dengan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tatacara tertentu sementara masyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Akibatnya terjadi jurang pemisah antara peraturan perundang-undangan dengan masyarakat. (2). Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum²³

Dalam kaitannya dengan identifikasi Hukum dan Undang-undang yang demikian kuatnya dilakukan oleh pihak penguasa dan pemerintah, kemudian pada akhirnya dapat saja terhadap Ketentuan Hukum dan Undang-undang tersebut disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang akan menguasai negara secara mutlak dan absolut sesuai dengan keinginannya yang ada pada masa itu. Dimana kemudian pihak penguasa dalam negara dapat menggunakan ketentuan hukum dan Undang-undang untuk memberikan legitimasi kepada tindakan-tindakan mereka yang sebenarnya, dimana menurut perasaan hukum masyarakat tindakan tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak bermoral dan kriminal serta menjadi kejam. Sehingga kemudian semua-semua ketentuan dan kehendak yang dikeluarkan oleh perintah pribadi penguasa dapat dijadikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakatnya, dan kemudian individu-individu yang ada dalam lingkup masyarakat akan berada pada posisi yang dilematis, dimana disatu pihak hukum dan ketentuan dari penguasa tidak dapat dipertahankan

²² Dikutip dari Achmad Roestandi, Op cit. hlm. 81

²³ Bagir Manan. Bagir Manan Dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1993 Halaman 8

secara konsekuen, apabila ketentuan hukum dan perundang-undangan itu sendiri digunakan sebagai alat untuk menindas dari ketidakadilan.

Pendapat yang menyatakan bahwa jika undang-undang telah tersedia, terkodifikasi atau fragmentaris maka sudahlah cukup sarana perundang-undangan untuk diandalkan buat menindak setiap pelanggaran ataupun untuk melindungi kepentingan dalam masyarakat. Kurang diperhatikan dan disadari, bahwa pada aturan hukum yang dianggap mendekati keadilan harus dipenuhi syarat bahwa hukum harus mampu mencerminkan tuntutan hati nurani masyarakat khususnya perasaan keadilan mereka.

Telah terjadi pergeseran prinsip dan konsepsi dari negara hukum menjadi negara undang-undang yang meletakkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sebagai ukuran kebenaran. Di dalam undang-undang seperti ini setiap tindakan pemerintah yang tidak adil diberi pembenaran dengan perbuatan undang-undang melalui penggunaan atribusi kewenangan sehingga hukum ditempatkan sebagai alat justifikasi dengan watak positivist – instrumentalistik.

Dalam ajaran Austin dikatakan bahwa hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Dengan sifat tetap dan tertutup dari hukum tersebut, maka hukum pada masa itu tidak menerima perkembangan dari pihak manapun sekalipun perkembangan tersebut berasal dari dalam masyarakat lingkup negaranya, akibatnya hukum tidak mengenal dispensasi dan penyimpangan yang dianggap oleh masyarakat setempat tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa setiap hukum harus selalu dipatuhi, oleh karena kadang-kadang hukum pun memberikan dispensasi bagi terjadinya penyimpangan-penyimpangan sepanjang ketentuan tersebut tidak atau bukan merupakan suatu kejahatan atau delik. Terutama dalam ketentuan hukum yang bersifat privat (terutama dalam hal pembuatan perjanjian diantara pihak-pihak), bahwa ketentuan hukum yang dibuat biasanya tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan dan kepatutan.

Dengan demikian, masalah utamanya adalah bagaimana mengusahakan agar warga-warga masyarakat secara maksimal dapat mematuhi ketentuan hukum tanpa menerapkan paksaan atau kekerasan. Jadi secara sederhana dapat dikatakan, bahwa yang harus diusahakan adalah peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis, baik, kewibawaan petugas dan fasilitas pendukung yang cukup, walaupun secara nyata tidaklah dapat dikatakan sebagai hal yang sederhana.

Terhadap ajaran dari Austin yang menyatakan tentang hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, yakni hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, bahwa dari ketentuan tersebut jelas terlihat, meskipun hukum disini dapat saja dibuat atau ditetapkan bukan oleh penguasa/badan berdaulat yang berwenang, akan tetapi tetap keberadaan dari hukum tersebut pada akhirnya tidak diakui oleh pihak penguasa. Karena konsepnya jelas bahwa hukum tersebut diklasifikasikan sebagai hukum dalam arti yang tidak sebenarnya. Dengan demikian, tetap saja ajaran dari Austin tersebut tidak dapat memberikan tempat bagi masyarakat, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dianut sehingga kemungkinan terbentuk menjadi suatu aturan yang lebih dihormati dalam masyarakat yang ada menjadi tidak berdaya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dari kehidupan bersama manusia yang kemudian mengadakan hubungan dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan tercipta hukum.

Baik negara maupun hukum timbul dari kehidupan manusia karena keinginan hati dari masing-masing individu untuk memperoleh ketertiban. Akan tetapi konsep yang seperti ini tidak tampak pada ajaran positivisme yang analitis. Dengan adanya hukum dalam arti yang absolut dan mutlak dari konsekuensi aliran positivisme yang analitik ini,

karena makna dari hukum yang dibuat oleh manusia tersebut akan menjadi suatu bentuk dari perintah dan ketentuan yang mutlak yang berasal dari penguasa menjadi suatu keharusan bagi masing-masing individu untuk menjalankannya dengan suka atau tidak suka ataupun mau dan tidak mau. Masyarakat diwajibkan untuk menjalankan dengan sepenuh hati sehingga kemungkinan untuk terbentuknya suatu rezim penguasa yang otoriter dari negara yang menganut ajaran ini akan tercipta dengan mudah sekali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aliran hukum positif yang analitis mempunyai suatu kekuatan yakni aliran ini banyak dianut oleh para pemikir hukum di Barat di abad ke 19 dan awal abad ke-20. keberhasilan dari aliran ini terlihat pada bentuk kepastian hukum yang benar-benar terjamin pada masing-masing negara yang menganutnya. Akan tetapi dari ajaran tersebut yang telah berkembang pada konsep para pemikir di Barat, ajaran-ajaran dari hukum positif yang analitis ini juga mempunyai banyak kelemahan di sana-sini.

Adapun titik kelemahannya yang pokok, bahwa aliran hukum positif yang analitis itu cenderung membuat suatu kekuatan dari penguasa untuk membentuk suatu pemerintahan absolut. Hal ini disebabkan karena adanya empat unsur penting dari ajaran John Austin untuk dapat dinamakan hukum, yang di dalamnya terdiri dari perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Sehingga dengan empat unsur penting dari hukum tersebut membuat para penguasa yang membentuk ketentuan hukum dan undang-undang menjadi suatu keputusan yang mutlak harus dilaksanakan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memberikan masukan-masukan yang berkembang dan tumbuh dari dalam masyarakatnya sendiri. Keempat unsur inilah membelenggu pemikiran hukum, sehingga tujuan hukum sebagai keadilan dan kemanfaatan tidak muncul, karena hanya kepastian hukum yang ditonjolkan.

Semua ketentuan hukum dan undang-undang yang terbentuk menjadi suatu perintah dan kewajiban yang harus dijalankan dan ditaati, kemudian mempunyai sanksi yang mengikat para pelaksana hukum menjadi secara langsung terikat karenanya. Kemudian yang terakhir bahwa semua pembuat ketentuan hukum dan undang-undang yang dalam hal ini adalah pihak penguasa hanya dapat terlaksana jika pihak penguasa sebagai pihak yang memerintah tersebut merupakan pihak yang berdaulat. Dari ketentuan tersebut dapat dianalisa bahwa pihak penguasa ataupun pihak pemerintah yang berdaulat sebagai pembentuk ketentuan hukum dan undang-undang sebetulnya tidak perlu dipertegas lagi, karena jelas suatu negara yang telah memiliki pemerintahan sendiri, rakyat sendiri dan wilayah sendiri tentunya sudah merupakan sesuatu (dalam hal ini dapat disebut Negara) yang dianggap berdaulat atau memiliki kedaulatan sendiri, dan juga sebenarnya dengan telah adanya kedaulatan yang merupakan bagian dari suatu negara yang tidak dapat dipisahkan, maka kedaulatan sudah merupakan bagian dari bentuk dan sistem politik pemerintahan dalam negara itu sendiri, lalu bagaimana hukum progresif menjadi stressing pemikiran hukum atau menjadi paradigma kritis? Sebuah pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya secara akademis sebagai alternatif pemikiran hukum di Indonesia.

G. Bagaimana mengantarkan Hukum Progresif menjadi sebuah Paradigma Kritis?

Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh ilmu hukum terkait dengan hakekat pengetahuan apa yang dikaji (ontologis), bagaimana cara untuk mengeksplorasi suatu pengetahuan yang benar (epistemologis), dan untuk apa pengetahuan dipergunakan (aksiologis).

Pada dasarnya semua pengetahuan apakah seni, ilmu atau pengetahuan apa saja mempunyai tiga landasan itu, yang berbeda adalah materi perwujudannya serta sejauh mana landan-landasan dari tiga landasan tersebut dikembangkan dan dilaksanakan.

Ternyata tidak dapat dihindari bahwa dalam sejarah perjalanannya ilmu hukum mengalami pasang surut dan hal tergantung pada konteks dan rentang waktu dimana ilmu hukum tersebut berkembang.

Supaya ilmu hukum dapat berkualitas sebagai sebuah disiplin ilmu, maka tidak bisa dihindari terhadap ilmu hukum masuk ke siklus terbentuknya ilmu yang telah ada. Dengan demikian untuk menjadikan ilmu hukum sebagai sebuah ilmu yang eksis, sebagaimana dinyatakan oleh Prof Tjip, bahwa ilmu adalah untuk kenyataan, bukan sebaliknya. Apabila kenyataan adalah ilmu, maka kenyataan itu akan dimanipulasi sehingga cocok dengan ilmu dan teori yang ada.

Ilmu senantiasa merupakan proses pencarian terhadap kebenaran. Berangkat dari uraian di atas, maka tidaklah mengherankan bahwa garis depan ilmu selalu berubah-ubah dan bergeser²⁴. Kebenaran Kebenaran ilmiah tidaklah bersifat mutlak (absolut), berubah-ubah dan tidak abadi. Ia bersifat nisbi, sementara dan kira-kira²⁵. Namun kebanyakan ilmuwan mengakui adanya kebenaran mutlak yang merupakan otoritas dari Al-khaliq. Kebenaran mutlak merupakan kebenaran tunggal yang sering disebut sebagai kebenaran hakiki yang substantif dan esensial, yang tampil dalam bentuk keteraturan alam semesta.

Kebenaran hasil olah pikir manusia bersifat relatif, namun dimungkinkan manusia dapat menjangkau lebih luas lagi samudra kebenaran yang dibentangkan melalui kekuasaan Allah baik yang tersurat dalam Al-kitab atau Al-Qur'an dan ciptaan-Nya yang tergelar di alam semesta maupun yang melalui kreasi potensi manusia, berupa akal, budi dan indera. Dimungkinkan manusia akan mampu meraih kebenaran yang lebih tinggi dalam wujud kebenaran transendental yang vertikal.

Menurut **Liek Wilardjo** teori itu, dan dengan sendirinya juga konsep yang terkandung di dalamnya, akan diterima sebagai secara ilmiah benar dan baik dalam pengertian bahwa ia bermanfaat dalam menyingkapkan beberapa butiran-butiran kebenaran yang tersembunyi dalam perbendaharaan alam, walaupun hanya berarti penegasan-penegasan yang dapat diuji secara empiris pada umumnya²⁶.

Dalam bahasa **Thomas Khun**, ilmu dari waktu ke waktu mengalami revolusi dimulai dengan perubahan dalam paradigma yang digunakan. Salah satu peristiwa besar dalam dunia ilmu pengetahuan adalah berakhirnya era Newton melalui suatu revolusi dan untuk waktu yang lama diterima sebagai keunggulan ilmu pengetahuan yang mampu mengakhiri keterbatasannya untuk menjelaskan dan memetakan alam. Sejak fisika dan paradigma Newton yang baru itu, maka seluruh alam dianggap telah dapat dilihat dalam suatu susunan yang tertib. Tetapi era Newton bukan akhir segalanya, alam masih menyimpan kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan atau dijangkau oleh teori Newton²⁷.

Kini garis depan ilmu telah berubah. Era **Newton** diganti teori Relativitas Einstein yang lebih mampu mengamati fenomena alam yang kompleks. Menurut **Phillip Clayton**²⁸ era sains telah berubah, yakni telah menerima keterbatasan-keterbatasan dalam prediksi (mekanika kuantum), aksiomatisasi, determinisme, atomisme maupun pemahaman berdasar hukum atas perilaku manusia. Teori Emergeni kini menyarankan bahwa alam terbuka ke atas. Hakikat kesadaran manusia terbuka ke atas yang menerima getaran-getaran keabadian transendental, memberi model yang sangat kuat bagi integrasi

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Merintis Visi Program Doktor Hukum UNDIP*, Semarang, 2003, hal 8

²⁵ Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990, hal 272.

²⁶ Liek Wilardjo, *Ibid*, hal 272.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *op Cit*, hal 9.

²⁸ Philip Clayton adalah seorang guru besar dan ketua Jurusan Filsafat California State University, Sonoma, USA : Principle Investigator, Science and the Spiritual Quees Project, artikelnya diberi judul Membaca Tuhan dalam Keteraturan Alam, Repleksi Ilmiah dan Religius, UGM, Yogyakarta, 2003, hal 10.

antara jiwa dan roh. Sebuah gambaran yang persis sama dengan apa yang diajarkan oleh agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam.

Di sini tampak menunjukkan bahwa ilmu pada hakikatnya satu (*the unity of Knowledge*) yang dikonsepkan dalam istilah "*Consilience*". Pergantian paradigma dalam ilmu fisika dari mekanik ke teori kuantum yang lebih kompleks, memberi pelajaran sangat berharga kepada studi hukum atau ilmu hukum.

Memahami hukum tidak cukup hanya menggunakan pendekatan positivis-analitis, dilihat secara linier dan mekanik. dengan perlengkapan peraturan dan logika, kebenaran tentang kompleksitas hukum tidak dapat muncul. Hukum telah direduksi menjadi institusi normative yang sangat sederhana. Kebenaran antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain tidak (boleh) ditampilkan. Batas antara order dan disorder dilihat secara hitam putih²⁹. Demikian pula ketika kita menganalisis akar jejak teori dan penegakan hukum di Indonesia sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

Dalam kesimpulan tulisannya **Philip Calyton** mengatakan bahwa kini kita mulai melihat suatu renaissance, kebangkitan kembali metafisika (transendental), dari refleksi sistematis mengenai hakikat dan kreativitas Tuhan. Positivis boleh saja mengumandangkan bahwa metafisika (transendental) sudah mati, akan tetapi, rasanya kini justru positivisme logislah yang duluan mati. Sangat menarik perhatian bahwa era pemikir teisme dari Muslim, Yahudi dan Kristen kini kembali terlibat dalam eksplorasi yang sangat luas terhadap gagasan "hipotesis Tuhan"³⁰.

Dalam perkembangannya kemudian muncul gerakan pemikiran kritis yang post positivisme yang berupaya untuk melepaskan diri dan menggugat pemikiran positivis. Pemikiran semacam itu berangkat pada pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat formal, yang mementingkan peraturan, prosedur dan logik, tetapi lebih menekankan pada perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan (*the frontier changing of science*), yang memahami ilmu sebagai satu kesatuan (*the unity of knowledge*) yang tidak lepas dari fakta empirik dan realitas alam dan perilaku sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai yang menyertainya, seperti etik, moralitas dan nilai-nilai spiritual atau penulis sebut sinergisitas antara norma dan nomos atau dalam bahasa Al-Qur'an sinergisitas antara ayat kauliyah (dalil tertulis) dan ayat kanuiyah (dalil tak tertulis) yang ada pada alam raya dan pada diri manusia (QS 41 ayat 53, QS 51 ayat 20-21)³¹

H. Dekonstruksi Paradigma Positivisme

Dalam perkembangannya sejarah hukum, muncul aliran yang merupakan reaksi dari dominasi pemikiran rasionalisme yang dianggap mempunyai banyak kelemahan yang didasarkan pada pemikiran yang hanya terpaku pada nilai-nilai atau asumsi-asumsi yang bersifat khayal. Karena itu, akhirnya melahirkan **aliran sejarah (historis)** yang menginginkan suatu teori harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan atau fakta. Tokoh dari aliran sejarah ini diantaranya adalah **Von Savigny** yang menolak untuk mengagung-

²⁹ Satjipto Raharjo, *Op Cit*, hal 10.

³⁰ Philip Clayton, *Op Cit*, hal 10.

³¹ QS Fushilat (yang dijelaskan) (41) ayat 53: "Kami akanlihatkan kepada mereka dalil-dalil/tanda-tanda (kebesaran) Kami disegenap penjuru alam dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an itu benar. Tidak cukupkah (bagi kamu), bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu ? QS 51 Az Zariyat (angin Yang Menerbangkan) (51) ayat 20-21: "Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin, dan (juga) pada dirimu sendiri, Maka apakah kamu tidak memikirkan ?"

agungkan akal seseorang. Hukum, baginya tidak dibuat tapi tumbuh dan ditemukan dalam masyarakat.

Menurut **Von Savigny**, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau kebinasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Karena itu, Savigny mengeluarkan pendapatnya yang amat terkenal bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama masyarakat. Pendapat Savigny amat bertolak belakang dengan pandangan positivisme, sebab mereka berpendapat bahwa dalam membangun hukum maka studi terhadap sejarah atau bangsa mutlak diperlukan. Pendapat tersebut oleh Puchta dibenarkan dan dikembangkan dengan mengajarkan bahwa hukum suatu bangsa serikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan.

Teori hukum lain yang lahir dari proses dialetika antara tesis positivisme hukum dan antitesis aliran sejarah, yaitu *sociological juris-prudence* yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokoh aliran ini terkenal di antaranya adalah **Eugen Ehrlich** yang berpendapat bahwa hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tokoh lain yaitu **Roscoe Pound** yang mengeluarkan teori hukum adalah alat untuk merekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). **Roscoe Pound** juga mengajarkan supaya ilmu sosial didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum³².

Penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum, yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan pada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum. Dengan memperhatikan perihal efektivitas hukum, maka perhatian studi hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja. Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Hukum tidak dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji keahliannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas³³.

Bersamaan dengan itu, berkembang juga **aliran realisme hukum**. Menurut aliran ini, hukum itu adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Ciri-ciri ajaran realisme sebagaimana dikemukakan oleh **Karl. N. Llewellyn** adalah sebagai berikut: *pertama*, tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum, *kedua*, realisme adalah konsep hukum yang harus diuji tujuan dan akibat-akibatnya. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat dari pada hukum; *ketiga*, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan hukum yang seharusnya untuk tujuan-tujuan studi; *keempat*, realisme tidak percaya pada ketentuan dan konsepsi hukum sepanjang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang, dan *kelima* realisme menekankan evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya.³⁴

Pospositivis dapat dipahami sebagai mode pemikiran atau dapat juga merupakan tahapan dalam lintasan sejarah. pospositivis secara umum dapat dikatakan sebagai gugatan terhadap positivis yang bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal yang

³² Sutandyo Wigiyosoebroto, *Hukum dalam Ralitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Pemikiran kritis-Teoritik yang Mengiringi mengenai fungsinya*, Surabaya, 2003, hal 8.

³³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hal 83.

³⁴ Friedman dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.* Hal. 116.

telah mencapai status hegemonis di dunia. Kalau positivis melahirkan modernisme, maka post positivisme akan melahirkan pikiran post modernisme.

Era pospositivisme sering dipahami sebagai gejala berkembangnya pemikiran yang memberontak pada tatanan positivisme dengan indikasi bersifat anti rasionalisme. Dengan demikian, berarti telah peluang dan tempat berkembangnya pemikiran non rasional. Inilah yang oleh **Jacques Derrida** disebut sebagai *dekonstruksi*, yakni pembongkaran cara berpikir yang logis dan rasional. Dekonstruksi membongkar unsur-unsur kekuasaan yang muncul dalam kesadaran. Dekonstruksi dilakukan terhadap pemikiran-pemikiran yang dianggap dominan dan benar, karena yang dianggap benar selama ini, ternyata tidak membahagiakan manusia.

Dekonstruksi telah membongkar pospositivisme yang selama ini dalam bidang hukum dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat modern. konsepsi kebenaran hukum merupakan nilai yang teramat penting menunjukkan kecenderungan yang relatif dan kabur. Nilai kebenaran dipahami dengan menggunakan pandangan yang berbeda dan mengarah pada suatu pemahaman bahwa kebenaran itu ukurannya menurut persepsi pembuat hukum. Pembuat hukum didasarkan atas kemauan pihak penguasa yang ditopang kelompok politik mayoritas dengan dituangkan dalam bentuk undang-undang. Padahal, kehendak dan pandangan politik kelompok mayoritas belum tentu mencerminkan kebenaran.

Dalam bidang hukum publik, khususnya hukum ketatanegaraan, demokrasi dengan sistem perwakilan dianggap sebagai sistem yang terbaik dalam negara modern. namun dalam perkembangannya sudah mulai dipertanyakan. Mereka menganggap bahwa representasi amat penting bagi modernisasi, organisasi, struktur politik dan filsafat yang mendasarinya. Akan tetapi, representasi adalah asing dan berlawanan dengan apa yang dipandang bernilai menurut pola post modernisme.

Dalam alam pospositivisme, perspektif spiritual dengan segala aspeknya seperti keagamaan, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Karena itu, hukum modern dalam perkembangannya telah hilang unsur yang esensial yang berupa nilai transedental. Hal ini terjadi sebagai akibat cara berpikir yang didasari dari pandangan keduniaan yang diurus oleh kaisar dan keagamaan yang diserahkan pada tokoh agama (pendeta, rahib dan ulama). Cara berpikir seperti itu muncul bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Romawi dan berdirinya negara-negara bangsa di Eropa melalui perjanjian West Phalia tahun 1648 M yang dianggap sebagai awal kebangkitan Eropa, yang memunculkan etika protestan sebagai kekuatan yang mempengaruhi kapitalis Barat.

I. Corak Spiritualisme dan Perlunya Dialog Nilai

Corak spiritual dalam alam pospositivisme dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas. Agama, etika dan moralitas tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata yang dapat dilihat melalui doktrin-doktrin dan peribadatan, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Sebab krisis masyarakat barat yang dianggap sebagai kegagalan peradaban modern karena pemikiran modern telah memisahkan spiritualisme dengan segala aspeknya dalam satu kesatuan pembangunan peradaban yang dibangun.

Danah Zohar dan **Ian Marshall** dalam bukunya "*Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence*", mengkritisi kegagalan peradaban barat dengan mengenalkan berpikir spiritual (*spiritual tinkering*) dengan menggunakan pendekatan kecerdasan

spiritual (*spiritual quition*), yang akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (*ultime intelegen*), dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalisme (*existing rule*) dan transendental, sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekataai kebenaran yang hakiki (*the ultimate truth*). Pemikiran semacam itu sangat menarik untuk kajian hukum dalam rangka untuk menempatkan hukum pada hakikatnya dan menjadikan hukum dapat membahagiakaan

Manusia perlu *spiritual quotient* karena di masyarakat barat telah terjadi makna hidup di dunia modern (*the crisis of meaning*). Spiritual quiation merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. SQ dapat digunakan untuk membangkitkan potensi-potensi kemanusiaan yang terpendam, membuat diri manusia semakin kreatif dan mampu mengatasi problem-problem esensial. SQ juga merupakan petunjuk ketika manusia berada di antara *order* dan *chaos*, memberikan intuisi tentang makna dan nilai³⁵.

Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari keebenaran, makna atau nilai yang lebih dalam. Dengan demikian berpikir menjadi suatu infinite game. Ia tidak ingin diikat dan dibatasi patokan yang ada, tetapi ingin melampaui dan menembus situasi yang ada (transendental). Kecerdasan spiritual tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi kreatif dan membebaskan. Dalam kreativitasnya, ia mungkin bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (*rule breaking*) sekaligus membentuk yang baru (*rule making*). Kecerdasan spiritual sama sekali tidak menyingkirkan potensi intelegen dan emosi yang ada, tetapi meningkatkan kualitasnya, sehingga mencapai tingkat kecerdasan sempurna (*ultimate intelligence*)³⁶.

Penemuan SQ yang dilakukan melalui penelitian berbagai tempat, seperti di Meksiko dan Swedia menunjukkan bahwa spiritualisme dan perspektifnya menjadi alternatif mutakhir untuk menungkingkan manusia modern bisa keluar dari rasa keterasingan di tengah keramaian untuk menemukan jati diri sebagai manusia dengan pendekatan spiritual, yang di dalamnya ditemukan integrasi nilai secara substantif. Di sini menunjukkan bahwa temuan ilmiah tidak harus bersifat rasional dan logik, tetapi bisa juga sarat dengan nuansa nilai yang tidak dapat dijelaskan secara rasional tetapi dapat dirasakan melalui intuisi batin manusia. Perspektif spiritual menjadi penting dalam dunia ilmu atau pengembangan ilmu untuk menjadi ilmu lebih bermakna bagi kehidupan manusia.

Kecerdasan spiritual (SQ) merupakan terkini secara ilmiah sebagaimana dinyatakan di atas pertama kali digagas oleh **Dannah Zohar** dan **Ian Marshall**, masing-masing dari Harvard University dan Oxford University melalui riset yang sangat komprehensif. Pembuktian ilmiah tentang kecerdasan spiritual memang pertama kali dipaparkan Zohar dan Marshall dalam SQ, Spiritual Quotient (The Ultimate Intelligence, London, 2000), dua diantaranya adalah: Pertama, riset ahli psikologi/saraf Michael Persinger pada awal tahun 1990-an dan lebih mutakhir lagi tahun 1997 oleh ahli saraf **VS Ramachandran** dan timnya dari Calopornia University, yang menemukan eksistensi God Spot dalam otak manusia- telah *built in* sebagai pusat spiritual (spiritual center) yang terletak diantara jaringan saraf dan otak.

Sedangkan bukti kedua adalah riset ahli saraf Austria, **Wolf Singer** era 1990-an atas makalahnya : The Binding Problem, yang menunjukkan ada proses saraf dalam otak

³⁵ Danah Zohar dan Iaan Marshall, *Spiritual Intelligence, the Ultimate Intellegience*, Bloomsbury, Landon, 2000.

³⁶ Danah Zohar dan Ian Mashal dalam Satjipto Rahardjo, *Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual*, Kompas, 30, Desember 2002.

manusia yang terkonsentrasi pada usaha untuk menyatukan serta memberi makna dalam pengalaman hidup kita. Jaringan saraf yang literal "megikat" pengalaman kita secara bersama untuk "hidup lebih bermakna". Pada God Spot inilah sebenarnya manusia tertinggi (the ultimate meaning), namun ironisnya SQ atau Spiritual Quotient tersebut belum, bahkan tidak menjangkau nilai-nilai ketuhanan. Pembahasannya baru yang bersifat tataran biologi-psikologi, tidak mampu mengungkap hal yang bersifat trasendental yang mengakar, yang pada akhirnya kembali berakibat pada "kebuntuan".

Di Indonesia sendiri Ary Ginanjar Agustian memperkuat fenomena SQ yang perlahan (tapi pasti) menempati ruang di hati manusia, walau bukan seorang spiritualis sekalipun. Namun temuan "Got Spot" pada penemu barat baru sebatas hardware-nya saja (spiritual center pada otak manusia) belum ada software (isi dan kandungan)-nya. Lalu ia menawarkan ESQ adalah software dari God Spot untuk melakukan Spiritual Engineering sekaligus sebagai mekanisme penggabungan tiga kecerdasan manusia, yaitu EQ, IQ dan SQ dalam satu kesatuan yang integral dan trasendental³⁷.

Penulis menawarkan sebuah terobosan dengan menggunakan sinergisitas lima kecerdasan dalam konsep paradigma "Thawaf" dan "Gilir Balik", yaitu SQ, AQ, EQ, IQ dan CQ yang terkonsep pada makna tersirat dan tersurat dari Pancasila, yaitu Sila I adalah SQ, Sila II, AQ, Sila III, IQ, Sila IV EQ, dan Sila kelima CQ, penjelasan terhadap ini lihat paparan penulis pada bagian berikutnya, karena bagaimanapun Pancasila sudah dipilih menjadi *Recht Ide* bagi Indonesia, oleh karena itu ilmu hukum harus dibumikan selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, agar teori hukum dan politik hukum menemukan cetak biru yang ke-Indonesiaan, penulis sebut sebagai teori yang membumi (*Grounded Theory*), mengapa demikian karena ilmu hukum bukan ilmu yang bebas nilai tetapi sarat dengan nilai.

Menurut **Kenneth Boulding**, Ilmu itu sarat dengan nilai. Kebahagiaan yang amat besar dari keberhasilan masyarakat keilmuan dalam memajukan ilmu pengetahuan adalah berkat sistem nilainya, di mana suatu pengabdian yang impersonal kepada kebenaran dianggap sebagai nilai tertinggi, kepada siapa kebanggaan pribadi maupun kebanggaan nasional harus menundukan dirinya. **Edward Teller** menyebut, ciri utama dari ilmu "ialah bahwa ia menuntut disiplin mental yang besar, dan bahwa ia membawa kepada pencapaian intelektual yang akrab hubungannya dengan keserasian dan keindahan"³⁸

Mill dan **Brandt** dalam teori moralnya, mengatakan tindakan benar yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan pada lebih banyak orang³⁹. **Immanuel Kant** mengemukakan manusia berkewajiban melaksanakan moral imperatif, agar masing-masing bisa bertindak baik yang dilakukan karena kesadaran bukan pemaksaan⁴⁰. **A.I. Melden** mengatakan hak moral kebebasan individu mempunyai saling keterkaitan antar individu, hak atas kebaikan komunitas dibutuhkan, termasuk hak memberitahu produk Iptek yang merugikan komunitas. Ilmu diarahkan pada keutamaan dan kebaikan sosial dalam suatu komunitas. Kebaikan yang dimaksud bukan sekedar kebaikan fisik, melainkan kebaikan memberi kebahagiaan non fisik⁴¹.

Dalam perjalanan sejarah dan pengalaman empirik, sering dijumpai adanya pandangan bahwa kebenaran ilmu hanya untuk ilmu, bahkan lebih pragmatis lagi, yakni tergantung kepada berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ideologi dan politik, Kebenaran ilmu menjadi buta karena para ilmuwan penemunya tak beretika dan tak

³⁷ Ary Ginanjar Agustian *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*, Arga, Jakrata, cetakan kedua puluh lima, Januari 2006, halaman 44-45.

³⁸ Liek Wilardjo, *op cit*, hal 272.

³⁹ Michael Williams dalam Noeng Muhadjir, *ibid*, hal 16-17.

⁴⁰ *Ibid*, hal 279.

⁴¹ *Ibid*, hal 279.

bermoral, sehingga tidak heran kalau hasil temuannya digunakan untuk kepentingan yang tidak bertanggungjawab, ilmunya menjadi tidak bermanfaat dan mendatangkan bencana kemanusiaan, sedangkan ajaran moral mengajarkan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain.

Namun demikian ilmu dan pengembangannya tidak bisa lepas dari etika dan moral. Sekalipun sering dicampuradukan dalam penggunaannya, tetapi persoalan baik-buruk, sopan, jujur, patriotik, solider adil, teguh pada pendirian yang benar, mencintai keindahan, dan lain lain, kesemuannya akan berkaitan dalam pengembangan ilmu dan perilaku keseharian seorang ilmuwan. Karena itu pengembangan ilmu menuntut value, etika dan moralitas memanusiakan manusia sampai pelestarian lingkungan. Demikian juga amat dibutuhkan produk seni berupa keindahan dan keharmonisan, serta moralitas yang mensucikan batin.

Demikian juga menurut **Liek Wilardjo** keterikatan ilmu kepada nilai-nilai membuatnya tidak dapat dipisahkan dari etika. Perkataan “etis” menunjuk kepada bagaimana suatu budaya berpendapat seharusnya bertingkah laku. Etika memberi nasehat mengenai tingkah laku, biasanya dalam bentuk pernyataan, semboyan, pepatah, peribahasa dan sebagainya, yang mengandung arti, tetapi tidak menyatakan dengan tuntas, tujuan-tujuan yang baik dan didambakan, yang diharapkan bisa dicapai dengan mengikuti nasehat-nasehat, serat akibat-akibat buruk bila melanggar nasehat-nasehat tersebut⁴².

Dalam situasi hipotesis yang delematis harus dipahami bahwa kebenaran merupakan suatu nilai, demikian juga kebaikan dan kemaslahatan. Ketiganya tidak bisa dilepas dalam bagian-bagian tersendiri, tetapi berkaitan yang menampilkan pandangan bahwa “ilmu yang tidak bebas nilai”. Seorang ilmuwan dalam menyampakan kebenaran tidak bisa lepas dari tata nilai keyakinan dan intuisi hati nurani yang menyuarakan etik kemanusiaan dan moral, serta nilai-nilai yang digali dari relung-relung kehidupan masyarakat (budaya) dan kemanfaatannya untuk umat manusia. **Stephen R Covey** mengambil suatu pandangan tentang penciptaan karakter manusia, termasuklah ilmuwan atau penstudi hukum atau para penegak hukum, "Taburlah gagasan, petiklah perbuatan, taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan, taburlah kebiasaan, petiklah karakter, taburlah karakter, petiklah nasib"⁴³Artinya untuk membangun hukum progressif tidaklah cukup dengan membaca buku referensi hukum bahkan kuliah yang hanya beberapa jam di ruangan, namun dibutuhkan sebuah pencerahan yang tiada henti secara berkesinambungan, bukan hanya hukum *in books* tetapi hukum *in action* atau sebuah rancang bangun hukum yang *on going process* untuk menemukan jatidiri ilmu hukum yang teorinya membumi (*grounded teori*) ke Indonesiaan dan hal itu dicari kedalam kearifan-kearifan lokal yang terbentang luas di pelosok nusantara Indonesia⁴⁴

Kebenaran spiritual selama ini sengaja atau tidak disengaja dijaui oleh para ilmuwan, karena dianggap lekat dengan wilayah kajian teologi (agama). Pertanyaan muncul, kenapa Allah menurunkan agama yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran,

⁴² *Op cit*, hal 273.

⁴³Stephen R Covey, *The Seven Habits of Highly Effective People*, New York: Simon & Schuster, 1990, halaman 46.

⁴⁴Pandangan itu selaras dengan Al-Qur'an: "...Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada Orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.." (QS Al Qashash) cerita-cerita (28) ayat 77 "Ia memberi hikmah kepada siapa yang berkenan. Barang siapa yang diberi-Nya Hikmah, kepadanya telah diberikan kebaikan melimpah. Namun tiada yang mengambil peringatan, kecuali orang yang mempunyai pikiran.." (QS Al Baqarah (Sapi Betina) (2) ayat 269

kebaikan dan keindahan. Lebih rumit lagi pemahaman dan penafsiran antar agama terhadap suatu nilai sering kali berbeda. Inilah barang kali pentingnya dilakukan dialog agama atau nilai, dalam rangka mencari dan menghubungkan titik-titik persamaan menjadi konfigurasi tatanan nilai yang amat dibutuhkan manusia yang mendambakan terciptanya ketenteraman dan kedamaian kehidupan manusia.

Ilmu tidak boleh tinggal diam untuk mendialogkan persoalan nilai, dan tidak boleh menganggap bahwa persoalan nilai dianggap bukan wilayahnya. Ilmu perlu didorong lagi untuk memasuki wilayah-wilayah seperti itu dan memfasilitasi dalam bentuk memberikan sumbangan kelebihan (metodologi) yang dimiliki, dalam rangka untuk melakukan konvergensi atau titik temu antara persoalan kebenaran ilmu dan kebenaran ilahiah yang vertikal. Inilah tugas kita bersama sebagai seorang ilmuwan.

Alam pemikiran spiritual Islam misalnya, tumbuh tidak lepas dari proses asimilasi dan akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Yunani. Dalam Al-Qur'an sendiri tidak ditemukan kata filsafat (*al-falsafah*), karena Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab asli, sementara *al-falsafah* merupakan bahasa arab bentukan yang sudah terpengaruh kata filsafat dari bangsa Yunani. Filsafat sebagai ilmu hakikat, dalam Al-Quran disebut dengan kata *hikmah*, atau *al-hikmah*. Al-Quran berisi kumpulan tertulis mengenai wahyu Tuhan, sedang hikmah atau filsafat adalah ilmu mengenai hakikat sesuatu⁴⁵.

Menurut **Ali Ashraf**, Ilmu berangkat dari nilai atau moral Al-Qur'an dan Hadits, yang mana keduanya bukan hanya menampilkan ayat-ayat (bukti kebenaran), tetapi juga *hudan* (pedoman kebijakan), juga *rakhmah* (anugerah Allah). Karena itu ilmu bukan hanya mencari kebenaran yang didasarkan pada penalaran dan diskursus, melainkan juga mencari kebijakan, kemaslahatan, ridha dan kasih sayang Allah⁴⁶.

Dalam perspektif Islam, ilmu secara aksiologis tidak hanya sekedar untuk ilmu, tetapi lebih dari itu ilmu harus bermanfaat untuk kemaslahatan, yakni kepentingan orang banyak. Ilmu ada dan ditemukan di dalam alam kehidupan masyarakat Manusia disuruh untuk menggunakan potensinya, yakni akal dan hati untuk memahaminya. Dalam Islam akal (*al-aql*) menempati kedudukan yang teramat penting, disamping hati (*kalbu*) dan indera yang lain. Karena itu firman Allah yang pertama kali turun melalui Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq yang dikenal dengan surat Iqra (membaca), disebutkan dalam Al-Qur'an "*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan*", "*Bacalah dan Tuhanmu yang paling pemurah*". (QS Al-Alaq, ayat 1 dan 3).

Dengan potensi yang dimiliki, manusia diperintahkan membaca kekuasaan Allah yang ada di alam ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal*" (QS Ali-Imran, ayat 190). "*Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah menciptakan langit dan bumi dan bangsa berlain-lain bahasa dan warna kulit. Sesungguhnya yang demikian ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui (berilmu)*" (QS Ar-Ruum ayat 22).

Ilmu dalam Islam disamping bisa digali berdasarkan Al-Quran dan Hadits juga terdapat *Maslahat Mursalah*, yang merupakan sumber hukum tambahan berdasarkan penelitian empiris (*istiqla*), yang diperoleh dari fenomena alam dan perilaku masyarakat, ditemukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Hal tersebut

⁴⁵ Musya Asy'arie, Filsafat islam suatu Tinjauan Ontologis, dalam *Filsafat Islam suatu Tinjauan Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis dan Prospektif*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta, 1992, hal 14.

⁴⁶ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*, Edisi II, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2001, hal 66-67.

didasarkan pada Al-Quran yang menyebutkan “*Dan tiadalah Kami mengutus kamu (nabi), melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta*” (QS Al-Anbiya, ayat 107)

Kemaslahatan dapat ditangkap secara jelas oleh orang yang mempunyai dan mau berfikir, sekalipun dalam kasanah pemikiran Islam terdapat perbedaan dalam memahami hakikat maslahat. Perbedaan tersebut bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang perorang dalam menafsirkan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits, dimana masing-masing ahli pikir mempunyai keterbatasan, sehingga tidak mampu memahami hakikat maslahat secara sama, karena adanya perbedaan yang bersifat temporal dan kondisi daerah (lokal) yang tidak sama.

Dimensi spiritual bisa dilihat pada ajaran yang paling dasar, yakni *aqidah*, yang mengajarkan pemahaman hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. Manusia dan alam pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat *fana*, sementara Tuhan adalah penguasa atas alam semesta beserta isinya (*robbul alamin*) yang bersifat kekal (*baqa*). Kebahagiaan terbesar seorang muslim mana kala dia mampu pasrah secara totalitas mematuhi perintah (hukum-hukum) Allah yang bersifat kodrati (*sunnahtullah*), baik yang bersifat umum ataupun yang terperinci, sebagai konsekwensi dari pengakuannya bahwa Allah Maha Esa, penguasa segalanya, dan segala makhluk bergantung padanya (QS. Al Ikhlas. 112 : 1-2)

Segala bentuk penghambaan manusia terhadap makhluk, baik alam (gunung, matahari, angin dll) atau kepada penguasa, pembesar, atasan kerja dll adalah syirik yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Karena syirik merupakan perbuatan yang merendahkan martabat manusia, yang mestinya manusia hanya melakukan penghambaan dan pertolongan hanya pada Allah semata. *Hanya kepada-Mu aku menyembah dan hanya kepada-Mu aku mohon pertolongan* (QS Al Fatehah 1 : 5).

Sikap tersebut sebagai konsekwensi bahwa manusia sebagai *khalifah* di muka bumi (*fil ard*) (QS. Al Baqarah 2 : 30), semata-mata dalam rangka melakukan penghambaan atau pengabdian kepada Allah (QS 51 Az Zhariyat : 56). Manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penguasa di muka bumi, mempunyai tugas (*amanah*) pertama, menjaga dan memelihara bumi dan isinya dari kerusakan, kedua, melakukan pengelolaan alam lingkungan untuk kesejahteraan manusia secara berkelanjutan (*sustainable*), ketiga, melakukan tugas risalah, yakni melakukan penegakan aturan (hukum) terhadap segala bentuk kemungkaran dan perusakan terhadap alam, dan keempat, semua yang dilakukan manusia dalam menjalankan hidup, kehidupan dan penghidupan akan dikembalikan atau diminta pertanggungjawabannya kepada Allah.

Konsekwensi lebih lanjut manusia tidak diperbolehkan berbuat kerusakan (*fasad*), berbuat tidak serakah (*eksploitatif*) tidak adil (*dzalim*) dan tidak boleh berbuat kesombongan (*sum'ah*), serta tidak boleh berbuat boros atau konsumtif (*di'a*). Tetapi sebaliknya harus berbuat baik (*ikhsan*), berperilaku santun dan bersahabatn. Semuanya itu dalam rangka untuk mewujudkan kedamaian di bumi ini (*islah*).

Karakteristik alam pada hakikatnya mengikuti ketentuan sunnahtullah, yang bercirikan pertama, bersifat pasti (*exact*), yakni semua yang diciptakan Allah berada dalam keadaan seimbang (QS. 67 Al Mulk : 3-4), dan segalanya ada di alam diciptakaan menurut ukuran yang sudah ditentukan dan ditetapkan (QS. Al Qomar 54 : 3). Kedua, alam bersifat tetap (*immutable*), yakni matahari, bintang, dan bulan bererilaku patuh (*istiqomah*) bergerak menurut garis edarnya (QS. Yasiin 36 : 40), dan bersifat tetap tidak berubah dan tidak ada yang merubah-rubah (QS Al An'nam 6 : 115). Ketiga, sifat alam tak mengenal siapapun (*obyektif*), yakni Allah menurunkan hujan dari langit ke bumi dan tumbuh tumbuh-tumbuhan, tanaman untuk keseluruhan kesejahteraan manusia (QS Al Nahl 16 : 14-18). Allah mencipta makhluk, termasuk manusia dalam keadaan berpasang-

pasangan (QS.Yasiin 36 : 36), dan semuanya akan memperoleh rizki berdasarkan ikhtiar yang dilakukannya.

Agar manusia bisa menjalankan fungsinya maka diciptakan aturan hukum yang bersifat kongkrit. Menurut **Ziauddin Sardar**⁴⁷, hukum adalah suatu pusat nilai yang berisi aturan, yang bertujuan untuk kesejahteraan umum yang universal bagi semua makhluk, mencakup kesejahteraan manusia untuk saat sekarang dan yang akan datang serta di alam baka nanti. Dengan syariat manusia akan mengetahui rambu-rambu antara yang dibolehkan (halal) dan dilarang (haram), antara perbuatan merusak (fasad), kedamaian dan kebaikan (ikhsan).

Hukum yang mengatur masalah alam diturunkan oleh Allah melalui firman-Nya lebih banyak bersifat global . Ketentuan hukum tersebut mengatur masalah seperti alam semesta, astronomi, penciptaan bumi, kemakmuran bumi, keaneragaman hayati, berupa flora dan fauna. Semua kemakmuran alam lingkungan diperuntukan untuk manusia, dan manusia sebagai khalifah diperintahkan oleh Allah untuk menjaga, memakmurkan dan melestarikannya.

Bagi umat Islam aturan hukum pengelolaan alam dan upaya penegakan hukumnya dalam rangka menjaga dari kerusakan yang diakibatkan oleh perusakan dan pencemaran alam lingkungan bukanlah persoalan yang terpisah dari perintah ajaran Islam, tetapi merupakan satu kesatuan (integral) ajaran dan perintah agama, yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Sebab ajaran Islam tidak membedakan antara urusan atau kepentingan dunia dan akherat, sebagaimana yang dikenal dalam masyarakat barat (sekuler). Dengan demikian upaya pengelolaan alam yang berkelanjutan pada hakikatnya adalah kreatifitas ibadah.

Perspektif spiritual Ilmu, termasuk ilmu hukum bukan hanya didasarkan pada kebenaran yang *qauliyyah*, yang tingkat kebenarannya pada taraf *haqq al-yakin*, yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui *ulum naqliyyah*, yakni perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah.

Melalui dialog nilai, **Philip Clayton** menawarkan paradigma saints yang berangkat pada **filsafat emergence**. Pada era sekarang manusia menyadari bahwa kejadian-kejadian dunia alamiah tidak dapat dijelaskan hanya mereduksi pada komponen-komponen terkecilnya, tetapi juga harus dikaitkan dengan obyek-obyek dan kejadian-kejadian lain dalam konteks yang lebih luas dimana mereka menjadi bagiannya. Di sini paradigma hukum mempunyai makna baru ketika kita mendaki tangga kemunculan berikutnya pada tataaran wujud yang mempunyai kehendak bebas sseperti kita⁴⁸.

Filsafat emergence menawarkan cara-cara untuk melengkapi karya-karya para ilmuwan yang ada sebelumnya, dengan menunjukan cara baru bagaimana sains, filsafat dan teologi dapat saling berhubungan secara harmonis. Mendialogkan antara iman dan sains, hukum wahyu dan hukum dunia menjadi penting, sekalaipun barangkali masih belum diperoleh titik temu, sampai kita mampu belajar lebih jauh melalu repleksi yang modelnya sudah dilakukan para ilmuwaan terdahulu seperti ibnu Sina (Avicenna) dan Ibnu Rusyd (Averoes). Dialog nilai merupakan sumbangan pemikiran yang amat menjanjikan di masa mendatang.

⁴⁷**Ziauddin Sardar** dalam Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*, Edisi II, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2001, hal 66-67

⁴⁸ Philip Clayton, *Op Cit*, hal 8.

Cara yang dilakukan dengan mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam sampai alam tataran konseptual tipe hukum, yakni hukum tabiat Ilahi, hukum wahyu, hukum alam, hukum tabiat manusia dan perilakunya, serta hukum moral. Kegiatan-kegiatan seperti itu dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tidak lagi diperlukan ketegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan sains. Tugas bersama yang perlu kita pikul adalah memperlihatkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan sesungguhnya akan mendukung hasil-hasil sains, dan kepercayaan kepada Tuhan merupakan jawaban atas pertanyaan mendasar yang diajukan ilmuwan, tetapi tidak dapat dijawab olehnya⁴⁹.

J. Mencari Cetak Biru (*Blue Print*) Paradigmatik yang membumi (*Grounded Theory*) Hukum di Indonesia.

Menjelang tahun 2000, para ilmuwan hukum di Indonesia semakin terdorong dan bersikap pro aktif mengkonstelasikan pendapat-pendapat, asas-asas, konsep, dan teori hukum ke bentuk metateoretis ilmu hukum yang disebut "paradigma". Apakah "Hukum" dan "Hukum" itu memang memiliki "Paradigma"?

Jawaban terhadap persoalan tersebut memang belum tuntas (berkembang terus menerus), bahkan sampai kini di kalangan ilmuwan hukum dan para pakar ilmu pengetahuan lainnya masih banyak yang meragukan tentang ada tidaknya teori-teori di dalam ilmu hukum. Apalagi yang menyangkut eksistensi paradigma ilmu hukum. Kondisi yang demikian itu, tentunya mendorong para ilmuwan hukum, khususnya di Indonesia untuk berfikir pro aktif mendalami ulang filsafat-filsafat, asas-asas, konsep-konsep, pendapat-pendapat-pendapat para ahli hukum termuka, dan berbagai indikator lainnya yang diasumsikan berfungsi sebagai teori hukum, seraya menghubungkannya juga dengan pemahaman-pemahaman mengenai teori dan paradigma yang berkembang di bidang ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Sikap pro aktif ilmuwan hukum Indonesia tersebut yang diekspresikan dan diaktualisasikan melalui berbagai seminar, kajian dan penelitian ilmiah ternyata cukup berdampak positif untuk membuat terang dan jelas tentang keberadaan teori dan paradigma di dalam khasanah ilmu hukum. Hasil-hasil yang sudah dicapai dari kajian ilmiah ilmu hukum itu, tentunya dapat dipertajam dan dikembangkan terus oleh para aktor dan ilmuwan hukum lainnya yang menggeluti disiplin ilmu hukum, baik berposisi sebagai akademis, praktisi, pembentuk, maupun pelaksana hukum. Terlebih khusus lagi, bila dikaitkan dengan kondisi kehidupan hukum Indonesia masa kini yang tampaknya semakin ruwet dan memunculkan tantangan-tantangan baru ke depan untuk membangkitkan kembali citra negara Hukum Indonesia yang diharapkan semakin *par excellent*.

Para ilmuwan hukum Indonesia, tampaknya sudah sampai kepada suatu kesimpulan mendasar, bahwa bukan hanya ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial di luar hukum saja yang layak memiliki kekayaan teori dan paradigma, tetapi ilmu hukum pun sesungguhnya memiliki kekayaan teori dan paradigma yang tidak kalah *par excellent* nya dengan teori-teori dan paradigma-paradigma dari disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Hanya saja, disadari ataupun tidak selama era pemerintahan orde baru para ilmuwan hukum Indonesia seakan-akan terkungkung oleh "Paradigma Ideologis Pancasila" yang distigma sedemikian rupa ke arah komando monoloyalitas, pendekatan keamanan dan upaya mempertahankan "status quo", sehingga dirasakan menghambat upaya mentematikkan teori-teori dan paradigma ilmu hukum secara dinamis dan obyektif sebagaimana layaknya yang telah dikembangkan oleh para pakar ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

⁴⁹ *Ibid*, hal 9.

Jika ditelusuri semionikanya, paradigma bersumber dari akar kata bahasa Yunani "Para" "Deigma". Para artinya "di samping" atau "berdampingan" dan deigma bermakna "Contoh", "Model" atau "Pola" (Thomas Kuhn, 1970). Kombinasi kedua akar kata tersebut dapat diartikan sebagai "model yang mendampingi" atau "pola yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik dan pemikiran tertentu". Pengertian yang demikian itu, belumlah mencerminkan pengertian konsep keilmuan, melainkan sekadar indikasi awal menemukan akar katanya.⁵⁰

Paradigma sebagai konsep keilmuan sesungguhnya sudah muncul dan berkembang secara simultan dengan pemikiran filosofis dan keilmiah. Simultan berarti dapat muncul dan dikembangkan bersamaan, berbarengan, tersurat, tersirat, dan berkoherif dengan model pembentukan dan pengembangan asumsi, postulat, asas, konsep, teori, dalil, dan logika yang dihasilkan oleh pemikiran filosofis dan keilmiah. Malahan untuk lebih memperkuat bangunan sebuah kerangka pemikiran rasional kerap kali diinterplaykan dengan ajaran-ajaran keagamaan yang berasal dari wahyu illahi sebagaimana terdapat di dalam kitab-kitab suci keagamaan. Ini merupakan langkah nyata dari upaya manusia untuk mencerdaskan dan mengakhlaqkan dirinya guna menemukan jejak-jejak kebenaran otentik secara makro maupun mikro dengan mencermati eksistensi alam semesta beserta segala isinya. Juga menunjukkan, bahwa daya tangkap indrawi, perasaan dan pikiran manusia untuk mengungkap sebuah kebenaran otentik amatlah terbatas. Apalagi mengungkapkan misteri-misteri ketuhanan, kealaman dan kemanusiaan yang serta transendental. Oleh karena itu, pemikiran dan penalaran akal budi manusia perlu diinterplaykan, dikohersikan dan dikorespondensikan dengan jejak-jejak kebenaran transendental otentik yang telah diwahyukan oleh Allah SWT di dalam kitab-kitab suci.

Sungguhpun demikian, patut juga dipahami bahwa sebagai makhluk berakal di muka bumi yang konkret dan positif ini, manusia cukup dibekali oleh Sang Pencipta-Nya dengan berbagai kemampuan indrawi, perasaan, kecerdasan, dan kemampuan fisik yang seolah-olah tanpa batas. Mereka mampu menciptakan perangkat-perangkat kehidupan manusiawi melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikembangkannya. Berdasarkan IPTEK-nya itu, manusia seolah-olah dewa dari akal budinya sendiri ketika memahami, mengartikulasi dan mengaktualisasikan ekspresi-ekspresi semionika kealaman dan kemanusiaan, melalui proses belajar mengajar yang menghasilkan berbagai hasil cipta, rasa dan karsanya, bahwa memang ada kebenaran, kebaikan, dan keadilan yang dapat dijelaskan, diprediksi dan dipecahkan berdasarkan ragam teori dan paradigma yang diciptakannya.

Berkaitan dengan keberadaan paradigma keilmuan, ada yang beranggapan, kemunculannya untuk pertama kali justru dicetuskan oleh ahli filsafat kealaman (Philosophia Naturalis), kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para pakar ilmu alam. Anggapan yang demikian itu, boleh-boleh saja diikuti sepanjang dipahami pada prinsip kontekstualitasnya yang relevan. Umpamanya dari gagasan Aristoteles tentang "hylemorfisme", ternyata memang mengilhami berbagai paradigma dan teori ilmu fisika. Serta berbagai gagasan cemerlang para filosof Etika dan Moral yang mengilhami pemikiran-pemikiran ilmuwan sosial.⁵¹

⁵⁰ Thomas Kuhn, Peran Paradigma dalam Revolusi Sains, Remaja Karya, Bandung, 1989, dalam Marcus Lukman, Penerapan Metode Statistik Non Parametrik Dalam Penelitian Hukum, PIMH UNTAN Press, Januari 2007, halaman 2

⁵¹ Marcus Lukman, Penerapan Metode Statistik Non Parametrik Dalam Penelitian Hukum, PIMH UNTAN Press, Januari 2007, halaman 3

Tesis "hylemorfisme" Aristoteles yang menginterplaykan empat unsur kealaman "zat, ruang, waktu, dan gerak", sampai kini masih tetap aktual sebagai isu-isu dan acuan standar teori-teori serta paradigma ilmu kealaman baik yang bersifat murni maupun terapan. Menurut tesis tersebut, benda-benda serba zat di alam semesta bukanlah sekedar barang mati, melainkan sebagai barang hidup yang terus menerus bereaksi, berproses, ber-evolusi, dan ber-revolusi satu sama lain melalui mekanisme alamiah gerak, ruang dan waktu menciptakan bangunan baru fenomena alam keberadaan. Fenomena alam serba zat itu oleh indrawi dan pemikiran manusia, realitasnya dapat diamati dan distudi sebagai obyek ilmu pengetahuan alam secara empirik, rasional, obyektif dan sistematis, yang dapat menghasilkan ragam ilmu pengetahuan alam murni dan terapan.

Kegiatan pengamatan dan studi dimaksud tentunya memerlukan metode tertentu yang diawali dengan asumsi-asumsi, postulat, hipotesis, konsep, dan teori oleh para aktor pemikirnya. Disusun berdasarkan hasil pengamatan indrawi atau hasil studi berkelanjutan, maka berkembanglah aneka proposisi paradigma dari bentuknya yang paling sederhana sampai kerumusannya yang lebih rumit dan kompleks. Kerap kali berubah menurut kurun waktu tertentu, dari paradigma lama menuju ke paradigma baru saling melengkapi dan menyempurnakan. Sebagai buktinya, di bidang ilmu fisika sampai kini terus dikembangkan berbagai macam paradigma antara lain paradigma "Mekanika" Newton, "Elektrodinamika" Maxwell, "Four Dimensional Space Time" Einstein, "Determinisme" David Bohm & Roger Penrose, "Probabilisme" Stephen Hawking, dan "Elementary Particles" Fritjof Capra⁵²

Dibidang ilmu-ilmu sosial, terutama ilmu sosiologi, antropologi dan politik juga berkembang bermacam-macam paradigma. Dalam bukunya *"The Structure of Scientific Revolution"* 1970, Thomas Kuhn sebenarnya sudah memperingatkan agar pembentukan dan pengembangan paradigma disiplin ilmu-ilmu sosial hendaknya berhati-hati dan tidak gegabah menyontek begitu saja paradigma yang sudah eksis di lingkungan disiplin ilmu alam. Sebab, apabila suatu disiplin ilmu sosial memang tidak cukup valid memiliki paradiigmatikanya, maka pembentukan dan pengembangan paradigma di bidang ilmu-ilmu sosial justru dapat menimbulkan kerancuan ilmiah yang amat mendasar.

Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah: "...*university recognized scientific achievement that for a time provide model problems and solution to a community of practitioners*" (1970:VII). Berfungsi sebagai "pemandu bagi para ilmuwan ketika melakukan kegiatan penelitian ilmiah" (research guidance) melalui "pola konstruksi masalah dan perancangan solusinya". Atau merupakan "*the central cognitive resource for scientist activity*"⁵³.

Dipengaruhi oleh ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah dan politik, ternyata ilmu hukum sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan (humaniora) menjadi ikut terpengaruh oleh paradigma yang berkembang di lingkungan kelima disiplin ilmu sosial dimaksud. Terutama terhadap cabang ilmu hukum yang bernuansa positivisme seperti "Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, dan Psikologi Hukum", Kelima bidang disiplin ilmu hukum tersebut memang sarat dengan intervensi konsep-konsep nilai ilmu sosial di luar bidang ilmu hukum yang diyakini oleh penganut aliran positivisme hukum memang saling berpengaruh dengan nilai-nilai norma hukum.

Satjipto Rahardjo⁵⁴, mahaguru sosiologi hukum di Indonesia mengkonstruksikan masyarakat merupakan "tatanan normatif" yang tercipta dari proses interaksi sosial dan

⁵² Liek Wilardjo, Peran Paradigma Dalam Perkembangan Ilmu, Makalah, Pada Simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, UNDIP, Semarang, 1998, halaman 1-2

⁵³ Aulis Arnio, *Paradigm in Legal Science, Dalam Theory of Legal Science Dorrecht*, 1984, halaman 26

menciptakan berbagai "kearifan nilai sosial". Kearifan nilai sosial itu ada yang bersifat rasional dan irasional yang "ditransformasikan" membentuk "tatanan masyarakat normatif" melalui "proses normativisasi hukum" sehingga menjadi publik dan positif.

Konstruksi sosial positivistik seperti itu, menempatkan "kearifan" sebagai "konstituen dasar" dari "tatanan masyarakat normatif" yang dinamis. Kearifan, dimaknakan "wawasan", "visi" atau "cara pandang" tentang "hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial yang memiliki hubungan vertikal dengan Tuhannya dan interaksi sosial horisontal antar individu dan kelompok sesamanya". Berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada lingkungan strategis lokal, nasional, regional ataupun global. Dari sini lahir berbagai landasan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, etik, moral, dan hukum yang didalamnya mengandung asas, konsep, teori, serta norma-norma kemasyarakatan tertentu untuk kemudian dikonstruksikan menjadi "paradigma".

Oleh karena itu, paradigma menurut disiplin ilmu sosial dan konsep perubahan sosial memiliki pengertian yang lebih luas daripada sekadar sebuah asas, konsep, teori, dan norma tertentu, bahkan diposisikan sebagai "metateoretis". **Mansour Fakh** menjelaskan, bahwa paradigma ialah "konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu nilai dan pemikiran tertentu" (1995, CSIS, Tahun XXIV, No.6:441), ia juga mengutip pendapat Herbermas, yang membedakan tiga macam aliran paradigma, yaitu "instrumental knowledge", "hermeneutic knowledge" dan "emancipatory knowledge".

Aliran instrumental berbasis pada filsafat positivisme yang mengikuti cara pandang, metode, teknik, atau model ilmu alam. Tema sentralnya memahami realitas sosial secara universal dan mengeneralisasi melalui mekanisme deterministik, obyektif, rasional serta empirikal positif. Berdasarkan tema sentralnya itu, penelitian ilmu sosial diposisikan harus bebas nilai yang mensyaratkan pemisahan fakta dengan nilai (values) menuju pemahaman realitas sosial yang obyektif rasional.

Aliran *hermeneutic* atau *interpretative*, berbasis pada filsafat "*phenomenology*" berusaha memahami realitas sosial sebagai obyek pengamatan studi yang bersifat fenomenologis dan berubah-ubah sesuai faktanya. Jadi fakta sosial berbicara untuk dirinya sendiri menurut fenomenanya masing-masing pada ruang, tempat dan kurun waktu tertentu. Ilmu Etnography dan Antropologi merupakan contoh nyata dua buah disiplin ilmu sosial yang menganut aliran paradigma *hermeneutic*.

Aliran emancipatory (*critical emancipatory*) menggunakan pendekatan holistik. Menurut aliran ini, tidak mungkin ilmu pengetahuan melepaskan diri sepenuhnya dari pengaruh nilai-nilai etika dan moral. Fakta tidaklah bersifat netral, melainkan menyatu dengan suatu nilai. Konsekuensinya, harus ada paradigma nilai berupa etik, moral atau ideologi tertentu yang diyakini kebenarannya sebagai sarana penguji universal terhadap epistemologi dan aksiologi ilmu pengetahuan sosial.

Ilmu Hukum walaupun dapat dikategorikan sebagai ilmu sosial (*humaniora*), tetapi diyakini memiliki ontologi, epistemologi dan aksiologinya tersendiri. Ontologi ilmu hukum tiada lain adalah : hukum itu sendiri sebagai seperangkat nilai normatif yang bersumber dari akumulasi nilai etik, moral dan sosial dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang tercipta dari perilaku hidup kemasyarakatan (kebiasaan) dan dikonstruksi oleh institusi sosial masyarakat hukum tertentu maupun institusi (otoritas) publik kenegaraan modern.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, Paradigma Hukum Indonesia Perspektif Sejarah, Makalah disampaikan pada simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, UNDIP, Semarang, 1998, halaman 1-2.

Epistemologinya berbasis pada filsafat hukum sebagai salah satu cabang dari filsafat moral (*moral philosophy*) yang mengkaji persoalan hukum secara menyeluruh, radikal, spekulatif, dan rasional sejauh apa yang mungkin dipikirkan oleh manusia tentang eksistensi hukum. Pada dasarnya, terdapat dua aliran (mazhab) utama di bidang filsafat hukum, yakni aliran Hukum Alam (rasional-rasional) dan Positivisme Hukum (rasional). Aliran hukum alam, menggunakan pola pikir deduktif ke induktif, sebaliknya aliran positivisme hukum dari induktif ke deduktif dan/atau kombinasi antar keduanya. Kedua pola pikir ini, langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberadaan metode-metode penelitian hukum konservatif seperti : metode historis, metode dogmatik, metode perbandingan, metode interpretasi, metode sistematisasi, metode konstruksi, dan metode sosiologis, yang kemudian dimodernisasi (rangkuman) menjadi, Metode Penelitian Hukum Normatif, Metode Penelitian Hukum Sosiologis dan Jurimetri.

Tentang aksiologi ilmu hukum, jelas memiliki kegunaan yang "par excellent", yakni mutu baku ilmiah terapan bagi kebutuhan pemecahan masalah hukum masa kini (*ius constitutum*) maupun mutu baku ilmiah murni bagi pengembangan cita hukum ke masa depan (*iusconstituendum*). Persoalan pokoknya, tinggal bagaimana mengembangkan paradigma-paradigma ilmu hukum yang sudah ada dan menemukan paradigma-paradigma hukum baru melalui penelitian hukum berdasarkan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum sosiologis. Disinilah para aktor dan ilmuwan hukum dituntut agar mampu berkreasi menciptakan paradigma-paradigma hukum baru di lingkungannya masing-masing, baik sebagai akademisi, praktisi, legislator, maupun yudikator hukum.

Para aktor dan ilmuwan hukum diharuskan mampu memahami bangunan hukum modern secara komprehensif integral. Bangunan hukum modern bukanlah semata-mata "realitas yuridis" tetapi juga "realitas sosiologis" yang saling mempengaruhi dan tidak mensterilkan. Kenyataan tersebut, memparadigmakan bahwa bangunan hukum modern memiliki struktur sosial yang sah dalam "tatanan masyarakat normatif modern". Kesahihan ini mengedepankan manakalah para aktor dan ilmuwan hukum mempersoalkan tentang asal usul lahirnya norma hukum. Norma hukum tidaklah bebas dari nilai "etik" dan "moral" sebagaimana didoktrinkan oleh **Hans Kelsen** dengan teori murni tentang hukum (*reine rechtslehre*), melainkan pada batas-batas tertentu memang harus terikat kepada nilai etik dan moral, sebab norma hukum pada hakikatnya memang dibangun berdasarkan nilai etik dan moral.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi "Paradigma Ideologis" tata hukum Indonesia untuk masa kini maupun masa ke depan. Berfungsi sebagai "cita hukum" dan "norma fundamental" Negara. Sebagai cita hukum, Pancasila memberikan arahan ideologis nilai etik dan moral terhadap cita hukum Indonesia ke masa depan. Cita hukum berarti berada pada ruang filsafati, yaitu harapan dan pemikiran ideal yang bersifat abstrak, terbaik, terbenar dan teradil. Upaya mewujudkan cita hukum yang terbaik, terbenar dan teradil tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan sepenuhnya menjelma ideal kualitatif sejauh yang dapat dirasakan kebenarannya oleh hati nurani manusia dan dipikir oleh otak manusia.

Sungguhpun demikian, cita hukum bukanlah khayalan (utopia) belaka tanpa dasar nilai yang konkret, malahan memang terbangun dari nilai-nilai kehidupan konkret faktual. Faktualitasnya adalah "tatanan kehidupan masyarakat" yang terus menerus berproses menghasilkan "nilai-nilai kearifan sosial dan budaya" berkadar "holistik", "deterministik" dan "pragmatik". Kombinasi dari ketiga kadar nilai kearifan sosial itu, mengkristal menjadi "satu kesatuan sistem nilai puncak" yang utuh menyeluruh dan diyakini kebenarannya sepanjang masa.

Satu kesatuan nilai puncak inilah yang menjadi nilai cita, tujuan dan harapan tertinggi ke depan bagi kemaslahatan hidup komunalitas masyarakat manusia yang beradab – individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan satu kesatuan sistem nilai puncak (tertinggi) yang dihasilkan oleh kearifan masyarakat Indonesia dan difungsikan sebagai cita hukum dan norma fundamental negaranya.

Pancasila sebagai cita hukum konstantifnya memang berada pada dunia cita, tetapi sebagai norma fundamental negara, nilai-nilai yang dikandungnya sudah berada pada alam pikiran nyata. Ia berfungsi memberikan pedoman umum kepada otoritas publik untuk mewujudkan cita hukum melalui proses pembentukan hukum (*regulate*) dan pengujian kelayakan berlakunya hukum (*justification*) sehingga menjadi publik dan positif.

Apabila sudah berlaku publik dan positif, maka hukum berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup bermasyarakat di bidang ketertiban, ketentraman, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum yang berproses terus menerus dari waktu ke waktu (*pantarei*). Proses yang demikian itu, mengakibatkan peranan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap rasa aman, tertib, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum tidak selamanya langgeng. Ini merupakan konsekuensi logis dari nilai-nilai hukum yang berkoherensi dengan nilai-nilai kehidupan sosial dan selalu berkontraksi dengan nilai-nilai sosial budaya lainnya, baik pada tataran lokal, nasional, regional, maupun global.

Bilamana eksistensi dan ekspresi nilai-nilai sosial lainnya terhadap norma hukum hukum semakin menguat, maka norma hukum yang sedang berlaku cenderung akan akomodatif sampai kepada titik tertentu di mana hukum positif yang berlaku itu dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang diaturnya. Di sinilah akan terjadi tuntutan ke arah pembaharuan hukum dari penggunaan paradigma lama kepada paradigma baru. Dari paradigma "ideologis holistik" ke paradigma deterministik dan pragmatik, atau sebaliknya sesuai dengan tantangan zaman.

Satjipto Rahardjo⁵⁵ yang mengutip konsepsi **Robert Merton** mengemukakan, tujuan diciptakannya paradigma tiada lain adalah untuk memberikan "*a provisional guide for adequate and fruitful functional analysis*". Berarti paradigma itu harus berisi: "*...the minimum sets of concepts.... as a guide for critical study of existing analysis; "...to lead directly to postulates and assumptions underlying functional analysis"; dan juga "...seeks to sensitize not only to narrowly scientific implications of various types of functional analysis but also their political and sometimes ideological implications*".

Suatu paradigma hukum, tercermin pula pada spiritualisme cita hukum yang berbasis pada perpaduan unsur nilai irrasional dan rasional kearifan sosial. Jika peraturan perundang-undangan dibedah sampai kepada akarnya yang terdalam, akan tampak wujud norma hukum dalam rumusan pasalnya yang mengandung nilai hakiki ataupun temporalistik sosiologis. Dari nilai yang dikandung norma tersebut, para aktor dan ilmuwan hukum dapat menarik kesimpulan timbal balik induktif maupun deduktif tentang konstelasi nilai irasional dan rasional berupa etik, moral, asas, konsep, dan teori empirik yang mendukungnya. Lebih lanjut berkreasi menciptakan paradigma hukum bersifat *emancipatory instrumental* dan *hermeneutic*.

Paradigma hukum bersifat *emancipatory*, *instrumental* dan *hermeneutic* dapat dibentuk melalui kombinasi timbal balik pemikiran rasional deduktif dan induktif maupun semionik. Pemikiran rasional deduktif merupakan penalaran berkoherensi dari satu pernyataan yang mengandung kebenaran umum (universal) kepada pernyataan yang

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *ibid*, halaman 6

mengandung kebenaran konkret. Sebaliknya pemikiran induktif merupakan penalaran berkorespondensi antara suatu pernyataan dengan materi pengetahuan yang dikandungnya (obyek yang dituju) oleh pernyataan tersebut. Untuk menciptakan peraturan hukum yang memiliki dayaguna pragmatis. Selanjutnya pola pemikiran semionik dapat diwujudkan dengan memahami, mengartikulasi dan mengaktualisasikan tanda-tanda, jejak, rambu, atau fenomena-fenomena kebenaran dan keadilan dari yang bersifat makro sampai kepada yang berkarakteristik mikro.

Persoalan kebenaran dan keadilan umpamanya, amat bijaksana jika didekati dengan menampilkan semionik jejak keadilan Tuhan Yang Maha Kuasa di alam semesta ciptaan-NYA. Betapa adilnya Allah SWT menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Allah SWT berfirman : "Lihatlah di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi mereka yang beriman. Dan pada penciptaan dirimu, serta semua makhluk buas yang telah Dia tebarkan di atas bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang yang teguh imannya. Dan pergantian malam dengan siang, serta rizki yang Allah turunkan dari langit, yang dengan demikian menghidupkan bumi sesudah matinya, dan bertiup angin.... ini semua adalah tanda-tanda bagi orang yang mengerti" (QS Al Jaasyah 45:3-5).

Firman Allah SWT itu, menunjukkan jejak kepada ummat-NYA bahwa dengan melihat penciptaan diri kita yang memiliki kekurangan dan kelebihan, laki-laki dan perempuan, bentuk fisik dan warna kulit berbeda, wajah yang tidak sama, kemampuan fisik dan intelektual berbeda, perasaan dan selera yang tidak sama, binatang buas dan segala bentuk ekspresi dan selera yang tidak sama, binatang buas dan segala bentuk ekspresi tanda yang membahayakan, adanya malam untuk waktu beristirahat dan siang untuk bekerja, serta rezeki yang dilimpahkannya, pergantian iklim dan musim di bumi, kesemuanya diperuntukkan bagi kemaslahatan hidup seluruh insan manusia, bukan untuk perorangan, sekelompok orang atau satu bangsa. Ini menandakan betapa mulianya keadilan Allah SWT. Jelas keadilan universal Allah SWT itu tidak dapat diukur kuantitatif matematis oleh kemampuan IPTEK manusia, kecuali dengan meyakini kebenarannya, terutama bagi mereka yang beriman, mengerti dan dapat merasakannya.

Dihadapkan kepada semionika keadilan Allah SWT itu, perasaan dan pikiran manusia menjadi impoten, tidak berdaya, lemah dan fana. Tetapi justru dengan menyadari ketidakberdayaan, kelemahan dan kefanaan itulah, perasaan dan pikiran manusia dapat dikembangkan menciptakan paradigma-paradigma keadilan hukum yang mengadung cita keadilan Tuhan secara proposional ke dalam tataran keadilan kemanusiaan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menciptakan hukum positif kemanusiaan.

Sesungguhnya amat luas pengkajian dari segi rasional semionik ini. Tetapi prinsip utama yang harus diinterplaykan ialah bagaimana menginterpretasi dan mensistematisasikan suatu tanda kealaman dengan perilaku manusia antara fakta empirik dengan nilai kearifan sosial kemanusiaan sehingga dapat dipahami pola ikon, indeks, simbol, kualitas, kausalitas, asas, konsep, dan teorinya di bidang ilmu hukum, berdasarkan kombinasi timbal balik pemikiran deduktif dan induktif sampai ditemukannya paradigma-paradigma hukum yang berkadar holistik, deterministik dan pragmatik.

Inilah yang menjadi tantangan ilmuwan hukum ke masa depan, khususnya bagi ilmuwan hukum Indonesia untuk menciptakan paradigma ilmu hukum Indonesia yang sejati. Bahkan **J.E. Sahetapy**⁵⁶ sampai kini masih meragukan tentang keberadaan ilmu hukum Indonesia, mengingat sampai kini belum ditemukan pembentukan dan

⁵⁶ J.E. Sahetapy, Paradigma Ilmu Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Kritis, Makalah, Pada Simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, UNDIP, Semarang, 1998, halaman 1.

pengembangan paradigma hukum Indonesia yang berbasis murni dari paradigma ideologis Pancasila.

Memang dapat dipahami, sebagaimana juga di negara-negara lain bekas jajahan Barat, hukum nasional negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin amat sarat dengan warisan paradigma hukum Barat. Tegasnya sejak awal tidak dibangun dari nilai dalam negeri sendiri ("*development from within*"), tetapi merupakan hasil alkulturasi dengan nilai hukum asing ("*acculturation with outside*") atau malahan ditanamkan dari luar ("*imposed from outside*"). Namun patut juga dipahami fakta tetaplah fakta dan nilai tetaplah nilai. Meskipun menurut faktanya ilmu hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh paradigma asing, tetapi secara umum nilai holistiknya tetap terpelihara dalam konteks tatanan nilai paradigmatis ideologis Pancasila.

Atas dasar pandangan yang demikian, pemahaman konsep Pancasila secara sebagai Paradigma Reformasi Pelaksanaan Hukum tentunya harus didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan operasionalnya, Landasan aksiologis (sumber nilai) bagi bangsa Indonesia bagi sistem kenegaraan adalah sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Bangsa Indonesia, yaitu Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi : ".....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia."

Rumusan pada pembukaan itulah kemudian dipahami sebagai konteks tatanan nilai paradigmatis ideologis Pancasila dengan konsep "Thawaf"⁵⁷ bukan piramida seperti pandangan Hans Kelsen, konsep ini dipertegas dalam penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum negara, Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁵⁸

Ada tiga konsep Pertama, Pancasila sebagai dasar negara, kedua, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa dan negara. Terhadap ketiga konsep Pancasila ini diharapkan materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. teks hukum kenegaraan diatas masih terpengaruh pada pola pikir positivisme, masih perlu merekonstruksi kembali agar membumi.

Rekonstruksi Paradigma Positivisme itu dipahami sebagai berikut: **Pertama**, harus disadari bahwa saat ini kita hidup di abad 21 atau abad digital, maka perlu menyikapi dengan pemahaman yang bersifat digital thinking, dan patut menyadari pemberlakuan sebuah Undang-Undang negara jangan hanya ditujukan kepada kepastian hukum semata, tetapi harus mampu menangkap rasa keadilan masyarakat serta kemanfaatan bersama. **Kedua**, bahwa hukum yang bukan hidup diruang hampa, tetapi hidup dialam diantara manusia yang bersifat dinamis, oleh karena itu pemberlakuan undang-undang dari negara perlu memperhatikan kebutuhan dinamika manusia yang memerlukan kecepatan informasi dan pelayanan publik, oleh karena itu hal yang harus disiapkan adalah infra

⁵⁷PP No 66 Tahun 1951 dan Simbolisasi Pancasila dalam Lambang Negara Republik Indonesia, menggunakan konsep thawaf dan Gilir Balik, seperti Rancangan Sultan Hamid II, 1950

⁵⁸ Pasal 2 UU No 10 Tahun 2004 dan Penjelasanannya.

struktur yang mendukung dan program sosialisasi yang menjadi perhatian, karena tidak bisa mengandalkan fiksi hukum saja sebagai ciri positivisme. **Ketiga**, suka atau tidak suka dibutuhkan SDM yang profesional untuk memberlakukan sebuah Undang-Undang negara, oleh karena itu perlu diserap SDM yang berbasis spiritualitas, oleh karena itu perekrutan SDM dibidang ini perlu memperhatikan moralitas yang diseleksi dari penyedia SDM yang berbasis dari Pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, karena SDM yang dibutuhkan berbanding lurus dengan semangat serta latar belakang dan tujuan diberlakukan sebuah undang-undang. **Keempat**, Perlu pergeseran Paradigma penegakan hukum, sebagaimana Sinzheimer mengatakan bahwa *hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup*. Jadi bukan hanya bagaimana mengatur sesuai dengan prosedur hukum, melainkan juga bagaimana mengatur sehingga dalam masyarakat timbul efek-efek yang memang dikehendaki oleh hukum. Dengan demikian masalah efisiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Oleh karena menyangkut pula kaitan-kaitan lain dalam berpikirnya, yaitu meninjau hubungan hukum dengan faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan sosial diluarnya. Hal ini jelas dikatakan pula oleh Robert B. Seidman, bahwa *setiap undang-undang, sekali dikeluarkan akan berubah, baik melalui perubahan normal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya*. Tidak dapat disangkal lagi bahwa perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta berkembang, mengkehendaki peraturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu. Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini kita jumpai dalam peraturan hukum. Hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Hukum semakin memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern. Namun, harus disadari sungguh-sungguh bahwa masalah peraturan oleh hukum itu bukan saja dilihat dari segi legitimasinya, dan bukan juga semata-mata dilihat sebagai ekspresi dari nilai-nilai keadilan. Itulah sebabnya muncul suatu cara berpikir lain (aliran pemikiran non-analistis) yang tidak lagi melihat hukum sebagai lembaga yang otonom di dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat.⁵⁹ **Kelima**, Menyadari akan pergeseran peran hukum (hukum negara) yang demikian itu, maka Prof.Dr Esmi Warassih, SH, MS menyarankan agar "paradigma kekuasaan" yang dipakai dalam penegakkan hukum di Indonesia ini perlu diubah atau diganti dengan penegakkan yang berbasis "paradigma moral". Paradigma moral yang diidealkan itu memiliki seperangkat nilai yang egalitarian, demokratis, pluralitis, dan profesional untuk membangun "masyarakat madani" (*civil society*). Perubahan paradigma ini penting dilakukan untuk memulihkan dan mengembalikan otentisitas hukum "sebagai sarana untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang". Dalam nada yang sama, Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH salah seorang "begawan sosiologi hukum" dari Universitas Diponegoro akhir-akhir ini mulai menaruh keprihatinan yang sama tentang orientasi hukum menuju kebahagiaan. Satjipto Rahardjo menegaskan, bahwa hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan, bukan sebaliknya membuat ketidaknyamanan atau ketidak tentraman hidup. Orientasi hukum yang demikian itu, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, secara harafiah dirumuskan dengan kata-kata : ".....untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

⁵⁹ Untuk memahami Paradigma ini, lihat Esmi Warassih, dalam Buku Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama .Maret 2005. Atau Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Bayu Media, April, 2008.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...."

K. Hukum Progresif dalam Ideologis Pancasila dengan Paradigma "Thawaf"

Pertanyaannya secara akademis adalah pertama, nilai-nilai apa yang terkandung dalam Pancasila ? dan kedua, bagaimana menjabarkannya berdasarkan pendekatan Paradigma "thawaf " dalam Perisai Pancasila pada Lambang Negara Rajawali Garuda Pancasila rancangan Sultan Hamid II ?

Untuk menjawab pertanyaan pertama, digunakan Paradigma Konstruktif ,dengan indikator, yaitu teori-teori yang dikembangkan harus lebih membumi (*Grounded Theory*) dan untuk memberikan analisis aksioma keilmuan yang dikembangkan (baik ontologi, epistemologi maupun metodologi) maka akan bertolak belakang secara frontal dengan paradigma positivisme.

Pada sisi ontologi, paradigma konstruktif ini menyatakan, bahwa realitas bersifat sosial dan karenanya akan menumbuhkan bangunan teori atas realitas majemuk di dalam masyarakat, Pernyataan ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak ada suatu realitas yang dapat dijelaskan secara tuntas oleh suatu ilmu pengetahuan. Atas dasar ini paradigma konstruktif secara ontologi penulis analisis dengan paradigma alternatif, yang dimaksudkan adalah pandangan dan pengetahuan yang menolak pemikiran, bahwa hanya ada satu epistemologi atau pendekatan keilmuan yang dapat menangkap realitas sebagai suatu kebenaran. Ini artinya penafsiran konsep Pancasila baik sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa dan negara tidak hanya dengan pendekatan teori hirarkis yang disusun secara piramida sebagaimana pemahaman paradigma positivisme selama ini atau sebagaimana dijelaskan oleh pandangan **Prof Dr Notonagoro, Prof Dr A. Hamid S Attamimi, Sunoto dan Prof Mr Roeslan Saleh** yang mengacu pada pandangan Hans Kelsen maupun Nawiasky sebagai aliran positivisme.

Pada sisi epistemologi pada paradigma konstruktif, hubungan periset dan obyek yang diteliti bersifat interaktif, sehingga fenomena dan pola-pola keilmuan dapat dirumuskan dengan memperhatikan gejala hubungan yang terjadi di antara keduanya. Karena itu, hasil rumus ilmu yang dikembangkan juga bersifat subyektif.

Sifat interaktif dengan menggunakan simbolisasi Pancasila dalam dokumen lambang negara rancangan Sultan Hamid II dan pemahaman keilmuannya bersifat subyektif, karena paradigma yang dipilih menggunakan paradigma alternatif , mengapa karena paradigma konstruktif terdapat sejumlah implikasi, pertama fenomena interpretatif yang dikembangkan bisa menjadi alternatif untuk menjelaskan fenomena realitas yang ada, kedua muncul paradigma baru dalam melihat realitas sosial akan menambah khasanah paham dan aliran, sebagai alternatif bagi para ilmuwan untuk melihat kebenaran dari sudut pandang yang berbeda, ketiga, konstruktivisme memberi warna dan corak yang berbeda dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya disiplin ilmu-ilmu sosial seperti ilmu hukum tata negara yang memerlukan interaksi antara periset dan obyek yang diteliti. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi nilai-nilai yang dianut, akumulasi pengetahuan dan diskusi ilmiah yang mengiringinya, oleh karena itu paradigma yang ditawarkan tergolong sebagai paradigma alternatif dengan harapan dapat menghindarkan pandangan bahwa satu paradigma adalah mencukup dan tepat untuk semua masalah (*one paradigm fits for all*), Konsekuensi ini dapat mengubah sikap seseorang agar lebih toleran terhadap berbagai pandangan yang ada, khususnya dalam masyarakat akademik dan periset.

Paradigma alternatif yang ditawarkan adalah Paradigma Thawaf yaitu memahami konsep Pancasila dengan pendekatan semiotika pada simbolisasi Pancasila pada perisai Pancasila dalam Lambang Negara rancangan Sultan Hamid II, sehingga pemahaman konsep Pancasila memunculkan pluralisme pandangan, artinya tidak hanya pandangan positivisme sebagai yang kita pahami selama ini.

Pada sisi metodologi, Paradigma Konstruktivisme secara jelas menyatakan bahwa penelitian harus dilakukan diluar laboratorium, yaitu di alam bebas, secara wajar guna menangkap fenomena apa adanya dari alam dan secara menyeluruh tanpa campur tangan dan manipulasi dari pengamat atau periset. Dengan setting yang alamiah metode yang paling tepat digunakan adalah metode kualitatif. Artinya teori muncul berdasarkan data yang ada, bukan dibuat sebelumnya sebagaimana yang terdapat pada penelitian kuantitatif dalam bentuk hipotesis. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui proses hermeneutik dan dialektis yang difokuskan pada rekonstruksi suatu konsep. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan proposisi ilahiah dengan menggunakan metode struktur dan format Al-Qur'an (MSFQ) dalam memaparkan konsep Thawaf.

Implikasi aksiologisnya adalah pertama, konsep thawaf pada Pancasila jelas akan berbeda dengan konsep Pancasila yang tersusun secara piramida dan hirarkis. Kedua, Penafsiran Pancasila tidak hanya dianalisis dari paradigma positivisme tetapi Penafsiran Pancasila tetapi bisa memilih pandangannya spiritualisme psikologis, agar tidak berkesan sekuler. Kedua implikasi tersebut bermanfaat dalam menyusun konsep negara kebangsaan Indonesia yang bermoral, atau disingkat konsep negara bermoral.

Berdasarkan paparan di atas, berikut ini kita kutip transkrip Sultan Hamid II ketika menjelaskan Perisai Pancasila dalam lambang negara, Rajawali –Garuda Pancasila, menyatakan:⁶⁰

Ada tiga konsep lambang sekaligus, yakni pertama, burung Radjawali-Garuda Pantja-Sila yang menurut perasaan bangsa Indonesia berdekatan dengan burung garuda dalam mitologi, kedua perisai idee Pantja-Sila ber"thawaf"/gilir balik, dan ketiga, seloka Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis dalam pita warna putih

Kemudian pada bagian lain Sultan Hamid II menyatakan:⁶¹

"... patut diketahui arah simbolisasi ide Pantja-Sila itu saja mengikuti gerak arah ketika orang "berthawaf"/ berlawanan arah jarum jam/"gilirbalik" kata bahasa Kalimantan dari simbol sila ke satu ke simbol sila kedua dan seterusnya, karena seharusnya seperti itulah sebagai bangsa menelusuri/ menampak tilas kembali akar sedjarahnja dan mau kemana arah bangsa Indonesia ini dibawa kedepan agar tidak kehilangan makna semangat dan "dijatidiri"-nja ketika mendjabarkan nilai-nilai Pantja-Sila yang berkaitan segala bidang kehidupan berbangsanja, seperti berbagai pesan pidato Paduka Jang Mulia disetiap kesempatan. Itulah kemudian saja membuat gambar simbolisasi Pantja-Sila dengan konsep berputar-gerak "thawaf"/gilir balik kata bahasa Kalimantan sebagai simbolisasi arah prediksi konsep membangun kedepan perdjalanjan bangsa Indonesia yang kita tjintai ini.

Selanjutnya pada bagian lain Sultan Hamid menjelaskan tentang konsep thawaf pada perisai Pancasila :⁶²

"... Falsafah "thawaf" mengandung pesan, bahwa idee Pantja-Sila itu bisa didjabarkan bersama dalam membangun negara, karena ber"thawaf" atau gilir balik menurut bahasa Kalimantannja, artinja membuat kembali-membangun/*vermogen* yang ada tudjuannja pada sasaran yang djelas, yakni masjarakat adil dan makmur yang berdampingan dengan rukun dan damai, begitulah menurut Paduka Jang Mulia Presiden Soerkarno, arah falsafahnja dimaksud

⁶⁰ Transkrip Sultan Hamid II yang dijelaskan kepada Solichim Salam, 13 April 1967 sebagaimana disalin oleh sekretaris pribadi Sultan Hamid II: Max Yusuf Al- Kadrie. Halaman 5-6

⁶¹ Transkrip Sultan Hamid II, 13 April 1967, ibid halaman 7

⁶² Transkrip Sultan Hamid II, 13 April 1967, ibid, halaman 8

pada udjungnja, yakni membangun negara yang bermoral tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai religius masing-masing agama yang ada pada sanubari rakyat bangsa di belahan wilayah negara RIS serta tetap memiliki karakter asli bangsanja sesuai dengan "djatidiri" bangsa/adanja pembangunan "*nation character building*" demikian penjelasan Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno kepada saja.

Berdasarkan tiga penjelasan Sultan Hamid II tentang konsep thawaf dalam perisai Pancasila dalam lambang negara di atas, maka secara tersirat dan tersurat, bahwa dari lima Sila pada konsep Pancasila menurut Sultan Hamid II berdasarkan pesan Presiden Soekarno, yaitu :⁶³

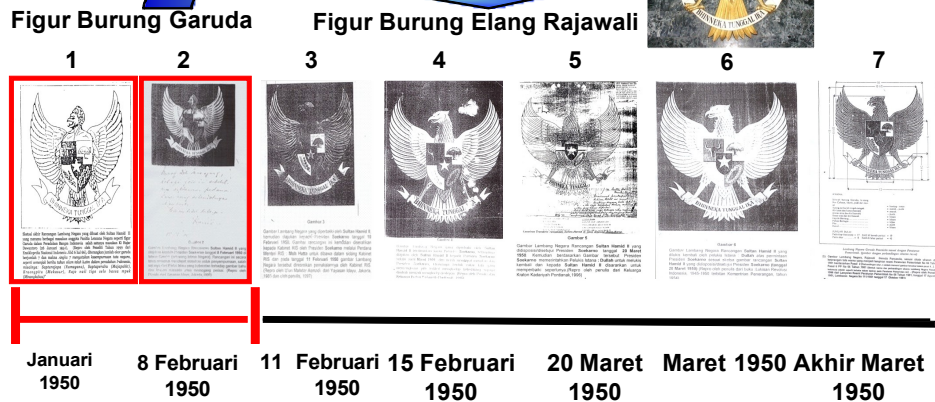
"....Adanja dua lambang perisai besar diluar dan perisai yang ketjil ditengah, karena menurut penjelasan Mr. Mohammad Hatta yang terlibat dalam panitia sembilan perumusan Pantja-Sila 1945 ketika pertukaran pikiran dalam Panitia Sembilan pada pertengahan Juni 1945, **dari lima sila Pantja Sila yang terpenting sebagai pertahanan bangsa ini menurut beliau adalah sila pertama Ketoeahanan Yang Maha Esa**, barulah bangsa ini bisa bertahan maju kedepan untuk membangun generasi penerus/kader-kader pedjuang bangsa yang bermartabat/berprikemanusiaan yang disimbolkan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, setelah itu membangun persatuan Indonesia sila ketiga, karena hanya dengan bersatulah dan perpaduan antar negara dalam RIS inilah bangsa Indonesia menjadi kuat, pada langkah berikutnya baru membangun parlemen negara RIS yang demokratis dalam permusyawaratan/perwakilan, karena dengan jalan itulah bisa bersama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni dari rakyat, untuk rakyat oleh rakyat karena berbakti kepada bangsa dan Tuhan Jang Maha Esa. Atas penjelasan Perdana Menteri RIS itu, kemudian perisai ketjil ditengah saja masukan simbol sila kesatu berbentuk Nur Tjahaya bintang bersudut segilima

Mengacu pada penjelasan Sultan Hamid II diatas, jika kita hubungkan dengan simbolisasi Pancasila pada sila-sila dalam Perisai Pancasila pada lambang negara Rajawali –Garuda Pancasila baik pada ciptaan pertama 8 Februari 1950 maupun ciptaan kedua 11 Februari 1950 dengan perbaikannya yang disposisi Presiden Soekarno dan kemudian dilukis kembali oleh Dullah, 20 Maret 1950 sampai dengan konsep lambang negara terakhir akhir Maret 1950 sebagaimana menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1951, terlihat, bahwa perumusan simbolisasi sila-sila Pancasila menggunakan arah thawaf itulah penulis sebut sebagai Paradigma Thawaf sebagai paradigma alternatif penafsiran Pancasila, seperti dokumen berikut ini:⁶⁴

⁶³ Transkrip Sultan Hamid II, 13 April 1967, *ibid*, halaman 7

⁶⁴ File-file Gambar rancangan Lambang Negara hasil Rancangan Sultan Hamid II, 1950, Yayasan Idayu, Jakarta, 18 Juli 1974 dan U'un Mahdar, UNPAD, Bandung, 1976, dan yang diakses oleh Penulis dari Yayasan Mas Agung, 1999

Analisis Pendekatan Semiotic Lambang Negara Republik Indonesia



On Going Process Perancangan Lambang Negara RI di Masa RIS

Konsep Pancasila "thawaf" itu dimulai pada Sila Pertama, kemudian memancar kepada semua Sila, karena Sila pertama dimasukkan kedalam perisai kecil yang ada ditengah perisai besar yang terbagi menjadi empat ruang yang dibelah oleh garis equator/khatulistiwa. Arah thawaf pada simbolisasi pada perisai Pancasila itu dimulai dari Sila kedua, yang disimbolisasi dengan tali rantai yang terdiri dari 17, yaitu mata bulatan dalam rantai digambar berjumlah 9 sebagai simbolisasi perempuan dan mata pesagi yang digambar berjumlah 8 simbolisasi laki-laki⁶⁵ kemudian berputar/thawaf arah kekanan atas Sila Ketiga dilukiskan pohon astana /pohon beringin simbolisasi tempat berlindung, kemudian berputar/thawaf ke arah kiri samping yaitu Sila Keempat yang disimbolkan kepala banteng sebagai simbolisasi tenaga rakyat, kemudian berputar/thawaf kearah kiri bawah ke Sila Kelima, yang dilukiskan dengan kapas dan padi sebagai tanda tujuan kemakmuran.⁶⁶

Secara semiotika lambang dapat dilihat pada gambar berikut ini: ⁶⁷

⁶⁵ Penjelasan yang sama pada Pasal 4 angka romawi IV dan penjelasan pasal 4 PP No 66 Tahun 1951.

⁶⁶ Pasal 4 PP No 66 Tahun 1951.

⁶⁷ Simbolisasi Lambang Negara diatas terdapat lingkaran , yang dimaksudkan untuk menunjukan arah thawaf pada simbolisasi sila-sila Pancasila pada Perisai dalam lambang negara Rajawali-Garuda Pancasila.



Konsep I Simbolisasi Pancasila Ber "Thawaf"

Terhadap konsep berthawaf I diatas penafsiran Sultan Hamid II menyatakan : ⁶⁸

".. lima sila Pantja Sila jang terpenting sebagai pertahanan bangsa ini menurut beliau adalah sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, barulah bangsa ini bisa bertahan maju kedepan untuk membangun generasi penerus/kader-kader pedjuang bangsa jang bermartabat/ berprikemanusiaan jang disimbolkan dengan sila kedua kemanusiaan jang adil dan beradab, setelah itu membangun persatuan Indonesia sila ketiga, karena hanja dengan bersatulah dan perpaduan antar negara dalam RIS inilah bangsa Indonesia mendjadi kuat, pada langkah berikutnya baru membangun parlemen negara RIS jang demokratis dalam permusyawaratan/perwakilan, karena dengan djalan itulah bisa bersama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia, yakni dari rakjat, untuk rakjat oleh rakjat karena berbakti kepada bangsa dan Tuhan Jang Maha Esa. Atas pendjelasan Perdana Menteri RIS itu, kemudian perisai ketjil ditengah saja masukan simbol sila kesatu berbentuk Nur Tjahaya bintang bersudut segilima.

Berdasarkan penjelasan Sultan Hamid II diatas, bahwa Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah terpenting sebagai pertahanan bangsa, mengapa karena dengan sila kesatu, bangsa Indonesia bisa bertahan maju kedepan, makna yang tersirat dan tersurat, adalah landasan moral relegius, artinya: Pancasila pada hakekatnya adalah negara kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Landasan pokok sebagai pangkal tolak., paham tersebut adalah Tuhan adalah Sang Pencipta segala sesuatu kodrat alam semesta, keselarasan antara *mikro kosmos* dan *makro kosmos* , keteraturan segala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa kesatuan saling ketergantungan antara satu dengan lainnya, atau dengan lain perkataan kesatuan integral ⁶⁹ kemudian menurut Sultan Hamid II dengan bertahan maju kedepan untuk membangun generasi penerus/kader-kader pejuang bangsa yang bermartabat/berprikemanusiaan yang disimbolkan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, pada langkah berikutnya jika sila kesatu dan kedua bisa diselaraskan, maka setelah itu membangun persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga,

⁶⁸ Transkrip Sultan Hamid II, 13 April 1967, op cit, halaman 7

⁶⁹ Ensiklopedia Pancasila, 1995, halaman 274.

mengapa demikian, karena hanya dengan bersatulah dan perpaduan antar negara dalam RIS (baca antar daerah dalam Republik Indonesia) inilah bangsa Indonesia menjadi kuat dan pada langkah berikutnya baru membangun parlemen negara (baca DPR, DPRD) yang demokratis dalam permusyawaratan/perwakilan, karena dengan jalan itulah bisa bersama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni dari rakyat, untuk rakyat oleh rakyat karena berbakti kepada bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa. Atas penjelasan Perdana Menteri RIS (baca Mohammad Hatta) itu, kemudian perisai kecil ditengah oleh Sultan Hamid II dimasukan simbol sila kesatu berbentuk Nur cahaya bintang bersudut segilima.

Hal demikian apa artinya? bahwa setiap individu yang hidup dalam suatu bangsa adalah sebagai mahluk Tuhan, maka bangsa dan negara sebagai totalitas yang integral adalah Berketuhanan, demikian pula setiap warga negara juga Berketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu Negara Kebangsaan yang membangun generasi penerus/kader-kader pejuang bangsa yang bermartabat/ berprikemanusiaan atau generasi penerus/kader-kader pejuang bangsa yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur, yang berarti bahwa negara menjunjung tinggi manusia sebagai mahluk Tuhan, dengan segala hak dan kewajibannya. Jika sudah ada kesadaran akan hak dan kewajibannya menjadi sebuah kesadaran setiap warga negaranya, maka akan mampu membangun persatuan Indonesia, karena hanya dengan bersatulah dan perpaduan antar antar daerah dalam Republik Indonesia, tentunya menjadi kuat dan pada langkah berikutnya baru membangun parlemen DPR, DPRD yang demokratis dalam permusyawaratan/perwakilan, karena dengan jalan itulah bisa bersama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni dari rakyat, untuk rakyat oleh rakyat karena berbakti kepada bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa. artinya setiap umat beragama memiliki kebebasan untuk menggali dan meningkatkan kehidupan spiritualnya dalam masing-masing agamanya, dan para pemimpin negara wajib memelihara budi pekerti yang luhur serta menjadi teladan bagi setiap warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pada tataran yang demikian itu, berarti Sila Pertama Pancasila sebagai dasar filsafat negara: Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu pada simbolisasi didalam perisai ditempatkan ditengah berupa Nur Cahaya berbentuk bintang yang bersudut lima, maknanya adalah bahwa Sila pertama ini menerangi semua empat sila yang lain atau menurut Mohammad Hatta, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Dengan dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini, maka politik negara mendapat dasar moral yang kuat, sila ini yang menjadi dasar yang memimpin ke arah jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan⁷⁰

Hakekat Ketuhanan Yang Maha Esa secara ilmiah filosofis mengandung makna terdapat kesesuaian hubungan antara Tuhan, Manusia dengan negara. Hubungan tersebut baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Manusia kedudukan kodratnya adalah sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus mampu membangun tiga hubungan yang sinergis, yaitu antara Manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

⁷⁰ Hatta, Panitia Lima, 1980 dalam Kaelan, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta, edisi ketiga, 1999, halaman 86.

Dalam kaitannya dengan konsep Pancasila dalam penjabaran kedalam peraturan perundang-undangan, maka secara substansial nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif Indonesia, dalam pengertian ini Pembukaan UUD 1945 terdapat nilai-nilai hukum Tuhan (alinea III), hukum kodrat (alinea I), hukum etis III) nilai-nilai hukum itu merupakan inspirasi dalam memformulasikan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konsep thawaf Pancasila tersebut, maka Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sebuah perisai atau pertahanan sebuah bangsa, karena selaras makna perisai atau tameng itu sendiri yang sebenarnya dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri dan perkakas perjuangan yang sedemikian dijadikan lambang, wujud dan artinya tetap tidak berubah-ubah, yaitu lambang perjuangan dan perlindungan, artinya dengan mengambil bentuk perisai, maka Republik Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban Indonesia asli⁷¹

Secara semiologi perisai yang berbentuk jantung itu, ditengah terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan khatulistiwa/equator. Lima buah ruang pada perisai itu mewujudkan masing-masing dasar Panca-Sila, dan apabila kita menggunakan semiotika teks hukum kenegaraan, maka secara semiotika lambang ada **dua** konsep thawaf dan atau berputar atau menurut Sultan Hamid II menggunakan istilah "Gilir Balik" (lihat PP No 66 Tahun 1951).

Konsep **Pancasila Berthawaf yang pertama** mengacu pada rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu seperti thawafnya manusia mengelinggi Ka'bah (Baitullah), yaitu dari kanan kekiri atau berlawanan dengan arah jarum jam, inilah simbolisasi tasbihnya manusia kepada Sang Pencipta manusia dan alam semesta, karena **Ka'bah menurut Al-Qur'an dalam hal ini Qur'an sebagai hudalinas (QS 3 ayat 138) ada 6 (enam) istilah (1) Ka'bah**, "Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai PUSAT (peribadatan dan urusan dunia) **BAGI MANUSIA** (QS 5 (Al-Maa'idah) Ayat 97) Al Bait "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk **TEMPAT BERIBADAH MANUSIA**, adalah Baitullah yang ada di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi **PETUNJUK** bagi **MANUSIA** (QS 3 (Al Imran) Ayat 96) **(3) Baitulah** "Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, 'bersihkan rumah-Ku **UNTUK ORANG-ORANG YANG THAWAF** " (QS 2 Ayat 125) Ayat senada bisa didapatkan QS 14 (Ibrahim) Ayat 37 dan QS 22 (Al Hajj) Ayat 26) **(4) Al Baitul al'Atiiq** ".....Hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan **THAWAF** sekeliling **RUMAH TUA** (Baitullah) (QS 22 (Al Hajj) Ayat 29) **(5) Kiblat** "Dan dari mana saja kamu keluar maka **PALINGKAN WAJAHMU KE ARAH MASJIDIL HARAM**; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dan apa yang kamu kerjakan". QS 2 (Al Baqarah) Ayat 149, Ayat senada dapat didapatkan QS 2 (Al Baqarah) 148,150. Al-Masjidil Haram "...Palingkan mukamu ke arah **MASJIDIL HARAM**. Dan dimana saja kamu berada, palingkan mukamu ke arahnya... QS 2 (Al Baqarah) Ayat 144.

Pada tataran ini ada nilai universal, yaitu "tidakkah kamu ketahui bahwasannya Allah; kepada-Nya bertasbih (berthawaf) apa yang ada dilangit dan di bumi dan (juga-burung) dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) sholat dan **tasbihnya** (thawafnya) dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan (QS 24 An Nuur ayat 41)

Tasbih yang disimbolisasi dengan berthawaf/berputar berlawanan dengan arah jarum jam sesungguhnya sudah dipahami, bahwa masing-masing makhluk mengetahui cara

⁷¹ Penjelasan Pasal 4 PP No 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara.

sholat dan tasbih kepada Allah dengan ilham dari Allah, dengan demikian manusia Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa apapun agamanya, bahwa kemerdekaan negaranya adalah berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa, oleh karena itu negaranya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷² seharusnya menjalankan sila I ini dalam masing-masing agamanya.

Dengan demikian Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa yang disimbolkan dengan Nur Cahaya diruang tengah yang berbentuk Perisai dengan menggunakan warna alam (hitam) dengan mengambil bentuk simbol bintang yang bersudut lima, memberikan makna bahwa Sila I memancarkan Sinar (Nur Cahaya) kepada empat sila lainnya tanpa diskriminasi atau menjadi kiblat bagi empat sila lainnya bukan dipahami secara struktur hirarki piramida sebagaimana pemahaman positivisme. Hal ini selaras apa yang dijelaskan oleh Sultan Hamid II ketika merancang simbolisasi pada Perisai Pancasila berdasarkan pesan Presiden Soekarno : **lima sila Pantja Sila yang terpenting sebagai pertahanan bangsa ini menurut beliau (baca Soekarno) adalah sila pertama Ketoeahan Yang Maha Esa**⁷³

Hal demikian selaras pandangan Jimly Asshiddiqie:

"Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ke Tuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang diantara sesama manusia, sehingga peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil, dan dengan demikian kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat diantara bangsa – bangsa.

Semangat Ketuhanan Yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenaap bangsa Indonesia untuk bersatu padu dibawah tali Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan diantara sesama warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam wadah negara, rakyatnya adalah warga negara. Karena itu, dalam rangka kewargaan (civility), tidak perlu dipersoalkan mengenai etnisitas, anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Yang penting dilihat adalah status kewarga seorang dalam wadah negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia, dimana kedaulatannya itu diwujudkan melalui mekanisme permusyawaratan dan dilembagakan melalui sistem perwakilan. Keempat sila atau dasar negara tersebut, pada akhirnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁴

Konsep Ketuhanan yang demikian itu memberikan sebuah konsep kosmologik, bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara telah mengajarkan agar setiap manusia Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, karena hubungan antara manusia dengan Tuhan telah diatur oleh agama dan kepercayaan tersebut, artinya

⁷² Alinea III Pembukaan UUD 1945 "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya", Kalimat "...Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, adalah merupakan suatu pengakuan adanya Hukum Tuhan, Adapun kalimat " dengan didorong keinginan luhur.." adalah merupakan pengakuan adanya satau Hukum Moral atau Hukum Etis, Pasal 29 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan negara mengakui keberadaan Tuhan, karena esensi sila ke I adalah Tuhan.

⁷³ Transkrip Sultan Hamid II yang dijelaskan kepada Solichim Salam, 13 April 1967.

⁷⁴ Jimly Asshiddigie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, MK dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, halaman 52-53.

Pancasila yang menempatkan Sila I adalah pertama dan utama mengatur hubungan antara manusia Indonesia dengan berbagai agama dan kepercayaannya itu hidup sejahtera aman dan damai dalam menjalankan tugas dan agama serta kepercayaannya masing-masing, tepatlah apa yang dilakukan oleh Pemerintah (SK Menteri Agama R.I No 70/1978) dalam hal mengatur hubungan antara Pemerintah dengan umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan hubungan antara lingkungannya masing-masing.

Memang Sila I berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa sama halnya dengan sila-sila lainnya tidak menyebut istilah Indonesia. Meskipun demikian karena sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan, maka Sila pertama tidak dapat dipisahkan dari sila-sila lainnya walaupun dalam tataran analisis terbedakan. Ini berarti bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa juga mempunyai ruang lingkup berlaku di seluruh Indonesia.

Bung Karno (1945) antara lain mengatakan :⁷⁵

"Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan yakni dengan tiada "egoisme agama". Dan hendaknya negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!"

Di dalam ceramahnya mengenai Pancasila Dasar Filsafat Negara (1960) antara lain juga ditegaskan :⁷⁶

"Agama tidak memerlukan teritoor, agama juga mengenai manusia. Tapi lihat orang yang beragama pun, - aku beragama, engkau beragama, orang Kristen di Roma beragama, orang Kristen di negeri Belanda beragama, orang Inggris yang duduk di London beragama, pendeknya orang yang beragama yang dalam agamanya tidak mengenal teritoor, kalau ia memindahkan pikirannya kepada keperluan negara, ia tidak boleh harus berdiri di atas teritoor, di atas wilayah. Tidak ada satu negara, meskipun negara itu dinamakan negara Islam, tanpa teritoor.

Pakistan yang menamakan dirinya Negara Islam, Republik Islam Pakistan, toh mengakui teritoor. Bahkan pendiri dari pada Republik Pakistan, yaitu Mohammad Ali Jinnah, ia berkata - historis ucapan ini - : "We are a nation". Ini salah satu argumen dari pada Mohammad Ali Jinnah tatkala ia mendirikan Pakistan. Bukan saja ia berkata "we are a religion", kita satu agama ia berkata "we are a nation", kita satu bangsa.

Dalam tulisan ini saya banyak menyitir pendapat Bung Karno karena itulah sumber pertama sebelum dibicarakan lebih lanjut baik oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia maupun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari ucapan yang asli itulah terdapat nilai-nilai yang mengandung pengertian murni. Setelah melalui berbagai proses maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapatnya tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dalam Pembukaan alinea keempat tercantum Pancasila sebagai dasar negara.

⁷⁵ Soekarno dalam Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika, Edisi 3, Hanindita, Yogyakarta, 2000, halaman 72.

⁷⁶ Soekarno Dalam Su noto, Ibid halaman 73.

Adapun konsep kedua **Pancasila berthawaf** adalah berputar mengikuti arah jarum jam, penulis menyebut "gilir balik", karena mengacu pada teks hukum kenegaraan dalam PP No 66 Tahun 1951 yang menyatakan :⁷⁷

"Ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan khatulistiwa (equator). Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Panca-Sila: I Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa terlukis dengan Nur Cahaya diruangan tengah berbentuk bintang yang bersudut lima. II Dasar kerakyatan dilukiskan kepala banteng sebagai lambang tenaga rakyat, III Dasar kebangsaan dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung. IV dasar Peri kemanusiaan dilukiskan dengan rantai bermata bulatan dan pesagi, V Dasar Keadilan dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tanda tujuan kemakmuran.

Berdasarkan teks hukum kenegaraan di atas, maka konsep Pancasila putaran/thawafnya dimulai pada Sila I berputar ke kiri atas Sila IV kemudian berputar ke kanan samping ke sila III selanjutnya berputar ke bawah ke sila II dan terakhir berputar ke kiri samping sila V, memang secara teks urutan sila-sila Pancasila tidak sama dengan Pembukaan UUD 1945, tetapi juga tidak selaras dengan Pembukaan UUD 1950 yang dasar dikeluarkan PP No 66 Tahun 1951, bahkan dengan ucapan dan tata urutan sila-sila Pancasila sebagaimana diatur oleh INPRES No 12 Tahun 1968 yang menyatakan : "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan satu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun II.No 7)

Terlepas dari perbedaan teks urutan Pancasila di atas, adalah menarik, bahwa konsep thawaf Pancasila yang diatur dalam pengaturan lambang negara adalah berlawanan dengan penjelasan Sultan Hamid II dalam transkripnya, tetapi sebenarnya itu bukanlah hal yang perlu dikhotomiskan antara teks hukum yang ada pada PP No 66 Tahun 1951 dengan urutan simbolisasi, tetapi semakin memperkaya makna jika didalami secara teoritik dan sebuah keniscayaan hal itu menjadikan sebuah simbol yang diangkat kedalam lambang negara, sebagai representasi simbolik sila-sila Pancasila sesuai pesan Presiden Soekarno kepada Sultan Hamid II ketika merancang Lambang Negara yang hendaknya mempresentasikan ideologi Pancasila sebagaimana simbolisasinya terdapat pada perisai Pancasila yang gambarnya menggunakan konsep arah thawaf/putarannya searah jarum jam, penulis menyebut konsep "Gilir Balik" seperti gambar berikut ini:

⁷⁷ Pasal 4 PP No 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara

**PROPOSISI SEMIOLOGI HUKUM PANCASILA DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 1951 TENTANG LAMBANG NEGARA**



Konsep II Simbolisasi Pancasila ber"Gilir Balik"

Makna secara semiotika konsep II simbolisasi Pancasila dengan konsep "Gilir Balik" di atas adalah Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan bagi membangun kerakyatan dan kebangsaan kemudian peri kemanusiaan serta mewujudkan keadilan sosial, konsep seperti, pada tataran spiritualitas, khususnya dalam pandangan sufi Islam, putaran yang searah dengan jarum jam dipahami sebagai putaran "Malaikat" Dan Kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar disekeliling Arsy bertasbih (berthawaf) sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara-antara hamba-hamba Allah dengan adil diucapkan: Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam" (QS 39 Az Zumar ayat 75) (Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan malaikat yang berada disekelilingnya bertasbih (berthawaf) memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala.(QS 40 Al Mukmin ayat 7) dan ayat senada dengan itu QS 2 ayat 30, QS 7 ayat 206, QS 13 ayat 13, Qs 41 ayat 38, QS 42 ayat 5.

Deskripsi epistemologis dari putaran "Gilir Balik" pada Konsep Simbolisasi Pancasila berdasarkan PP No 66 Tahun 1951 diatas memberikan paparan, bahwa nilai Sila ke I Ketuhanan Yang Maha Esa tetap menjadi sentral dan menyinari semua nilai-nilai ke empat sila lainnya sila IV,III,II,V secara teoritik mengapa dimulai pada sila ke IV Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, karena produk hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan adalah hasil dari sebuah hikmah kebijaksanaan sebagai perwujudan esensi demokrasi untuk menterjemahkan suara rakyat tanpa mengenyampingkan suara kepentingan pemerintah (negara), maknanya, bahwa **Hukum Progresif** haruslah taat kepada **asas kekeluargaan**⁷⁸, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan

⁷⁸ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf d UU No 10 Tahun 2004

keputusan dan taat kepada **asas Pengayoman**⁷⁹, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat, selanjutnya ke Sila Ke III Persatuan Indonesia, maknanya hukum Progresif taat kepada **asas Kebangsaan**⁸⁰, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian sila ke II Kemanusiaan yang adil dan beradab, maknanya, bahwa hukum progresif mencerminkan HAM atau taat pada **asas kemanusiaan**⁸¹, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dan taat pula pada **asas Bhinneka Tunggal Ika**⁸², artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain; agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial serta setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara serta taat pula pada **asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan**⁸³, artinya setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kemudian sila ke V Keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia, maknanya bahwa hukum progresif harus mewujudkan rasa keadilan masyarakat, atau taat pada **asas Keadilan**⁸⁴, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali dan taat pada **asas Kenusantara**⁸⁵ artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila serta taat pula pada **asas Ketertiban dan Kepastian Hukum**⁸⁶, artinya bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Berdasarkan dua paparan tentang konsep thawaf simbolisasi Pancasila di atas, apabila kita menggunakan pendekatan ontologik artinya mencari realita yang terdalem dari padanya dengan menggunakan esensi, substansi dan realita sebagai alat pendekatan. Esensi sila-sila Pancasila dimaksudkan disini adalah masing-masing sila dicari apa yang inti atau sarinya atau esensinya, adapun esensi tersebut, yaitu :⁸⁷

Ketuhanan sebagai esensi sila pertama.

Kemanusiaan sebagai esensi sila kedua

Persatuan sebagai esensi sila ketiga

Kerakyatan sebagai esensi sila keempat

⁷⁹ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No 10 Tahun 2004

⁸⁰ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf c UU No 10 Tahun 2004

⁸¹ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU No 10 Tahun 2004

⁸² Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf f UU No 10 Tahun 2004

⁸³ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf h UU No 10 Tahun 2004

⁸⁴ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf g UU No 10 Tahun 2004

⁸⁵ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf e UU No 10 Tahun 2004

⁸⁶ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf i UU No 10 Tahun 2004

⁸⁷ Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika, Edisi 3, Hanindita, Yogyakarta, 2000, halaman 61

Keadilan sebagai esensi sila kelima

Pengertian masing-masing esensi, dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Ketuhanan adalah kesesuaian dengan **hakekat Tuhan**.

Kemanusiaan adalah kesesuaian dengan **hakekat manusia**

Persatuan adalah kesesuaian dengan **hakekat satu**

Kerakyatan adalah kesesuaian dengan **hakekat rakyat**

Keadilan adalah kesesuaian dengan **hakekat adil**

Inti esensi sila-sila Pancasila dimaksudkan inti pada esensi sila-sila

Pancasila dapat dicari lagi, yaitu.

Ketuhanan esensinya adalah kata **Tuhan**

Kemanusiaan esensinya adalah kata **manusia**

Persatuan esensinya adalah kata **satu**

Kerakyatan esensinya adalah kata **rakyat**

Keadilan esensinya adalah kata **adil**

Berdasarkan struktur inti sila-sila pada Pancasila di atas, jika disusun dengan pendekatan epistemologi dengan mengajukan teori saling bergantung, teori ini dikemukakan oleh Al Gazali dan ia menyatakan dalam sebuah proposisinya:⁸⁸ "Ketahuilah! Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Kuasa sewaktu menjadi manusia, menghormati dan melebihi dari segala makhluk lainnya, diwujudkan-Nya manusia itu saling tolong menolong, berpegangan dan saling memelihara, karena penghidupan mereka tidaklah sempurna kecuali satu sama lain, saling menolong, membantu menguatkan"

Teori itu didasari dengan sebuah alasan yang kuat dibangun atas dasar proposisi Ilahiah yang mendasari teori "saling bergantung" : *"Dan kamu harus saling membantu atas perbuatan kebajikan dan taqwa dan janganlah bantu membantu (memberikan bantuan) atas perbuatan yang salah dan permusuhan"*⁸⁹

Tuhan menyuruh manusia supaya saling membantu atas kebajikan dan taqwa, karena ada sifat bergantung antara satu dengan yang lain, dan sebaliknya dilarangnya bantu membantu atas kejahatan dan permusuhan, karena keduanya itu merusak semangat saling bergantung itu.

Semangat saling membantu yang diperintahkan Tuhan di atas menumbuhkan jiwa **persatuan** untuk berkerjasama dan tanggung jawab bersama atas segala tindakan yang diambil, karena sesungguhnya **rakyat** sebuah negara itu adalah terdiri dari manusia yang dinamis "Manusia adalah bagaikan gigi-gigi sisir dalam persamaan (dan saling butuh membutuhkan) (Al Hadist) dan manusia diperintah untuk menegakan kebenaran dan keadilan. *"Sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka penetapan hukum itu hendaklah adil, bahwa dengan itu Allah telah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat* ⁹⁰ Hai orang-orang yang beriman! *Hendaklah kamu berdiri tegak di atas kebenaran yang adil semata-mata karena Allah dalam memberikan kesaksian, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum sampai mempengaruhi dirimu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena adil itu*

⁸⁸ Al Gaazali, "Al Ma'rif ul 'aqliyah" halaman 73 dalam Al Gazali, *Konsepsi Negara Bermoral*, Bulan Bintang, cetakan pertama, 1973, halamam 25.

⁸⁹ Qur'an Surah Al Maidah (5) ayat 2.

⁹⁰ Qur'an Surah Anisa (4) ayat 58

lebih dekat kepada taqwa. Karena itu bertaqwalah kamu kepada Allah ! Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹¹

Esensi dari teori itu adalah kesatuan dalam keragaman dan sekaligus keragaman dalam kesatuan, "Katakanlah ! wahai para pemeluk segala agama yang mempunyai kitab! Marilah kita tegak bersama-sama mendirikan kalimah yang sama diantara kami dan kamu, ialah (mempertahankan pendirian) bahwa kita tidak menyembah melainkan akan **Tuhan Yang Maha Esa** dengan tidak mempersekutukan-Nya dengan suatu apapun, tidak pula kita mengambil sebahagian akan sebahagian yang lainnya menjadi orang-orang sembah yang lain dari Allah. Maka jikalau kamu menolak akan kerjasama itu, maka ucapkanlah (pengakuan) bahwa kamu bersedia menjadi saksi (dihadapan Tuhan) bahwa kami adalah orang-orang Islam yang tulus⁹²

Berdasarkan itu Tuhan menciptakan Manusia menjadi satu umat yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tetapi sesungguhnya berasal dari yang satu dan diperintahkan Tuhan untuk saling berhubungan dan saling kenal mengenal satu sama lain, itulah esensi **kerakyatan** yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk bersama menegakkan keadilan dan kebenaran serta kemaslahatan bersama sebagai sebuah negara kebangsaan yang bernama Indonesia. "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari keduanya Allah mengembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan **(peliharalah) hubungan silaturahmi**. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁹³ Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku **supaya kamu saling kenal mengenal**. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha Mengenal⁹⁴, mengapa Tuhan menyuruh manusia untuk melihara hubungan silaturahmi dan supaya saling kenal mengenal, karena sungguh Tuhan telah menciptakan manusia itu berdasarkan fitrah-Nya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada sistem (dien) Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah itulah sistem (dien) yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui⁹⁵ mengapa demikian, karena tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya⁹⁶ oleh karena itu diperintahkan orang-orang beriman bertaqwa kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan⁹⁷

Pertanyaannya adalah mengapa sebuah negara atau suatu bangsa mengalami kehancuran atau dekandensi moral, inilah *early warning*-nya: "Dan Allah telah memberikan suatu perumpamaan(dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezkinya datangnya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya

⁹¹ Qur'an Surah Al Maidah (5) ayat 8

⁹² Qur'an Surah Al Imran (3) ayat 64

⁹³ Qur'an Surah An Nissa (4) ayat 1

⁹⁴ Qur'an Surah Al Hujuraat (49) ayat 13

⁹⁵ Qur'an Surah Ar Rum (30) ayat 30

⁹⁶ Qur'an Surah Al Israa (17) ayat 84

⁹⁷ Qur'an Surah Al Maaidah (5) ayat 35

telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka dimusnakan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim⁹⁸ atau apabila Allah menghendaki kebaikan pada suatu bangsa, maka dijadikanlah pemimpin-pemimpin mereka itu orang-orang yang bijaksana, dan dijadikan ulama-ulama (penulis: Ilmuwan /para ahli/ pemuka agama) **mereka pemegang hukum dan peradilan**, Allah jadikan harta kekayaan (aset-aset bangsa) berada ditangan orang-orang dermawan. Namun, jika Allah menghendaki kehancuran suatu bangsa, maka Dia jadikan pemimpin-pemimpin mereka itu orang-orang yang dungu dan berahlak rendah, orang-orang yang culas dan curang menangani hukum dan peradilan, dan harta kekayaan berada ditangan-tangan orang yang bakhil/kikir(fasik)⁹⁹ Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirim adzab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada mereka sebagian keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami¹⁰⁰ betapa banyaknya negeri yang telah Kami binasakan, maka datanglah siksaan Kami (menimpa penduduk)nya diwaktu mereka berada di malam hari, atau diwaktu mereka beristirahat ditengah hari¹⁰¹ oleh karena itu jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi kebanyakan mereka mendustakan (ayat-ayat) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya¹⁰² dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada **orang-orang yang hidup mewah dinegeri itu supaya (menaati Allah)**, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya¹⁰³ maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasakan aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari diwaktu mereka sedang tidur ? atau apakah penduduk negeri –negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka diwaktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain ? dan apakah mereka belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah (lenyap) penduduknya, bahwa kami Kami menghendaki tentu Kami azab mereka karena dosa-dosanya; dan Kami kunci mati hati mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi ?¹⁰⁴

Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannya yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi, maka apakah mereka tidak berjalan dimuka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang didalam dada¹⁰⁵ maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang dimasa itu, dan bagi orang-orang yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa¹⁰⁶, negeri-negeri (yang telah Kami binasakan) itu Kami ceritakan

⁹⁸ Qura'an Surah An Nahl (16) ayat 112-113

⁹⁹ Hadist Rasulullah Muhammad SAW riwayat HR Ad Dailami dalam Willayuddin A.R. Dani, Bahaya Indonesia menuju keruntuhan, Abu Hanifah Publlising, 2007, halaman 247

¹⁰⁰ Qur'an Surah Al Anam (6) ayat 65

¹⁰¹ Qur'an Surah Al Araaf (7) ayat 4

¹⁰² Qur'an Surah Al Araaf (7) ayat 96

¹⁰³ Qur'an Surah Al Israa(17) ayat 16

¹⁰⁴ Qur'an Surah Al Araaf (7) ayat 97-98

¹⁰⁵ Qur'an Surah Al Hajj (22) ayat 45-46

¹⁰⁶ Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 66

sebagian dan berita-beritanya kepadamu, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka (tidak) juga beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati orang-orang kafir.¹⁰⁷

Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata didalam dada orang-orang yang diberi Ilmu. Dan tidak ada yang mengikari ayat-ayat Kami kecuali orang yang zalim¹⁰⁸ ini adalah kitab yang Kami turunkan kepada penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran¹⁰⁹ dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran ?¹¹⁰ Al-Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertqwa¹¹¹ Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah pedoman, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini¹¹² Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah, sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (dien/Sistem/hukum)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa¹¹³

Padahal salah seorang non muslim yang bernama **Prof Dr Lawrence Rosen**, seorang guru besar Antropologi dan Ilmu Hukum pada universitas Colombia telah meluruskan kekeliruan persepsi dari rekan-rekan orientalis mereka selama ini tentang sistem Islam. Dalam bukunya yang *best seller* berjudul "*The Justice Of Islam: Comparative Perspective on Islamic Law and Society*" (diterbitkan oleh Oxford University Press Tahun 2000 antara lain Profesor Dr .Lawrence Rosen menuliskan: " Satu dari lima penduduk dunia adalah orang yang seyogianya tunduk dan patuh kepada syariat Islam, tetapi stereotip yang masih menyebar adalah persepsi yang salah tentang syariat Islam itu, yang seolah-olah hanya menonjolkan betapa kaku dan ganasnya hukum Islam itu¹¹⁴

Apabila proposisi-proposisi ilahiah di atas di atas diwujudkan dalam sebuah konsep "thawaf " dari esensi sila-sila Pancasila dapat diformulasikan: **Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, Adil**, jika diaplikasikan mengikuti simbolisasi Pancasila dalam lambang negara Rajawali-Garuda Pancasila rancangan Sultan Hamid II, 1950 terhadap materi muatan perundang-undangan, maka tersusun sebuah paradigma alternatif yang penulis namakan **Paradigma¹¹⁵ Pancasila Berthawaf**.

¹⁰⁷ Qur'an Surah Al Araaf (7) ayat 101

¹⁰⁸ Qur'an Surah Al Ankabuu (29) ayat 49

¹⁰⁹ Qur'an Surah Shaad (38) ayat 29

¹¹⁰ Qur'an Surah Al Qamar (54) ayat 17,22, 32,40

¹¹¹ Qur'an Surah Al Imran (3) ayat 138

¹¹² Qur'an Surah Al Jaatsiyah (45) ayat 20

¹¹³ Qur'an Surah Al Hajj (20) ayat 40

¹¹⁴ Ahmad Ali seorang Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin) "Gara-Gara "Syariat" Belanda: Terkorup di Dunia, tapi "Tak ada Korupsi," Majalah Suara Hidayatullah, Edisi Khusus 01/XV.Mei 2002/Shafar Rabiul Awal 1423, H, dalam dalam Willayuddin A.R. Dani, Bahaya Indonesia menuju keruntuhan, Abu Hanifah Publising, 2007, halaman 249

¹¹⁵ Paradigma sebagai konsep keilmuan sesungguhnya sudah muncul dan berkembang secara simultan dengan pemikiran filosofis dan keilmiah. Simultan berarti dapat muncul dikembangkan bersamaan, berbarengan, tersurat, tersirat, dan berkohefif dengan model pembentukan dan pengembangan asumsi, postulat, asas, konsep, teori, dalil dan logika yang dihasilkan oleh pemikiran filosofis dan keilmiah. Malahan untuk lebih memperkuat bangunan sebuah kerangka pemikiran rasional kerap kali diinterplaykan dengan ajaran –ajaran keagamaan yang berasal dari wahyu.



Berdasarkan konsep Paradigma Pancasila Berthawaf di atas dapat dijelaskan, bahwa Tuhan Yang Maha Esa dengan salah satu sifat asma-Nya yang Maha Adil menurunkan sifat-Nya kepada Manusia untuk menegakan keadilan agar menjadi manusia yang adil dan beradab, demikian juga ketika manusia bernegara, berbangsa dan bermasyarakat mewujudkan persatuan dalam konteks Indonesia adalah Persatuan Indonesia, karena kita menyadari bahwa manusia berasal dari yang Maha Satu (Esa) untuk itu ketika mewujudkan esensi demokrasi atas dasar konsep permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sesungguhnya manusia itu sedang memperjuangkan atau mewujudkan dari sifat-sifat-Nya (asmaul husna), yaitu salah satu yang Maha Bijaksana untuk memimpin suara hati rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan dalam lembaga perwakilan (parlemen) ataupun dalam institusi hukum baik pada tingkat supra struktur kenegaraan maupun pada infra struktur kemasyarakatan dengan memperhatikan representasi suara untuk kemaslahatan rakyat tanpa mengenyampingkan suara kemaslahatan para pemimpin pemerintahan, guna mewujudkan sebuah tujuan bersama berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga ketika menjabarkan materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, atau konsep Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, dan adil

Berdasarkan konsep Paradigma Pancasila Berthawaf di atas dapat dijelaskan, bahwa Sila Ke satu menjadi Nur Cahaya yang menyinari keempat sila lainnya, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai yang mewakili "God Spot" titik Tuhan/kecerdasan Spiritual/Spiritual Quentient (SQ)¹¹⁶ menerangi Manusia yang berprikemanusiaan yang

¹¹⁶a.SQ adalah kemampuan manusia untuk memahami makna (meaning) dan nilai (value) tertinggi kehidupan serta tujuan (vision) terhadap hal-hal yang mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia sebagai Khalifah Fil Ard. SQ menjawab pertanyaan paling mendasar :

"Siapa saya ?"

"Untuk apa saya dilahirkan ?" dan

"Mau kemana saya setelah dilahirkan ke dunia ini ?"

adil dan beradab sebagai yang mewakili kecerdasan pancaindra/Artificial Quentient¹¹⁷ bagi manusia-manusia yang menempati negara yang dinamakan negara kebangsaan Indonesia yang menjunjung persatuan, yaitu Persatuan Indonesia, sebagai yang mewakili Kecerdasan Intelektual/Intellectual Quentient IQ¹¹⁸ dalam bingkai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan sebagai yang mewakili kecerdasan emosional/Emotional Quentinet EQ¹¹⁹ serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai kecerdasan keratifitas/Creatifitas Quentient CQ,¹²⁰ sehingga ketika menjabarkan materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Berdasarkan konsep itu maka secara aksiologis melalui sinergisitas antara SQ,AQ,EQ,IQ,EQ dan CQ diwujudkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga asas peraturan perundang-undangan memenuhi konsep hukum progresif yang taat pada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :¹²¹

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai .
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/Pejabat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang
- c. Kesuaian antara jenis dan materi muatan artinya bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan Perundang-undangannya
- d. Dapat dilaksanakan, artinya bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik filosofis, Yuridis, maupun sosiologis.

b.SQ adalah kemampuan manusia untuk mengenal diri, menuju sadar diri dan menemukan fitrah dirinya (“jatidirinya”) sebagai manusia serta memberikan kemampuan bawaan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dan atau antara yang benar dan yang tepat.

c. SQ adalah perekat yang menghubungkan semua manusia secara universal, melalui pengenalan sifat-sifat-Nya (ASMAUL HUSNA) melalui karakter dasar berdasarkan Psikologi Ilahiah

¹¹⁷ AQ adalah kecerdasan manusia setelah membaca dalil-dalil Tuhan di alam semesta dan di dalam diri manusia sendiri dengan rumus 213, artinya melihat dahulu, berpikir, baru berbicara. AQ adalah kemampuan panca indra manusia yang dimulai dengan kemampuan matanya kemudian terhubung ke otak, dan THT untuk membaca fenomena dirinya sendiri, situasi sosial dan alam semesta berdasarkan pengalamannya

¹¹⁸ IQ adalah kemampuan otak kiri manusia secara numerikal (berhitung), spasial (ruang) dan linguistik (bahasa) ketika manusia membaca dirinya sendiri, situasi sosial dan alam semesta secara verbal berdasarkan persepsinya yang telah dipelajari.

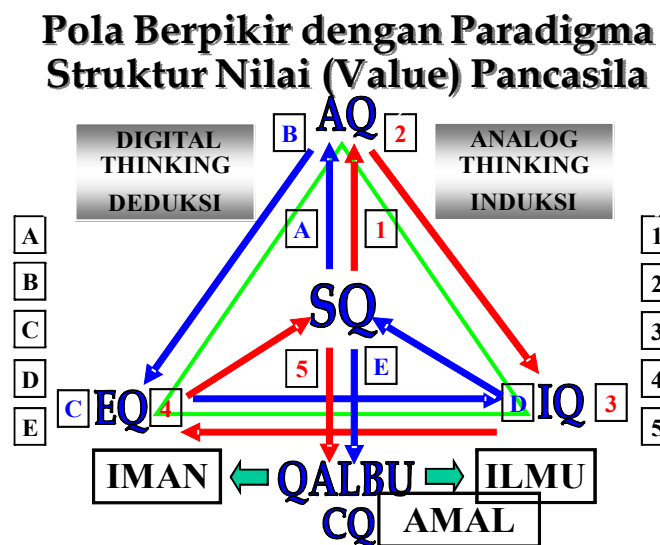
¹¹⁹ EQ adalah kemampuan otak kanan manusia untuk memahami dan ikut merasakan apa yang dialami diri sendiri, orang lain dan kemampuan untuk mendiagnosa emosi orang lain atau membaca fenomena dirinya sendiri, situasi sosial dan alam semesta tempat kita berada dan menanggapinya dengan benar dan tepat.

¹²⁰ CQ adalah kemampuan manusia menciptakan sesuatu (inovasi) yang merupakan hasil sinergisitas antar kecerdasan SQ,EQ,IQ dan AQ serta merupakan representasi qalbu yang terhubung dengan kemampuan manusia membaca dengan “mata hati” berbasiskan kepada iman dan ilmu menurut religiusitasnya masing-masing

¹²¹ Pasal 5 UU No 10 Tahun 2004

- e. Kedayaangunaan atau kehasilgunaan artinya bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya dan
- g. Keterbukaan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

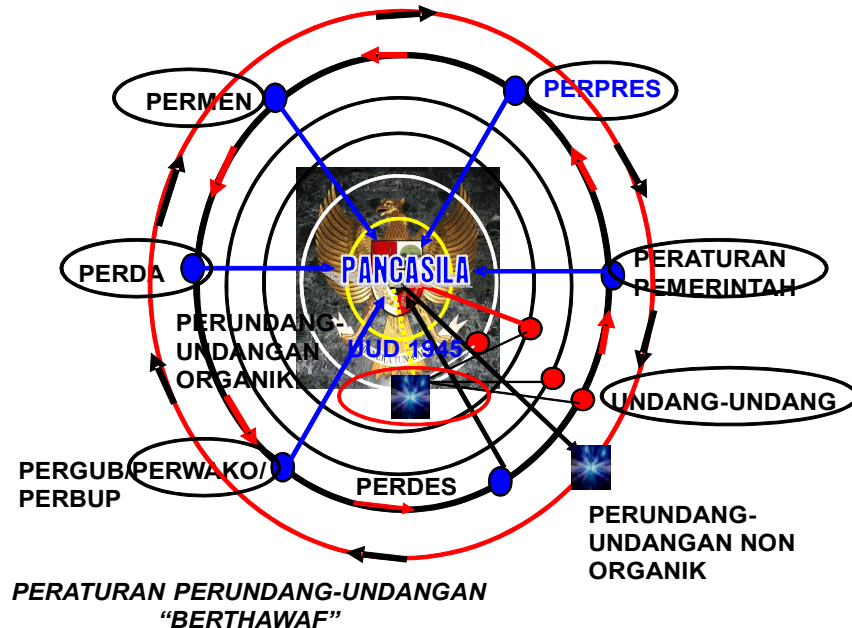
Sinergisitas SQ.AQ.IQ, EQ dan CQ itu secara konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Secara konseptual aksiologisnya dapat dipaparkan, bahwa manusia Pancasila menggunakan dua alur pemikiran dalam membentuk **hukum progresif** yang pertama adalah **pola pikir induksi** yaitu (*perhatikan garis warna merah*) dengan menggunakan kecerdasan spiritualnya (SQ 1) manusia melihat nomos atau fenomena yang ada di dalam masyarakat melalui kecerdasan panca inderanya (AQ 2) rumusnya 213 (melihat dahulu, berpikir baru berbicara) kemudian ia berpikir dan melakukan analisis kajian hukum dengan kecerdasan intelektualnya (IQ 3) selanjutnya melakukan kotemplasi/perenungan dengan kecerdasan emosionalnya terhadap fenomena yang terjadi (EQ 4) memohon petunjuk kepada Tuhan Sang Pencipta Manusia dan sunatullah Alam Semesta, kemudian ia mendapatkan pencerahan, karena mampu mensinergikan kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional (SQ,IQ,EQ) akhirnya melakukan mewujudkan tindakan dan kesadaran hukum serta memunculkan kreatifitasnya dengan kecerdasan kreatifitasnya (CQ 5) sebagai amal ibadahnya sesama manusia dan menjaga alam semesta (lingkungannya), pada alur pola pikir yang **kedua deduksi** (*perhatikan garis warna biru*) dengan menggunakan kecerdasan spiritualnya (SQ A) melihat norma (sunatullah) yang ada di alam semesta dengan kecerdasan pancaindranya (AQ B), kemudian melakukan

perenungan terhadap sunatullah yang bekerja (kerangka teoritis) dengan kecerdasan emosionalnya (EQ C), kemudian berpikir dan melakukan analisis kajian hukum dengan kekuatan intelektualnya (IQ D) serta memohon petunjuk kepada Tuhan Sang Pencipta sunatullah pada Alam Semesta dan Manusia, kemudian ia mendapatkan pencerahan karena mampu mensinergikan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual (SQ, EQ, IQ) dan pada akhirnya mewujudkan tindakan dan kesadaran hukum serta memunculkan kreatifitasnya dengan kecerdasan kreatifitas (CQ E) sebagai amal ibadahnya sesama manusia dan alam semesta (lingkungannya), kedua alur pola pikir itu dalam tataran Al-Qur'an adalah Pola Pikir Muhamad dan Ibrahim¹²²

Pertanyaannya bagaimana mewujudkan penjabaran nilai-nilai itu kedalam struktur peraturan perundang-undangan berdasarkan Paradigma Pancasila Berthawaf dapat ditransformasikan kedalam konsep Thawaf sebagai berikut:¹²³



Berdasarkan paparan konsep "thawaf" dan "gilirbalik" diatas, maka epistemologisnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Berdasarkan konsep "thawaf dalam Lambang Negara, diatas, sebenarnya secara konsepsional, struktur Sila Pancasila secara yuridis kenegaraan tidak tepat lagi disosialisasikan dengan menggunakan konsep Piramida seperti yang dinyatakan Prof Notonagoro, yang telah banyak menjadi acuan dalam pendidikan Pancasila selama ini, karena sejak tahun 1950 falsafah Pancasila menggunakan konsep "thawaf" seperti tergambar dalam simbolisasi Pancasila pada Lambang Negara Indonesia, dan tentunya ketika diaplikasikan dalam rangka harmonisasi kedalam struktur peraturan perundang-undangan menggunakan konsep "gilirbalik" untuk Peraturan Perundang_undangan yang non organik, sedangkan penjabarannya ke dalam materi muatan peraturan perundang-undangan menggunakan konsep konstruksi "thawaf" untuk peraturan perundang-undangan organik, sehingga antar materi muatan peraturan perundang-undangan tidak

¹²² QS Al Imran (Keluarga Imran) ayat 68: "Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini (Muhamad), dan orang-orang yang beriman, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman"

¹²³ Konsep Konstruksi Konsep Thawaf pada ilustrasi itu dibangun atas dasar Filosofis Thawaf yang inspirasi dari konsep simbolisasi sila-sila yang penempatan di lambang negara hasil rancangan Sultan Hamid II dan juga dijelaskan dalam transkrip Sultan Hamid II, 13 April 1967.

akan "tabrakan", bukan semua yang ada di langit dan di bumi semua berthawaf (tasbih) kepada Sang Pencipta, dan sesungguhnya struktur sila –sila pada Pancasila tersimbolisasi juga ber"thawaf" itulah mengapa kondisi bangsa Indonesia hari ini 'carut marut' dalam penegakkan hukumnya, salah satunya karena memahami Pancasila dalam perspektif hukum masih menggunakan konsep piramida dan ini pola pikir abad 19 atau terpengaruh paham positivisme Hans Kelsen dengan Stufentheory atau teori berjenjang membentuk konsep piramida yang selama masih dianut oleh para pengkaji Pancasila dan hukum kenegaraan, sedangkan sejak tahun 1950 sudah menggunakan konsep konstruksi "Thawaf" penulis sebut "Paradigma "Thawaf".

Kedua, Selanjutnya keutuhan NKRI sebenarnya juga berbanding lurus dengan salah satunya adalah pemahaman kenegaraan terhadap ideologi Pancasila yang tersimbolkan dalam lambang negara, yaitu konsep Bhinneka Tunggal Ika, masalahnya apakah kita memahami konsep ini dengan pemahaman Majemuk Tunggal atau Tunggal Majemuk, keberagaman dalam kesatuan atau kesatuan dalam keberagaman, artinya beragam tetapi sesungguhnya berasal yang satu atau berasal dari yang satu tetapi sesungguhnya pada tataran realitas adalah beragam, ketika menyatakan, bahwa berasal dari yang satu ada perintah Sang Pencipta alam semesta dan manusia, dan ketika pada tataran keberagaman juga ada perintah Sang Pencipta alam semesta dan manusia, menurut penulis bukan dua konsep yang dikhotomis, tetapi merupakan satu kesatuan tetapi terbedakan, seperti sinergisitas antara ayat kaulyah dan kauinyah di alam semesta dan dalam diri manusia, lihat butir ketiga berikut ini .

Ketiga, Sebagai kotemplasi untuk menjawab secara tepat konsep diatas, maka berdasarkan itu secara proposisi spiritual dinyatakan, bahwa Tuhan menciptakan Manusia menjadi satu umat yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tetapi sesungguhnya berasal dari yang satu dan diperintahkan Tuhan untuk saling berhubungan dan saling kenal mengenal satu sama lain, itulah esensi **kerakyatan** yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk bersama menegakkan keadilan dan kebenaran serta kemaslahatan bersama sebagai sebuah negara kebangsaan yang bernama Indonesia. "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan **(peliharalah) hubungan silaturahmi**. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹²⁴ Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku **supaya kamu saling kenal mengenal**. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal¹²⁵, mengapa Tuhan menyuruh manusia untuk melihara hubungan silaturahmi dan supaya saling kenal mengenal, karena sungguh Tuhan telah menciptakan manusia itu berdasarkan fitrah-Nya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada sistem (dien) Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah itulah sistem (dien) yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ¹²⁶ mengapa demikian, karena tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya¹²⁷ oleh karena itu diperintahkan orang-orang beriman bertaqwa kepada Allah dan carilah jalan yang

¹²⁴ Qur'an Surah An Nissa (4) ayat 1

¹²⁵ Qur'an Surah Al Hujuraat (49) ayat 13

¹²⁶ Qur'an Surah Ar Rum (30) ayat 30

¹²⁷ Qur'an Surah Al Israa (17) ayat 84

mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan¹²⁸

Pertanyaan yang perlu diajukan bagaimana konsep Pancasila berthawaf tersebut aplikasi dalam kenegaraan dari sisi hukum tata negara atau tataran aksiologisnya, tentunya untuk menjawab ini sebenarnya bangsa Indonesia sudah memiliki Cita Hukum sebagai kunci pembentukan hukum yang secara konstitusional ternormatiskan pada alinea keempat dan perwujudan "cita hukum" (*rechsidee*), yang tidak lain adalah "Pancasila". Istilah cita hukum (*rechsidee*) perlu dibedakan dari konsep hukum (*Rechtsbegriff*), karena cita hukum ada di dalam cita bangsa Indonesia, baik berupa gagasan, rasa, cipta dan pikiran. Sedangkan hukum merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diinginkan dan bertujuan mengabdikan kepada nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian haruslah dipahami bersama, bahwa cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. **Rudolf Stammler**, berpendapat cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.¹²⁹

Dengan demikian, setiap proses pembentukan dan penegakan hukum serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang telah disepakati. **Hans Kelsen** menyebut cita hukum sebagai Grundnorm atau Basic Norm. Bahkan Hans Kelsen memandang sebagai *the source of identity and as the source of unity of legal system*.¹³⁰ Oleh karena itu untuk memahami Paradigma Pancasila berthawaf dalam rancang bangun hukum tata negara perlu dikemukakan Hukum sebagai suatu sistem.

L. Rancang Bangun Sistem Kenegaraan dari Paradigma Pancasila "Berthawaf"

Untuk dapat memahami persoalan pemikiran hukum progresif dengan secara lebih baik, maka hukum hendaknya dilihat sebagai suatu sistem. Pengertian yang terkandung dalam sistem secara mendasar meliputi: (1) Sistem itu selalu berorientasi pada suatu tujuan, (2) keseluruhan adalah lebih sekedar jumlah dan bagian-bagiannya, (3) Sistem itu selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungan, dan (4) berkerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga.¹³¹

Pemahaman sistem yang demikian memberikan sebuah paparan, bahwa persoalan pemikiran hukum yang berkembang saat ini di Indonesia sangat kompleks. Disatu sisi, hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar yang disebut Grundnorm atau basic Norm. Norma dasar itu yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus penuntun penegakan hukum dan juga sebagai Paradigma untuk mewujudkan rancang bangun hukum yang ke Indonesiaan. Sebagai sistem nilai maka Grundnorm itu merupakan sumber nilai dan juga sebagai sajadah (pembatas) dalam penerapan hukum. **Hans Kelsen** memandang Grund Norm sebagai *the basic norm as the source of identity and as the source of unity of legal system*¹³²

¹²⁸ Qur'an Surah Al Maaidah (5) ayat 35

¹²⁹ Rudolf Stammler dalam Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, 2005, halaman 43

¹³⁰ Joseph Raz. *The Concept of a Legal System, An Introduction to Theory Of Legal System*. London: Oxford University Press, 1973.

¹³¹ William A Shrode & Dan J.R Voich. *Organization and Management, Basic Sistem Concept*. Tilahassee, Fla Florida State University Press, 1974, Juga dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung; Alumni 1991, halaman 48-49.

¹³² Joseph Raz. *The Concept of a Legal System, An Introduction to Theory Of Legal System*. London: Oxford University Press, 1973, halaman 170.

Sedangkan pada sisi lain atau perspektif yang lain, hukum merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian hukum merupakan subsistem sosial lain, seperti sistem sosial, budaya, dan politik dan ekonomi. Pada tataran yang demikian itu hukum dalam hal ini hukum tata negara tak bisa dilepaskan dengan politik, karena memang antara hukum dan politik adalah ibaratnya hubungan keduanya diibaratkan antara rel dan kereta api, rel adalah hukum sedang kereta api adalah politik, maka seharusnya politik harus berjalan diatas rel agar sampai pada stasiun, oleh karena itu **Lon L Fuller** melihat hukum itu sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu.¹³³

Pada tataran Indonesia ada pemikiran, bahwa hukum dikehendaki agar dapat dijadikan sandaran dan kerangka acuan. Itu memberikan makna, bahwa hukum harus bisa mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat, baik fisik maupun spiritual, pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana dalam negara Republik Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila dan sekaligus sebagai Norma Fundamental Negara, setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.

Pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut memberikan makna, bahwa sesungguhnya hukum itu syarat dengan nilai, oleh karena itu, ketika kita berkeinginan untuk mencari model sistem kenegaraan yang sesuai dengan pendekatan sistem dalam kaitannya dengan hukum tata negara Indonesia, maka mau tidak mau menggunakan pendekatan teori politik, karena antara hukum tata negara dengan politik sesuatu yang tidak terpisahkan hubungannya tetapi terbedakan dalam analisisnya.

Thomas P. Jenkin dalam bukunya *The study of political theory*, membedakan dua macam Political Theory, walaupun tidak bersifat mutlak, yaitu :¹³⁴

1. *Non valuatinal political theory*;

yakni teori yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politik tanpa mempersoalkan norma-norma atau nilai-nilai yang bersangkutan. Teori ini disebut non valuatinal atau *valuefree*, karena tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai-nilai dari phenomena dan fakta-fakta politik yang bersangkutan, melainkan biasanya hanya bersifat menggambarkan (deskriptif) dan memperbandingkan (komparatif) fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistimatisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

2. *Valuatinal political theory*;

yakni teori yang dengan landasan moral menentukan norma-norma perilaku politik (norms for political behavior). Karena yang dibahas adalah norma-norma dan nilai-nilai politik, maka teori ini disebut valuatinal. Fungsinya terutama menentukan pedoman dan patokan yang bersifat moral dan yang sesuai dengan norma-norma moral. Semua phenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini

Valuatinal political theory mencoba mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga disatu pihak memberi kepuasan perorangan, dan di pihak lain membimbingnya menuju suatu struktur masyarakat politik yang stabil dan dinamis.

¹³³ Lon L Fuller. *The Morality of Law*, New Haven. Conn: Yale University Press, 1971. Juga dalam Satipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1980 halaman 77.

¹³⁴ Thomas P. Jenkin, *The Of Political Theory*, dalam Sabine. *A History of Political Theory*, terjemahan Soewarno Hadiatmodjo, Bina Cipta, Jakarta, 1969, hal 27 atau Lihat Abu Bakar Busro, Abu Daud Busro, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia 1984, halaman 24.

Yang termasuk golongan *Valuational political theory*, di antaranya :

a. Political philosophy

Filsafat politik adalah mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Dengan filsafat politik dapat dilihat adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta (*universe*) dengan sifat dan hakikat dari kehidupan politik di dunia fana. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti *metaphysica* dan *epistemology*, harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Misalnya, menurut Plato bahwa keadilan merupakan hakikat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai *good life* yang dicita-citakan. *Political philosophy* dengan demikian mempunyai hubungan yang erat dengan *ethica*.

b. Systematic political theory

Teori politik yang sistematis ini tidak mengemukakan suatu pandangan tersendiri mengenai *metaphysica* dan *epistemology*, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi, ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik. Teori politik yang sistematis ini merupakan lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menerapkan norma-norma dalam kegiatan-kegiatan politik. Misalnya teori-teori politik dalam abad ke-19 banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan mengenai sistem hukum dan sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu. Pembahasannya didasarkan atas pandangan yang sudah lazim pada masa itu mengenai adanya hukum alam (*natural law*), tetapi tidak lagi mempersoalkan hukum alam itu sendiri.

c. Political ideology

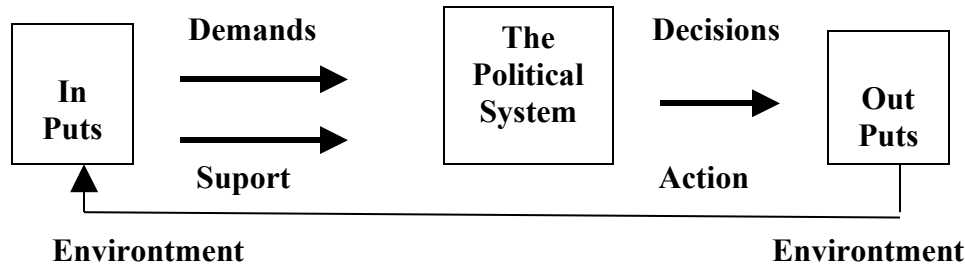
Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Nilai-nilai dan ide-ide ini merupakan suatu sistem yang berpautan. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnose, serta saran-saran (*prescription*) mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu. Berbeda dengan filsafat yang sifatnya merenung-renung, maka ideologi mempunyai tujuan menggerakkan kegiatan dan aksi (*action oriented*). Ideologi yang berkembang luas mau tidak mau dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat di mana ia berada, dan seiring harus mengadakan kompromi dan perubahan-perubahan yang cukup luas. Contoh dari beberapa ideologi atau doktrin politik ialah misalnya demokrasi, marxisme-leninisme, liberalisme, fasisme dan lain sebagainya.

Berdasarkan teori diatas, maka spektrum sistem kenegaraan Indonesia sangat jelas haruslah dibangun sebagai rancang bangun filsafat politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ini berarti proses-proses transformasi dari keinginan sosial menjadi peraturan perundangan-undangan dalam konteks hukum tata negara secara politis, maka sepektrumnya bergerak diantara dua kepentingan yaitu kepentingan supra struktur politik dan infra struktur politik. Bila dilukiskan dengan menggunakan model sistem politik dari David Easton, maka akan tampak alur proses yang semua berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses mengubah input menjadi output. Proses ini oleh Easton disebut dengan *withinsputs*, *conversion process*, dan *the black box*.

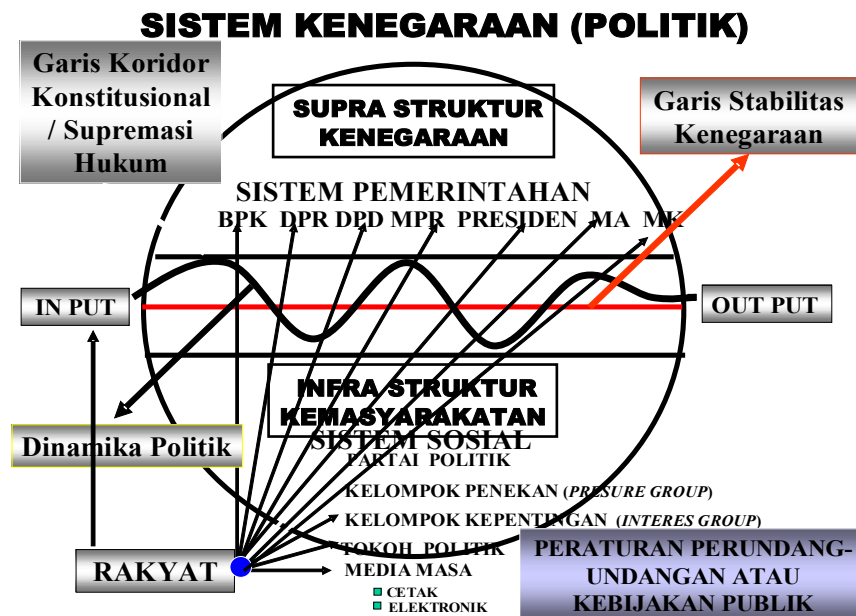
Jika proses itu dilihat dari political ideology dalam hal ini demokrasi, maka proses produksi hukum memberikan isyarat bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur masyarakat dan sistem politik suatu negara. Berkaitan dengan sistem politik suatu negara jelas political philosophy akan memberi warna hanya permasalahannya mencari model untuk melukiskan pemikiran hukum progresif yang selaras dengan paradigma Pancasila berthawaf.

Dengan meminjam bagan David Easton berikut ini :

Transformasi sosial dalam proses pembuatan
Produk Hukum Menurut David Easton
Black Box



Mengacu pada bagan tersebut, penulis berupaya mengaplikasikan dalam Sistem Politik Kenegaraan Model Spektrum Demokrasi berdasarkan Paradigma Pancasila Ber"Thawaf", sebagaimana model berikut ini:



Berdasarkan bagan bahwa sesungguhnya dalam sebuah negara demokrasi ada dua suasana struktur kehidupan kenegaraan:

- Suasana kehidupan politik rakyat/masyarakat (socio political sphere/infra struktur) pada suasana ini terdapat berbagai kekuatan atau persekutuan politik; yang terpenting diantara adalah pressure groups dalam arti luas dan political communication. Pressure groups dalam arti luas, meliputi:

- political party, yakni persekutuan politik yang bertujuan memperjuangkan kepentingan umum dengan cara ikut serta di dalam pemerintahan. Misalnya Partai Politik
- Interest group, yakni golongan kepentingan yang terdiri dari berbagai komisi dan fungsional yang bertujuan memperjuangkan kepentingannya dan yang bersangkutan dengan cara ikut serta duduk di dalam pemerintahan. Misalnya Ormas.
- Pressure group, dalam arti sempit, yakni golongan yang bertujuan memperjuangkan kepentingan golongan yang bersangkutan dengan cara mempengaruhi pemerintahan tetapi tidak ikut serta duduk di dalam pemerintahan. Misalnya NGO. Komunitas masyarakat dll
- Lobbyitss, yakni political figure yang memperjuangkan pengaruhnya dalam lingkungan badan-badan perundang-undangan agar menjamin kepentingan mereka, tanpa ikut serta didalam pemerintahan. Misalnya politikus, ekonom, Yuris dll

b. Suasana kehidupan politik kenegaraan (govermental political sphere/supra struktur, pada suasana ini terdapat lembaga-lembaga negara yang mempunyai peranan dalam proses kehidupan kenegaraan dan kehidupan politik pemerintahan.

Sebagai suatu sistem, maka kedua suana kehidupan kenegaraan itu terdapat interaksi atau hubungan timbal balik, serta berproses secara harmonis menurut kedudukan dan kewenangan serta fungsi masing-masing dalam keseluruhan maupun antar bagian. Sedang pada lingkungan kehidupan politik pemerintahan itu sendiri, terdapat hubungan baik dalam bentuk subordinasi maupun koordinasi dan lain.lain.

Kedua hubungan itu secara subtransi dibaratkan ada dua sayap dalam demokrasi yang tidak terpisahkan tetapi terbedakan, yaitu daulat rakyat dan daulat hukum. Subtransi Demokrasi itu meliputi aspek kemasyarakatan aspek kenegaraan. Ia meliputi kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi bahkan keagamaan. Pada subtransi demokrasi yang bernama daulat rakyat terdapat dimensi sosial, politik, dimensi budaya. Dimensi ekonomi dan dimensi keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan pada sayap subtransi demokrasi yang bernama daulat hukum terdapat dimensi keamanan, hukum positif, aturan, konstitusi, prosedur dan moral atau akhlak, dan dimensi hukum Tuhan. Pada sayap Daulat Rakyat ada ruang kebebasan, toleransi dan persamaan dan pada ruang daulat hukum ada ruang kepastian, ketertiban, ekuatuhan, sanksi, keadilan dan kebenaran dan keadamaian, akan tetapi daulat hukum tidak dapat menjadi subordinasi daulat rakyat melainkan daulat rakyatlah yang mesti menghargai dan tunduk pada daulat hukum

Rakyat dalam mewujudkan daulatnya ia memberi masukan yang kemudian dinamakan input baik langsung maupun melalui perwakilan yang menjadi representasi apirasinya dan masukan itu bisa melalui jalur infra struktur bisa melalui Partai Politik, Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekan atau melalui tokoh atau publik figure bisa politikus, negarawan, ekononom, yuris atau akademisi dsb kemudian masuk itu masuk kedalam supra struktur kenegaraan (politik) bisa ke MK, DPR, Presiden, MA, BPK dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan bisa masuk ke DPR dan Presiden melalui berbagai intitusi pemerintahannya kemudian diolah menjadi output dalam proses input menjadi out put inilah berbagai faktor non hukum mulai bekerja mempengaruhi proses itu sendiri.

Spektrum demokrasinya apabila bergerak lebih banyak membawa kepentingan supra struktur kenegaraan, maka pendulum demokrasi out putnya mengarah pada produk hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan negara ada kecenderungan akan terjadi demokrasi terpimpin, tetapi apabila sepektrum

demokrasinya bergerak lebih banyak membawa kepentingan infra struktur, maka pendulum demokrasi outputnya mengarah pada produk hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan rakyat akan terjadi demokrasi liberal, sehingga dalam tataran hukum progresif pendulum demokrasi outputnya adalah keseimbangan pada titik tertentu output mengedepan kepentingan supra struktur kenegaraan (hukum negara) tetapi pada titik tertentu mengedepan kepentingan infra struktur kemasyarakatan (hukum rakyat) tetapi pergerakan pendulum demokrasi tidak melampaui koridor konstitusional atau garis supremasi hukum sebagai negara hukum, sehingga outputnya didalamnya ada yang mengarah kepada tujuan hukum pada titik kepastian hukum, tetapi juga mengarah untuk kemaslahatan/kemanfaatan hukum dan apabila kedua titik itu benturan, maka yang dimenangkan adalah keadilan hukum, yaitu keadilan yang lahir dari rahim hukum itu sendiri melalui proses hukum, keadilan hukum senantiasa berhubungan dengan kebenaran hukum yang berdimensi dua, yakni dimensi kebenaran formal dan kebenaran materialnya ataupun dimensi formal dan substantiasinya. Tidak keadilan hukum bila kebenaran hukum itu diabaikan. Namun dalam proses hukum untuk melahirkan keadilan hukum titik berat kebenaran hukum ini dapat berbeda sesuai konteks perkara hukumnya.

Kadang dapat titik berat keadilan hukum bergeser pada kebenaran formal tetapi juga dapat bergerak pada kebenaran material, dapat pula titik beratnya pada dua kebenaran itu. Dengan begitu dapat ditegaskan tidak hukum progresif atau tidak ada keadilan hukum tanpa landasan kebenaran hukum. Bila keadilan hukum disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat apabila disubordinasikan pada rasa keadilan masyarakat dengan mengabaikan kebenaran hukum, dua hal tampaknya akan terjadi, pertama kebenaran akan mengalami distorsi dan kedua, daulat hukum akan tersubordinasi ke dalam daulat rakyat. Dengan sendirinya supremasi hukum dilemahkan dan tidak tegak.¹³⁵

Tentu saja tidak salah bila dalam upaya memaksimalkan keadilan hukum tanpa mengabaikan kebenaran, rasa keadilan masyarakat ikut dipertimbangkan, bahkan harus dipertimbangkan. Ini memerlukan intuitif. Hal ini disebabkan rasa keadilan hukum masyarakat dapat mengoreksi suatu yang dinamakan keadilan hukum tetapi sebenarnya bukan keadilan hukum, melainkan suatu ketidakadilan yang tersembunyi dibalik keadilan hukum. Ini sama sekali tidak diperhatikan oleh positivisme hukum. Namun masyarakat mesti sadar bahwa keadilan hukum dapat berbeda dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini disebabkan keadilan hukum adalah cermin dari tegaknya supremasi hukum dengan rasa keadilan masyarakat dapat tercermin didalamnya tetapi dapat juga tidak. Hal ini disebabkan, bila hukum itu hanya berpijak pada dimensi formalnya belaka dan mengabaikan dimensi substantiasinya, pasti akan bertentangan dan tidak akan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sedangkan keadilan hukum yang berpijak pada dimensi formalnya tetapi berhasil mengakualisasikan dimensi substantiasinya pasti tidak berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat. Tampak antara rasa keadilan masyarakat dan keadilan hukum terdapat kesesuaian dan sekaligus ketegangan laten dan permanen yang sewaktu waktu dapat muncul kepermukaan. Demokrasi memerlukan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat yang dikemas dengan istilah kemanfaatan hukum adalah sebuah perwujudan hukum progresif.

M. Simpulan

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa simpulan dari Teori Hukum dalam perspektik hukum progresif dari Prof Satjipto Rahardjo, sebagai berikut :

Pertama, Pemahaman hukum positivis berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan dari manusia sendiri berdasarkan

¹³⁵ Zumri Bestado Syamsuar, Dua Sayap Demokrasi, Romeo Grafika, Pontianak, 2002, halaman 7

kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum. Positivis memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Hukum bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal. Dalam kaca mata positivis tiada hukum kecuali perintah penguasa, bahkan aliran positivis legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang. Hukum dipahami dalam perspektif yang rasional dan logik keadilan hukum bersifat formal dan prosedural. Dalam positivis, dimensi spiritual dengan segala perpektifnya seperti agama, etika dan moralistas diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial, yakni nilai-nilai spiritual.

Kedua, Pospositivisme secara umum dapat dikatakan sebagai reaksi atau gugatan terhadap positivisme. Pospositivis mempunyai ciri dekonstruktif, relatifis, dan pluralis. Pada pemahaman hukum pospositivisme, spiritualisme dapat dipahami dalam berbagai makna sebagai spirit (ruhaniyah) yang berkaitan dengan substansi ajaran agama dan hal-hal yang berhubungan dengan etika dan moral.

Ketiga, Terdapat kecenderungan kuat untuk memahami hukum tidak hanya dipandang dari segi normatif yang positivis, tapi lebih dari itu hukum harus dilihat dalam wajah yang utuh menyuruh. Kajian seperti itu mulai terasa dan mendapat tempat alam post positivis. Upaya untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan hal yang sifatnya substantif dan transendental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral, tetapi tanpa mengenyampingkan keritisan sebuah teori yang ditawarkan sebagai iktihad manusia.

Keempat, Filsafat *emergence*, yang menawarkan cara-cara untuk melengkapi karya-karya para ilmuwan yang ada sebelumnya, dengan menunjukan cara baru bagaimana sains, filsafat dan teologi dapat saling berhubungan secara harmonis. Mendialogkan antara iman dan sains, hukum wahyu dan hukum dunia menjadi penting, sekalipun barangkali masih belum diperoleh titik temu. Dialog nilai merupakan sumbangan pemikiran yang amat menjanjikan di masa mendatang itulah ilmuwan perlu merekonstruksi konsep-konsep yang ditawarkan dalam tataran keilmuan, termasuk didalamnya ilmu hukum.

Kelima, Upaya untuk mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam persoalan hukum, agama, etik dan moral menjadi teramat penting. Kegiatan seperti itu dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tidak lagi diperlukan ketegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan ilmu hukum. Melalui upaya seperti itu dapat memperlihatkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan sesungguhnya akan mendukung hasil-hasil pengembangan ilmu hukum itu sendiri, dan kepercayaan kepada Tuhan merupakan jawaban atas pertanyaan mendasar yang diajukan ilmuwan, tetapi tidak dapat dijawab olehnya. Percaya disini adalah dimaksudkan selaras dengan konsep sunatullah baik yang ada di hamparan alam semesta maupun yang ada pada diri manusia yang juga berlaku bagi dirinya sunatullah-Nya.

Keenam, Patut direnungkan dan perlunya pergeseran paradigmatik, teoritik, praktis, bahwa pola pikir positivisme abad 19 masih membelenggu para penstudi hukum dan para penegak hukum di Indonesia, tetapi ke depan apabila pola pikir ini tetap dipertahankan secara terus menerus tanpa perbaikan citra penegakan hukum itu sendiri dan para penstudi hukum serta para pelaku penegak hukumnya, maka akan terjadi dekontruksi positivis menuju postpositivisme dengan wajah baru, yaitu Pospositivis Spiritualisme sebuah konsep teori hukum yang seharusnya berpatokan dan atau menselaraskan pada nilai-nilai moral, etika dan agama, sehingga teori hukum dan penegakan hukum akan bergeser pada konsep teori hukum dan penegakan hukum yang bersifat progresif dan merupakan sebuah solusi tawaran alternatif abad 21 dalam mencari akar jejak penegakan

hukum dan teori hukum di Indonesia. Itulah yang penulis maksudkan rancang bangun teori yang membumi (***Grounded Theory***) yang dalam konteks Indonesia adalah konsep hukum yang berdasarkan pada Paradigma Ideologi Pancasila atau penulis sebut sebagai Paradigma Pancasila "Berhawaf".

Ketujuh, Politik Hukum di Indonesia sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri yang hingga saat ini pada dasarnya tercipta setelah melalui perdebatan-perdebatan intelektual yang panjang dan melelahkan untuk menemukan "kebenaran hukum" itu, Namun perlu dipahami bahwa meskipun suatu paradigma dalam suatu ilmu hukum dianggap telah usang dan tidak mampu untuk menjawab dan memberi solusi atas problem penegakkan hukum dan teori hukum yang muncul belakangan, yang kemudian memunculkan paradigma baru ilmu hukum, namun paradigma lama tidak sendirinya tergusur, paradigma lama dalam hal ini positivisme tersebut masih tetap bertahan secara teguh dalam komunitas ilmuwan dan para penegak hukum tanpa mau menoleh kepada paradigma yang muncul belakangan paradigma hukum progresif, oleh karena itu harus dipetakan "benang merahnya" penulis sebut "benang merah" itu adalah paradigma hukum alam berbasiskan spiritualisme, itulah wajah baru **pospositivis spiritualisme**, "benang merah" tersebut kemudian penulis eksplorasi dalam konteks ke Indonesian dengan Paradigma Thawaf dengan menggunakan konsep simbolisasi Pancasila dalam Lambang Negara Republik Indonesia, sebagai rancangan Sultan Hamid II, 1950 dengan pendekatan semiologi sehingga aksiologi hukum terhadap penjabarannya ke dalam konstruksi struktur peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan dekonstruksi terhadap struktur piramida Struktur Pancasila sebagaimana dipaparkan oleh Prof Notogaroro, Prof Ruslan Saleh, Prof Hamid Attamimi yang sedikit banyak terpengaruh dengan paradigma positivisme abad ke 19 dari Hans Kelsen dan Nawiasky dengan Stufen Theory-nya. Itulah esensi tersirat dan tersurat dari paparan konsepsional ini dalam **memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /*Grounded Theory* Meng-Indonesia)**

Daftar Kepustakaan

Al Gaazali, "Al Ma'rif ul 'aqliyah" dalam Al Gazali, *Konsepsi Negara Bermoral*, Bulan Bintang, Jakarta, cetakan pertama, 1973

Abu Bakar Busro, Abu Daud Busro, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia 1984

Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico-Bandung, 1992.

Ary Ginanjar Agustian *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*, Arga, Jakrata, cetakan kedua puluh lima, Januari 2006

Aulis Arnio, *Paradigm in Legal Science, Dalam Theory of Legal Science Dorrecht*, 1984

Bagir Manan Dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993.

Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia), Mandar Maju Bandung, 2000.

Hendry P. Panggabean, *Fungsi MA Dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Clayton, Philip, *Membaca Tuhan dalam Keteraturan Alam, Refleksi Ilmiah dan Religius*, Makalah Disampaikan pada Internasional Conference on Religion and Science in the Post-Colonial Word, Yogyakarta, 2003.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1999

Edwar O Wilson, *Concidence: The Unity of Knowledge*. Alfred A. Knopf Inc, 1998

Esmi Warassih, *Prana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005

Friedman, W. . *Teori dan Filsafat Hukum*. Telaah Krisis Atas Teori-teori Hukum, Terjemahan M. Arifin. Jakarta: Rajawali. 1990

Hendry P. Panggabean, *Fungsi MA Dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

H.R Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

J.J. H. Bruggink, *Alih bahasa Arif Sidharta, Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, Gramedia, Jakarta, 1999.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Pustaka, Sinar Harapan, Aril 2005.
- Jimly Asshiddigie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, MK dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Lie Wilarjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana, University Press, 1990.
- M. Solly Lubis, *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Lon L Fuller. *The Morality of Law*, New Haven. Conn: Yale University Press, 1971
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Indonesia, 1998
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1991
- Peursen, C.A. Van. *Orientasi di Alam Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia. 1991
- Pizzi, William T, *Trials Without Truth, Why Our System of Criminal Trials has Become an Expensive Failure and we Need to Do to Rebuild It*, New York University Press, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press. 1999
- , *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhamadyah University, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhamadyah Press University, 2004.
- Ritzer, George (Penyadur Aliman). 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sidharta, Arief. 1996. "Refleksi Tentang Fundamental dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia", *Disertasi*. Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung. 1996.
- Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2003

- Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika , Edisi 3, Hanindita, Yogyakarta, 2000
- Stephen R Covey, The Seven Habits of Highly Effective People, New York: Simon & Schuster, 1990
- Thomas Khun, Peran Paradigma dalam Revolusi Sains, Remaja Karya, Bandung, 1989
- Turiman, **Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia**, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, UI, Jakarta, 1999
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1997
- Thomas P.Jenkin, The Of Political Theory, dalam Sabine. A History of Political Theory, terjemahan Soewarno Hadiatmodjo, Bina Cipta, Jakarta , 1969.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika Masalahnya, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- , 1995. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta Rajawali Press.
- Wison, Edward O, *Concilience, The Unity of Knowlwdge*, Alfred A. Knopf, New York, USA, 1998.
- Wilardjo, Like, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990.
- Wignjosoebroto Soetandyo, Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Bayu Media, April, 2008
- Warassih Esmi, Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama .Maret 2005
- Zohar, Danah dan Marhal Ian, *Spiritual Intellegence, The Ultimate Intellegence*, Bloomsbury, Landon, 2000.
- Zoest, Aart van,. **Semiotiek**. Belgia: Basisboeken/Ambo/Baarn, 1978
- Zumri Bestado Syamsuar, Dua Sayap Demokrasi, Romeo Grafika,Pontianak, 2002

Makalah:

- Satjipto Rahardjo “Paradigma Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah”, *Makalah*. Symposium Nasional Ilmu Hukum Tentang Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia, Program S3 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 10 Pebruari 1998
- Garuda Wiko, "Penegakan Hukum, Pembaharuan Hukum dan Rancang Bangun Hukum Progresif", Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Univeristas Tanjungpura, Pontianak, 29 Oktober 2009.

Soetandyo Wignyosoebroto, "Materi Tutorial Mata Kuliah Penulisan Disertasi untuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

-----"Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum", *Makalah*. Symposium Nasional Ilmu Hukum Tentang Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia, Program S3 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 10 Pebruari 1998.

Satjipto Rahardjo. "Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, *Makalah Seminar Nasional Sosiologi Hukum dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, 1998.

Jurnal :

Ridwan, Pengaruh Positivisme dalam Pemikiran Hukum (Studi Kritis atas Aliran Legalisme-Positivisme Hukum), *Jurnal Magister Hukum*, Vol.2 No.1 Februari 2000.

Artikel :

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum dan Deregulasi Moral*. Jakarta: Kompas.1997

-----, *Menjalankan Hukum dengan Kecerdasaan Spiritual*, Kompas, 30 desember 2002.

Satjipto Rahardjo, *Merintis Visi Program Doktor Hukum UNDIP*, Semarang, 2003

Salman Otje, "Menuju Pemikiran Hukum Progresif di Indonesia", <http://hukumtatanegaraindonesia>, diunduh, 17 Desember 2009

Law and Society, Review The Journal of the Law and Society Association, Volume 31 No. 2. 1997.

Dimiyati Hartono, "**Dinamisasi Stabilitas Nasional**", Suara Pembaharuan, Kamis, 30 Mei 1996.

G Sunaryo, "**Proses Terbentuknya Lambang Negara**", Majalah Forum Keadilan No 19 Mei 1990.

Mimbar UNTAN, "**Siapa Perancang Garuda Pancasila**", Edisi No 11 & 12 Tahun X, 1994

Ahmad Ali seorang Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin) "Gara-Gara "Syariat" Belanda: Terkorup di Dunia, tapi "Tak ada Korupsi", Majalah Suara Hidayatullah, Edisi Khusus 01/XV.Mei 2002/Shafar Rabiul Awal 1423, H, dalam Willayuddin A.R. Dani, **Bahaya Indonesia menuju keruntuhan**, Abu Hanifah Publising, 2007

Ensiklopedia:

Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta 1986.
Ensiklopedia Pancasila, 1994.

Peraturan :

UUD 1945 hasil amandemen II, 2000.
PP No 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Nehgara.

Dokumen:

Dokumen Transkrip penyerahan File Lambang Negara Sultan Hamid II yang ditulis di atas kertas berlogo R.T.C 1949 dihadapan H .Mas Agung , Yayasan Idayu Jakarta, 18 Juli 1974 dan keterangan Sultan Hamid II kepada wartawan Solichim Salam menjawab pertanyaan wawancara tertulis, sebagaimana disalin kembali oleh sekretaris Sultan Hamid II : Max Yusuf Al-Kadrie, 13 April 1967.

File-file Gambar rancangan Lambang Negara hasil Rancangan Sultan Hamid II, Yayasan Idayu ,Jakarta, 18 Juli 1974 dan U'un Mahdar, UNPAD, Bandung, 1976, dan Yayasan Mas Agung, 1999

Kata Pengantar

Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin tahu, Tidak pernah puas terhadap segala sesuatu yang telah ada, Sesuai konsekuensinya Ilmu terus menerus berkembang sejalan dengan pemikiran manusia pada waktu dan tempat yang dijalaninya. Dalam perkembangan dunia semakin modern ilmu juga mengalami perubahan –perubahan. Dalam tataran inilah pratik-pratik komunitas ilmuwan dalam kegiatannya bukan saja dipengarahui oleh Weltanshauung dan perspektif relegius serta paradigma sang ilmuwan, melainkan juga telah dibayangi itu sendiri dalam hakekat pemahamannya.

Dengan perkembangan yang demikian, maka akan sangta sulit untuk mengatakan bahwa ilmu itu netral. Sejak semula ilmu memang tidak netral, melainkan sarat nilai. Bukan saja nilai-nilai konstutif yang mempengaruhi ilmuwan, melainkan juga nilai-nilai kontekstual. Dengan nilai kontekstual itulah ilmuwan sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh kepentingan lain. Dengan demikian, sistem nilai yang dianut suatu komunitas ilmuwan akan mempengaruhi kesepakatan mengenai anggapan apa yang merupakan ilmu itu.

Demikian juga ilmu hukum yang berkembang hingga saat ini pada dasarnya tercipta melalui perdebatan-perdebatan intelektual yang panjang dan melelahkan untuk menemukan "kebenaran hukum" itu, Namun perlu dipahami bahwa meskipun suatu paradigma dalam suatu ilmu hukum dianggap telah usang dan tidak mampu untuk menjawab dan memberi solusi atas problem baru yang muncul belakangan, yang kemudian memunculkan paradigma baru ilmu hukum, namun paradigma lama tidak sendirinya tergusur. Paradigma lama tersebut masih bertahan secara teguh dalam suatu komunitas ilmuwan yang bersangkutan, tanpa mau menoleh kepada paradigma yang muncul belakangan.

Tulisan ini mencoba memaparkan atau mengkristalkan pemikiran Prof Satjipto Rahardjo dari beberapa pemikiran beliau yang penulis lakukan melalui komtemplasi digelapan malam. Oleh karena itu paparan ini lebih mengarah paparan kepingan-kepingan pemikiran yang tersebar dari artikel dan buku-buku beliau serta mengikuti perkembangan berbagai komentar para penstudi hukum setelah menganalisa pemikiran dalam sebuah diskusi terbatas di Universitas Tanjungpura dengan para mahasiswa peserta S3 Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP KPK UNTAN 2009, bersama mencuatnya pernyataan Ketua MK Mahfud MD yang menyatakan pada sebuah acara televisi (TV ONE) yang menyatakan, bahwa ia sependapat dengan pandangan Prof Tjip dan hal itu disampaikan setelah satu hari Prof Tjip memberikan kuliah melalui telekomprence yang diikuti oleh seluruh Fak Hukum di Indonesia dan ketika itu penulis tergugah dan bertanya apa sebenarnya Paradigma Hukum Progresif itu sebenarnya?

Penulis menyadari, bahwa ketika memasuki situasi transisi dan perubahan yang sangat cepat saat ini, hukum Indonesia ternyata memiliki banyak catatan untuk dikaji. Salah satunya yang dapat dipaparkan pada paparan ini, yaitu pandangan seorang yang dapat disebut pakar yang selama ini senantiasa melihat hukum melalui cara pandang berbeda. Dialah Prof Satjipto Rahardjo, barang kali bukan nama yang asing bagi kalangan praktisi dan akademisi hukum di Indonesia. Buah karyanya dalam berbagai tulisan telah memberikan nuansa baru bagi perkembangan. Oleh karena itu paparan ini masih pada tingkat paparan dan perian dan deskriptif, namun secuil sketsa ini semoga memberikan manfaat bagi para penstudi hukum.

Pontianak, 1 Januari 2010
Penulis,

Daftar Isi

Kata Pengantar

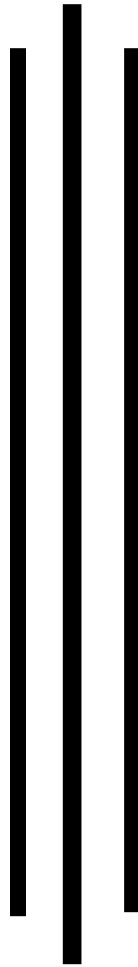
Halaman

A. Menelusuri Jejak Pemikiran Prof Tjip.....	1
B. Diantara Persimpangan Profesi dan Ilmu.....	2
C. Ilmu Hukum yang mengalami pergeseran paradigmatik.....	4
D. Sebuah Kritik Terhadap konsep Hukum Modern saat ini.....	7
E. Pengertian Hukum "berbanding lurus" dengan Paradigma yang dianut	8
F. Paradigma Positivisme dari Jhon Austin "membelenggu" Pemikiran.....	10
Hukum	
G. Bagaimana mengantarkan Hukum Progresif menjadi sebuah Paradigma Kritis?	15
H. Dekonstruksi Paradigma Positivisme	18
I. Corak Spiritualisme dan Perlunya Dialog Nilai	19
J. Mencari Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) Paradigmatik yang membumi (<i>Grounded Theory</i>) Hukum di Indonesia	26
K. Hukum Progresif dalam Ideologis Pancasila dengan Paradigma "Thawaf	35
L. Rancang Bangun Sistem Kenegaraan dari Paradigma Pancasila "Berthawaf	56
M. Simpulan	62

Daftar Kepustakaan

**Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo
Dalam Paradigma "Thawaf"**

**(Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum
Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)**



OLEH : TURIMAN

email: gitriaincenter@yahoo.co.id

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**